

**PEMBERLAKUAN “OEANG REPOEBLIK INDONESIA” DAN  
PENGARUHNYA DALAM BIDANG POLITIK  
DAN EKONOMI (1945-1950)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta Untuk  
Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan**



**Oleh:  
SITI NUR HADISAH BAROROH  
08406241032**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2012**

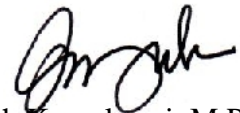
## **PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul Pemberlakuan “Oeang Repoeblik Indonesia” dan Pengaruhnya dalam Bidang Politik dan Ekonomi (1945 – 1950) yang disusun oleh Siti Nur Hadisah Baroroh, NIM 08406241032 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 25 April 2012

Pembimbing



Dyah Kumalasari, M.Pd

NIP. 19770618 200312 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pemberlakuan “Oeang Repoeblik Indonesia” dan Pengaruhnya dalam Bidang Politik dan Ekonomi (1945 – 1950) telah dipertahankan di depan Dewan Penguji skripsi tanggal 10 Mei 2012 dan telah memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan.

### DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan		
Dr. Aman, M.Pd	Ketua Penguji		23 Mei 2012
Dyah Kumalasari, M.Pd	Sekretaris		23 Mei 2012
Harianti, M.Pd	Penguji Utama		22 Mei 2012

Yogyakarta, 23 Mei 2012

Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri

Yogyakarta

Dekan



Prof.Dr. Ajat Sudrajat,  
M.Ag  
NIP. 19620321 198903 1  
001

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Hadisah Baroroh  
NIM : 08406241032  
Prodi : Pendidikan Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Judul : Pemberlakuan “Oeang Repoeblik Indonesia” dan Pengaruhnya  
dalam Bidang Politik dan Ekonomi (1945 – 1950).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan karya penulis. Sepanjang pengetahuan penulis, skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis gunakan sebagai sumber penulisan.

Pernyataan ini oleh penulis dibuat dengan penuh kesadaran dan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, Mei 2012  
Yang Menyatakan,



Siti Nur Hadisah Baroroh  
NIM.08406241032



## MOTTO

Sesuatu akan berubah apabila seseorang berani melangkah dan berbuat sesuatu yang bisa menggantikan kedudukan menjadi kebahagiaan karena kegagalan bukanlah saat seseorang terjatuh tetapi saat menyerah dan berhenti berusaha berdiri setelah terjatuh. (Penulis)

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada:

- ♥ Ayahanda tercinta “Sudiyat” dan Ibundaku tersayang “Tri Wuryani”.
- ♥ Para dosen jurusan Pendidikan Sejarah terutama Pak Nur Rokhman, Bu Dyah Kumalasari, Bu Harianti, Terry Irenewaty, Pak Aman yang selalu membimbing dan memberi arahan.
- ♥ Almamaterku tercinta Universitas Negeri Yogyakarta.

Serta ku bingkiskan untuk:

- ♥ Kakakku “Ahmad Nur Ikhrom dan Siti Nur Mabruroh”.
- ♥ Teman spesialku Ferdiansyah.
- ♥ Teman Sekostku Duwi Asri dan Mutofina Arofah.
- ♥ Serta teman-temanku seperjuangan Pendidikan sejarah 2008.

## **ABSTRAK**

### **PEMBERLAKUAN “OEANG REPOEBLIK INDONESIA” DAN PENGARUHNYA DALAM BIDANG POLITIK DAN EKONOMI (1945-1950)**

**Siti Nur Hadisah Baroroh  
NIM. 08406241032**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh sejarah mata uang Indonesia pertama setelah kemerdekaan yang tidak tercatat dengan sempurna dan terdapat beberapa bagian yang perlu diketahui. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk (1) Mengetahui keadaan politik dan ekonomi sekitar pemberlakuan ORI; (2) Menjelaskan proses pemberlakuan ORI dari permintaan pengeluaran ORI hingga penarikan dari peredaran; (3) Menjelaskan tentang pengaruh ORI dalam bidang politik dan ekonomi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis menurut Louis Gottschalk. Adapun tahapan-tahapan penulisan antara lain: 1) Heuristik yaitu pencarian atau pengumpulan sumber-sumber sejarah; 2) Kritik Sumber/ Verifikasi dengan melakukan kritik ekstern dan intern untuk menentukan validitas (keaslian sumber) dan kredibilitas sumber; 3) Analisis Sumber/ Interpretasi yaitu menafsirkan dan mengalisa sumber-sumber sejarah yang akhirnya menghasilkan suatu rangkaian peristiwa; 4) Historiografi/ Penulisan sejarah merupakan penulisan, pemaparan hasil penelitian sejarah yang dilakukan.

Keadaan politik dan ekonomi sekitar pemberlakuan ORI sudah tentu tidak stabil, karena adanya hambatan baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri (Belanda). Permintaan pengeluaran ORI pertama diusulkan oleh Syafruddin Prawiranegara pada tahun 1945 yang kemudian berlaku secara resmi tanggal 30 Oktober 1946. Adanya agresi militer Belanda I tahun 1947 membuat Indonesia mengambil kebijakan dengan memberikan kewenangan kepada daerah Untuk sementara menerbitkan mata uang sendiri yang dikenal dengan Urida. Pengaruh ORI maupun Urida dalam bidang politik yaitu lambang utama negara merdeka yang merupakan wujud kedaulatan penuh negara dalam mengatur negaranya dan sebagai alat perjuangan bangsa, karena dengan adanya ORI membuat masyarakat lebih percaya bahwa negaranya telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Dalam bidang ekonomi yaitu sebagai alat pembayaran yang sah dan untuk membiayai revolusi. Penggunaan ORI maupun Urida oleh rakyat merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan.

Kata kunci: ORI, Urida, ekonomi, politik dan partisipasi rakyat

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberlakuan “Oeang Repoeblik Indonesia“ dan Pengaruhnya dalam Bidang Politik dan Ekonomi (1945-1950)“ dengan baik.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UNY.
3. Bapak Prof. Ajat Sudrajat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS).
4. Bapak Nur Rokhman, M.Pd selaku Ketua Jurusan dan Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dengan penuh kesabaran.
5. Bu Dyah Kumalasari, M.Pd selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
6. Bu Harianti, M.Pd selaku narasumber yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan.

7. Seluruh dosen dan staff, karyawan/karyawati.
8. Kakakku “Ahmad Nur Ikhrom” dan “Siti Nur Mabruroh” yang telah memberikan dukungan.
9. Teman Spesialku “Ferdiansyah” yang selalu memberi semangat.
10. Temanku dikost “Mutofina Arofah, Duwi Asri, Unik, dan dek Feni Meilani”.
11. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Sejarah UNY angkatan 2008.
12. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi menjadikan skripsi ini lebih sempurna dan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, April 2012



Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
DAFTAR ISTILAH ASING .....	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Historiografi yang Relevan .....	14
G. Metode Penelitian .....	16
H. Pendekatan Penelitian .....	23

I. Sistematika Pembahasan .....	25
---------------------------------	----

## **BAB II KEADAAN INDONESIA PADA SAAT PEMBERLAKUAN ORI**

A. Keadaan Ekonomi di Indonesia	
1. <i>Hiperinflasi</i> (Inflasi Sangat Tinggi) .....	28
2. Blokade Ekonomi Belanda .....	33
3. Kekosongan Kas Negara .....	37
B. Kejadian-kejadian Politik Masyarakat Indonesia	
1. Konflik Intern .....	38
2. Agresi Belanda I dan II .....	41
3. Ibukota RI di Yogyakarta .....	44
C. Konferensi Meja Bundar (KMB) .....	46

## **BAB III PEMBERLAKUAN ORI**

A. Pengusulan Pengeluaran ORI .....	50
B. Persiapan Percetakan ORI .....	54
C. Pengeluaran ORI .....	59
D. Penyebaran ORI .....	67
E. Pengeluaran Urda .....	72
F. Penarikan Ori dan Urda .....	77

## **BAB IV    PENGARUH ORI DALAM BIDANG POLITIK DAN EKONOMI**

### **A. Pengaruh ORI dalam Bidang Politik**

1. ORI sebagai Lambang Utama Negara Merdeka ..... 80
2. ORI sebagai Alat Perjuangan ..... 85

### **B. Pengaruh ORI dalam Bidang Ekonomi**

1. ORI sebagai Alat Pembayaran ..... 88
2. ORI sebagai Pembiayaan Revolusi ..... 90

### **C. Dampak ORI dalam Kehidupan Masyarakat**

- Indonesia ..... 92

## **BAB V    KESIMPULAN..... 95**

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 98**

## **LAMPIRAN ..... 103**



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Arsip Kementerian Penerangan: Oendang-oendang No 19 th. '46 tentang pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia dan penjelasannya .....	103
2. Arsip Surat Kementerian Keoeangan: No. R.1-1-2/ Rahasia terkait dengan kertas percetakan ORI, 9 Nov 1946 .....	106
3. Arsip Jawatan Kepolisian Negara: Pedoman pekerdjaan sub bagian economie, pengawasan peredaran uang .....	108
4. Arsip Kementerian Dalam Negeri: Koetipan Pemberitahuan .....	109
5. Arsip Kementerian Penerangan: Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1948 tentang perantaraan bank-bank pemerintah dalam peredaran uang berhubungan dengan adanya uang palsu.....	110
6. Arsip Jawatan Kepolisian Negara: No. 358/T.0/33/2/R/E terkait pembawaan ORI baru dari daerah pendudukan .....	113
7. Arsip Jawatan Kepolisian Negara: No.382/Pam dan No.29/ Pam tentang tabel ORI yang resmi dari seratus rupiah hidjau .....	114
8. Arsip Kementerian Dalam Negeri: terkait dengan peminjaman uang kepada Bank Rakjat di Jogja, 25 Djuni 1948 .....	116
9. Arsip Kementerian Penerangan: Undang-undang No.32 Tahun 1948 tentang peredaran uang dengan perantaraan bank .....	117
10. Pengumuman Menteri Negara RI Koordinator Keamanan No.1/11 tahun 1949 tentang uang RI (URI) tetap sebagai alat pembayaran yang sah, Juli 1949 .....	119
11. Arsip Syafruddin Prawiranegara No. 1 tentang Majalah Sikap: Dua tahun uang Republik Indonesia .....	121
12. Soemanang, "Oeang Repoeblik", dalam <i>Kedaulatan Rakyat</i> , 28 Oktober 1946 .....	126
13. Mohammad Hatta, "Keloearnja Oeang Repoeblik Hari Bersedjarah: Pidato Wakil Presiden Pd Tgl 29 Okt", dalam <i>Merdeka</i> , 31 Oktober 1946 .....	127
14. Foto ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Sumatera).....	128
15. Foto ORIN (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Nias) .....	129
16. Foto-foto Uang .....	130

## DAFTAR SINGKATAN

AFNEI	: <i>Allied Forces Netherlands East Indies</i>
BFO	: <i>Bijzonder Federall Overleg</i>
BP KNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
BTC	: <i>Banking and Trading Corporation</i>
KTN	: Komisi Tiga Negara
NICA	: <i>Nederlandsche Indische Civiele Administrasie</i>
NIMEF	: <i>Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
ORI	: Oeang Repoeblik Indonesia
ORITA	: Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Tapanoeli
PDRI	: Pemerintah Darurat Republik Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RRI	: Radio Republik Indonesia
UNCI	: <i>United Nations Commission for Indonesia</i>
Urda	: Uang Repoblik Indonesia Daerah
URIDA	: Uang Republik Indonesia Daerah Aceh
URIDAB	: Uang Republik Indonesia Daerah Banten
URIDJA	: Uang Republik Indonesia Daerah Djambi
URIPS	: Uang Republik Indonesia Daerah Sumatera
URISU	: Uang Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara
TKR	: Tentara Keamanan Rakyat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia

## DAFTAR ISTILAH ASING

<i>Blokade</i>	: Pengepungan (penutupan) suatu daerah, kawasan negara sehingga orang-orang, barang, kapal dan sebagainya tidak dapat keluar masuk bebas.
<i>Continental Money</i>	: Menjaga keuangan dalam batas-batas sempit.
<i>Coup</i>	: Perebutan Kekuasaan.
<i>Emisi</i>	: Pengeluaran mata uang logam atau kertas.
<i>Green Back</i>	: Mata uang kertas yang dikeluarkan selama perang saudara Amerika.
<i>Inflasi</i>	: Kemerossotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang.
<i>Intern</i>	: Sebelah dalam, di kalangan sendiri, lingkungan sendiri.
<i>Instrument of Revolution</i>	: Alat perjuangan revolusi.
<i>Interdependen</i>	: Saling kebergantungan.
<i>Money Invansion</i>	: Invasi uang.
<i>Monetary Reform</i>	: Perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang moneter.
<i>Politionele Actie</i>	: Mengatur ketertiban dan Keamanan seperti “tindakan kepolisian”.
<i>Sanering uang</i>	: Penyehatan Uang.
<i>War of Independent</i>	: Perang Kemerdekaan.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan oleh umum sebagai alat bantu dalam pertukaran atau dapat dikatakan sebagai barang yang memiliki nilai di dalamnya.<sup>1</sup> Pentingnya peranan uang tidak hanya dapat bermanfaat bagi peranan perorangan, melainkan sebagai penggerak roda perekonomian secara keseluruhan. Uang juga mempunyai sifat dan dinamika yang mampu menjelma sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pemberlakuan mata uang biasanya hanya bertujuan untuk dapat melaksanakan pembangunan perekonomian pemerintah agar dapat berjalan lancar. Adapun mata uang pertama yang dimiliki Indonesia setelah merdeka dikenal dengan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)<sup>2</sup>. Pemberlakuan ORI tidak hanya untuk membangun perekonomian semata tetapi juga mempunyai manfaat politis di dalamnya.

Sejarah mata uang Indonesia pada awal kemerdekaan memang tidak tercatat dengan sempurna. Namun, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa bagian yang perlu untuk diketahui. Sebelum Indonesia memproklamasikan

---

<sup>1</sup> Harry Waluya, *Ekonomi Moneter Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 4.

<sup>2</sup> Selanjutnya penulisan Oeang Repoeblik Indonesia hanya ditulis ORI. ORI merupakan mata uang pertama Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri setelah kemerdekaan untuk menggantikan mata uang Jepang sebagai alat pembayaran yang sah.

kemerdekaan, bangsa Indonesia diduduki oleh Jepang selama tiga setengah tahun.

Perekonomian di Indonesia pada masa pendudukan Jepang didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing dan para pedagang etnis Cina. Sedangkan gerak ekonomi rakyat Indonesia sangat sempit, hanya dibatasi untuk pertanian dan pedagang kecil. Hal ini dapat dilihat ketika Jepang mewajibkan rakyat Indonesia untuk menanam pohon jarak sebagai bahan pelumas yang digunakan untuk keperluan perang, selain itu rakyat juga diwajibkan menyerahkan sebagian hasil panennya seperti kopi, tembakau, dan teh ke pemerintah Jepang. Disamping itu, rakyat Indonesia juga dilatih militer oleh Jepang terutama pemuda-pemuda Indonesia guna mempertahankan wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Pengerahan pangan dan tenaga kerja secara paksa pada masa pendudukan Jepang mengakibatkan timbulnya kelaparan, terutama pada tahun 1944 dan 1945. Keadaan ini bertambah buruk ketika Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perang dalam membentuk Asia Timur Raya. Pemerintahan pendudukan Jepang juga mengeluarkan peraturan-peraturan baru untuk mengendalikan dan mengatur kembali hasil-hasil utama Indonesia seperti beras, karet, gula, teh, kopi, dan lada. Peraturan ini mengakibatkan terputusnya hubungan dengan pasar-pasar ekspor tradisional. Hal ini menyebabkan timbulnya kekacauan dalam bidang perekonomian dan

---

<sup>3</sup> Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: DEPDIBUD, 1975), hlm. 63.

tingginya tingkat kelaparan di masyarakat yang banyak menimbulkan korban jiwa. Meskipun kekacauan dan tingginya tingkat kelaparan hanya terjadi sekitar dua setengah tahun, namun memiliki dampak yang besar pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut menimbulkan kekacauan dan penderitaan yang menjadikan tahun-tahun terburuk dari depresi yang tampak ringan.<sup>4</sup>

Lepas dari sektor perekonomian, pemerintahan pendudukan Jepang juga membanjiri Indonesia dengan mata uang Jepang yang mendorong terjadinya peningkatan inflasi terutama sejak tahun 1943 sampai awal tahun 1946. Pada pertengahan tahun 1945 mata uang Jepang bernilai sekitar 2,5 persen dari nilai nominalnya. Setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, secara tidak langsung seluruh wilayah yang dahulunya dikuasai oleh pendudukan pemerintah Jepang beralih ke pihak Sekutu, termasuk wilayah Indonesia.

Tentara Sekutu yang datang ke Indonesia diwakili oleh Inggris. Namun, sebelum tentara Sekutu datang ke Indonesia, bangsa Indonesia sudah memasuki babak baru yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal yang sangat ditunggu-tunggu untuk menentukan nasib sebagai bangsa dan tanah air yang merdeka, menyusun tenaga kita sendiri, tetap percaya pada kekuatan sendiri yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern* terj. Dharmono Hardjowidjono, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 300.

<sup>5</sup> Hoetaoeroek, M., *Sedjarah Umum: Masa Sesudah Perang Dunia II (1945-1970)* Ed. P. J. Suwarno, (Djakarta: Erlangga, 1970), hlm. 9.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno di jalan Pegangsaan Timur 56 dihadiri oleh puluhan orang, yang kemudian disusul dengan pemindahan kekuasaan Jepang ke tangan bangsa Indonesia.<sup>6</sup> Keadaan politik dan ekonomi Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan tidak serta merta ikut membaik. Dalam memperbaiki keadaan politik, pemerintah RI melakukan konsolidasi ke dalam. Kemudian pemerintah RI melakukan perbaikan perekonomian dan keuangan bangsa Indonesia yang sangat buruk yang merupakan salah satu dampak dari pendudukan Jepang. Meskipun demikian, pemerintah RI yang baru berdiri tersebut belum dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang.<sup>7</sup>

Peredaran uang Jepang belum dapat dikendalikan, tentara Sekutu yang diwakili oleh Inggris sudah masuk ke wilayah Indonesia, yang di dalamnya terdapat NICA (*Nederlandsche Indische Civiele Administratie*) atau Belanda.<sup>8</sup> Pada masa peralihan ini, Belanda berusaha untuk menduduki Indonesia kembali dengan cara mengacaukan perekonomian Indonesia dan melakukan agresi militer. Belanda mengacaukan perekonomian Indonesia dengan mengedarkan simpanan mata uang Jepang dan mengeluarkan mata uang baru, yang menimbulkan peningkatan inflasi.

---

<sup>6</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk., *Negara dan Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm. 63.

<sup>7</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *Persoalan Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Indira, 1953), hlm. 20.

<sup>8</sup> Moedjanto, G., *Indonesia Abad Ke-20 I*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 99.

Menanggapi sikap Belanda tersebut, pemerintah RI mengeluarkan pernyataan yang berisi penolakan penggunaan uang NICA dan menyatakan bahwa uang NICA bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, pada tanggal 6 Maret 1946, panglima Sekutu secara resmi mengumumkan berlakunya uang NICA pada daerah-daerah pendudukan pasukan Sekutu sebagai pengganti uang pemerintah pendudukan Jepang.

Upaya NICA dalam mengedarkan uang di wilayah Jawa dan Sumatra sering mendapat perlawanan dari rakyat yang tidak jarang menimbulkan kekerasan.<sup>9</sup> Pemberlakuan uang NICA yang didukung oleh pihak Sekutu tersebut membuat pemerintah RI melakukan hal yang sama yaitu mencetak uang kertas Republik Indonesia pertama yang dikenal dengan ORI, yang diberlakukan secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1946. Penyebaran ORI ke seluruh wilayah RI mengalami banyak hambatan terutama setelah Belanda melakukan agresi pertama tahun 1947. Sehingga pemerintah memberikan kewenangan pada daerah untuk menerbitkan mata uang atau alat pembayaran yang sah dan berlaku terbatas pada daerahnya masing-masing yang disebut Uang Republik Indonesia Daerah (Urida).

Setelah pemberlakuan ORI dan Urida di berbagai wilayah yang dikuasai RI, pertumbuhan ekonomi masyarakat masih berjalan lambat. Hal ini disebabkan keadaan politik Republik Indonesia yang masih belum stabil, kebijakan pemerintah yang berganti-ganti dan pertumbuhan penduduk yang

---

<sup>9</sup> Mohammad Iskandar, "Oeang Repoeblik" dalam *Kancah Revolusi, Jurnal Sejarah* Vol.6 No. 1, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia, 2004), hlm. 48.



relatif cepat.<sup>10</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran ORI belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun, tetap memiliki pengaruh yang berarti dalam perjuangan bangsa Indonesia.

ORI mulai beredar tanggal 30 Oktober 1946 dan ditarik kembali dalam bulan Maret 1950, hanya berlangsung 3 tahun 5 bulan. Meskipun demikian, pemberlakuan ORI telah mendukung pemerintah RI dalam mengatur segala administrasi, mengorganisasi dan memperkuat tentaranya, serta memelihara keamanan dan ketertiban serta mengurus kesejahteraan rakyat dalam perang melawan Belanda.

Pemberlakuan ORI tidak hanya merupakan suatu lambang (atribut) negara yang merdeka dan berdaulat, akan tetapi juga sebagai “*Instrument of Revolution*” (alat perjuangan revolusi). ORI mempunyai pengaruh dalam kehidupan politik maupun ekonomi. Selain itu, kehidupan politik dan ekonomi saling mempengaruhi secara *interdependen* (saling kebergantungan). Stabilitas politik sangat mempengaruhi dapat tidaknya suatu kebijakan ekonomi diberlakukan. Tingkat perkembangan ekonomi sangat menentukan pola pikir dan toleransi di bidang politik.<sup>11</sup> Tanpa stabilitas politik, maka pembangunan ekonomi tidak mungkin diselenggarakan dan tidak mungkin pula ditempuh kebijakan keuangan dan moneter yang terencana dan konsisten.

---

<sup>10</sup> LEMHANAS, *Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: Aqua Prees, 1989), hlm. 118.

<sup>11</sup> Kwik Kian Gie, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengkaji secara mendalam tentang pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dan pengaruhnya dalam bidang politik dan ekonomi (1945-1950). Penulis tertarik untuk mengetahui secara rinci tentang bagaimana keadaan Indonesia sekitar pemberlakuan ORI baik keadaan ekonomi maupun politik. Selain itu, ketertarikan penulis terletak pada pemberlakuan ORI yang tidak hanya berpengaruh dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga memiliki pengaruh secara politik yaitu sebagai alat perjuangan dan atribut sebagai negara yang merdeka yang keberadaannya ternyata tidak begitu diketahui oleh masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan politik dan ekonomi pada saat pemberlakuan ORI?
2. Bagaimana proses pemberlakuan ORI?
3. Bagaimana pengaruh ORI dalam bidang politik dan ekonomi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Khusus
  - a. Untuk mengetahui keadaan politik dan ekonomi pada saat pemberlakuan ORI.

- b. Memberikan penjelasan tentang proses pemberlakuan ORI dari permintaan pengeluaran ORI hingga penarikan dari peredaran.
- c. Memberikan penjelasan tentang pengaruh ORI dalam bidang politik dan ekonomi.

## 2. Tujuan Umum

- a. Penulisan skripsi merupakan salah satu sarana untuk melatih daya pikir kritis, analisis dan objektif dalam melakukan penulisan suatu karya sejarah.
- b. Mampu menerapkan ilmu metodologi penelitian sejarah dan historiografi yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah, sehingga diharapkan mencapai penelitian yang berkualitas.
- c. Menambah khasanah karya ilmiah sejarah yang berguna di masa yang akan datang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul Pemberlakuan “Oeang Repoeblik Indonesia” dan Pengaruhnya dalam Bidang Politik dan Ekonomi adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Penulis

- a. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai sejarah diberlakukannya “Oeang Repoeblik Indonesia” dan pengaruhnya dalam bidang politik dan ekonomi (1945-1950).

- b. Penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi penulis untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu peristiwa sejarah, serta menyajikannya dalam suatu karya ilmiah yang objektif.
- c. Guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

## 2. Bagi Pembaca

- a. Setelah membaca skripsi ini diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran objektif tentang pemberlakuan “Oeang Repoeblik Indonesia” dan pengaruhnya dalam bidang politik dan ekonomi (1945-1950).
- b. Menumbuhkan niat untuk mempelajari lebih dalam lagi nilai-nilai kesejarahan baik peristiwa maupun yang lain.
- c. Dapat menambah wawasan pengetahuan dan menjadi informasi atau acuan penelitian yang sejenis.

## E. Kajian Pustaka

Penulisan sebuah penelitian diperlukan suatu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan dalam pemikiran. Penelitian bisa hanya menggunakan kajian pustaka atau kajian teori atau menggunakan kedua-duanya.<sup>12</sup> Melalui kajian pustaka

---

<sup>12</sup> Daliman, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2006), hlm. 3.

ini penulis mendapatkan pustaka-pustaka atau literatur yang akan digunakan dalam penelitian sejarah.

ORI merupakan mata uang pertama Indonesia setelah merdeka, mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan untuk menggantikan mata uang Jepang atau mata uang yang berlaku saat itu sebagai alat pembayaran yang sah. Uang merupakan suatu alat pembayaran untuk mendapatkan suatu barang, sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pemberlakuan ORI adalah *monetary reform* yang dikenal dengan istilah politik *sanering* uang (penyehatan uang), yaitu tindakan pemerintah untuk menghilangkan kondisi mata uang tidak sehat yang beredar dalam masyarakat dengan cara memperbaharui nilai mata uang atau mengganti uang lama dengan mengeluarkan uang baru.<sup>13</sup>

Peredaran uang Jepang yang saat itu merupakan alat pembayaran yang sah tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah dan menimbulkan harga produk-produk pertanian semakin mahal, bahkan orang-orang kota tidak dapat membeli bahan pangan dengan uang melainkan harus dengan barang-barang konsumsi.<sup>14</sup> Jumlah uang Jepang yang beredar kira-kira 1500 juta rupiah<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> “Menjehatkan Keoeangan”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 26 Oktober 1946, hlm. 1.

<sup>14</sup> Anton Haryono, *Dari Rakyat Legitimasi Dibangun, Kepada Rakyat Eksploitasi Diarahkan: Indonesia Pra Kolonial, Kolonial, dan Pasca Kolonial. Dalam Indonesia Alternatif*, (Yogyakarta: tp, 2003), hlm. 92.

Jepang telah diedarkan oleh angkatan perang Jepang dan ketika Belanda masuk ke Indonesia lagi dengan membonceng Sekutu, Belanda mengedarkan sisa simpanan persediaan uang Jepang ke peredaran yang menyebabkan terjadinya *hiperinflasi*.<sup>16</sup>

Keterpurukan ini berlanjut ketika panglima sekutu mengumumkan pada tanggal 6 Maret 1946 mulai berlaku uang NICA pada daerah-daerah yang menjadi daerah pendudukan pasukan Sekutu sebagai pengganti uang pemerintah pendudukan Jepang. Selain itu, Belanda telah melakukan blokade laut yang dimulai sejak bulan November 1945 dengan pelaksanaan yang keras oleh Belanda terhadap Indonesia.<sup>17</sup> Pemasukan kas negara semakin sedikit jika dibandingkan dengan pengeluaran yang sangat besar untuk menjalankan roda pemerintahan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemerintah berusaha memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, sekaligus menangkal dampak negatif tindakan NICA, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pada 2 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa uang Hindia Belanda yang baru tidak berlaku di wilayah RI.<sup>18</sup> Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa uang-uang tersebut bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selanjutnya pemerintah

---

<sup>15</sup> Sejak tahun 1944, istilah “gulden” telah diubah menjadi “rupiah”, walaupun istilah “rupiah” sudah digunakan sejak tahun 1833. Lihat M. Dawam Rahardjo, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 48.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>17</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>18</sup> Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 45.

Indonesia melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki perekonomian terutama dalam mengatasi peredaran uang Jepang yang semakin tidak terkendali dengan mengeluarkan mata uang ORI.

Pengeluaran Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) didasarkan pada undang-undang tanggal 1 Oktober 1946 No.7/1946 dan undang-undang tanggal 25 Oktober 1946 No.19/1946 (II).<sup>19</sup> Sebelum pemberlakuan ORI, pemerintah melakukan persiapan dengan menghimbau pada masyarakat untuk menyimpan sebagian besar uang-uang mereka di dalam bank.<sup>20</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah peredaran uang di masyarakat. Namun, beredarnya ORI bersamaan dengan uang NICA juga menimbulkan kesulitan bagi penduduk terutama daerah perbatasan antara Republik dengan yang diduduki oleh NICA.

Adanya agresi militer Belanda yang pertama, peredaran ORI semakin tersendat. Dalam keadaan darurat ini, penyebaran uang semakin tidak lancar dan dikhawatirkan terjadi kelangkaan persediaan uang. Sehingga pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengeluarkan mata uang sendiri untuk sementara, yang berlaku terbatas hanya di wilayah diberlakukannya uang tersebut. Uang Daerah terkenal dengan Urida (Uang

---

<sup>19</sup> Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*, (Jakarta: LPPI, 1991), hlm. 80.

<sup>20</sup> “Oendang-oendang Tentang Kewadjiban Menjimpan Oeang di Bank”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 09 Oktober 1946, hlm. 1.

Republik Indonesia Daerah)<sup>21</sup>. Pengeluaran Urida berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1947. Urida pertama di Pulau Jawa adalah Uang Kertas Darurat untuk Daerah Banten (Uridab) dengan emisi pertama tertanggal 15 Desember 1947. Urida yang pertama kali di Pulau Sumatra adalah Uang Republik Indonesia Daerah Sumatera atau URIPS dengan emisi pertama tertanggal 11 April 1947.

Adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 merupakan akhir dari persengketaan antara Indonesia dengan Belanda karena Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 dengan konsekuensi negara Republik Indonesia (RI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan seluruh hutang Belanda menjadi hutang Indonesia. Bank sirkulasi RIS adalah *De Javanische Bank* (DJB), selama RIS masih berhutang pada Belanda. Adanya kesepakatan tersebut menjadikan penarikan ORI dan sejenisnya sebagai alat pembayaran yang sah harus ditarik dari peredaran dan menggantikannya dengan uang DJB (uang federal).<sup>22</sup>

Diberlakukannya ORI dan sejenisnya dalam bidang ekonomi adalah sebagai alat pembayaran yang sah dan pembiayaan revolusi guna memperlancar jalannya perekonomian masyarakat Indonesia dan jalannya roda pemerintahan. Selain itu, secara tidak langsung akan mengurangi peredaran uang di masyarakat yang terjadi saat itu, karena terjadi penarikan

---

<sup>21</sup> Pada tahun 1946 sudah banyak daerah yang menggunakan “u” sebagai pengganti “oe”. Lihat Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 57.

<sup>22</sup> M. Dawam Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 54.



mata uang Jepang, terutama ketika masyarakat mendukung dikeluarkan ORI tersebut dapat mempercepat menurunkan inflasi yang terjadi saat itu.

Pemberlakuan ORI berpengaruh pula dalam bidang politik sebagai alat perjuangan bangsa Indonesia, yaitu sebagai alat ukur penyatuan bangsa yang terbentuk dari penggunaan ORI dan sejenisnya oleh masyarakat merupakan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, dengan memberlakukan uang sendiri lebih terlihat bentuk kedaulatan sebagai negara yang merdeka dan lebih meyakinkan rakyat bahwa Indonesia sudah merdeka.

#### **F. Historiografi yang Relevan**

Historiografi adalah sebuah rekonstruksi sejarah melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman peninggalan masa lampau. Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis semua rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>23</sup>

Penyajian sebuah rekonstruksi masa lampau diperlukan sumber sebagai modal utama agar dapat tercipta suatu karya tulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan sebuah karya sejarah, historiografi yang relevan menjamin keaslian suatu karya sejarah, sebagai

---

<sup>23</sup> Louis Gottschalk, "Understanding History: A primer of Historical Method", a.b, Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1975), hlm. 35.

bahan referensi sekaligus perbandingan. Sehingga hal ini merupakan hal pokok diantara tugas-tugas yang lain yang harus dilaksanakan sebelum penulisan sejarah.

Historiografi dapat berupa buku, desertasi, tesis, ataupun skripsi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan berpedoman pada karya-karya yang memenuhi syarat diharapkan suatu karya sejarah dapat bersifat objektif. Meskipun demikian, subjektivitas merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Tujuan dari historiografi yang relevan dalam hal ini adalah suatu proses pengumpulan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh sejarawan untuk membedakan tulisan penulis dengan karya orang lain yang dipakai sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan ini terdapat beberapa historiografi yang relevan antara lain yang pertama adalah skripsi yang berjudul “Peranan Soemitro Djojohadikusumo di Bidang Ekonomi Pada Masa Kemerdekaan-Demokrasi Parlementer (1945-1957)” yang ditulis oleh Galuh Yeni Oktora dari Jurusan Pendidikan Sejarah, tahun 2006, FISE, Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi Galuh ini menjelaskan tentang peranan Soemitro Djojohadikusumo dalam membangun perekonomian Indonesia. Skripsi ini memberikan gambaran tentang perekonomian sekitar pemberlakuan ORI yaitu setelah kemerdekaan namun sebelum demokrasi parlementer.

Kedua, skripsi yang berjudul “Dinamika Bank Sentral Indonesia 1946-1968” yang ditulis oleh Handono Adam Sukhajat dari prodi Ilmu Sejarah, tahun 2009, Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE, Universitas Negeri

Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang dinamika Bank Sentral Indonesia di awal kemerdekaan dan peranan dari Bank Sentral Indonesia dalam mengatur sirkulasi peredaran uang di masyarakat. Keterkaitan Bank Sentral Indonesia di awal kemerdekaan dengan ORI yaitu peranan Bank Negara Indonesia dalam membantu mengedarkan ORI atau menyebarkan ORI ke berbagai wilayah Indonesia.

Persamaan dari skripsi ini dengan kedua skripsi tersebut adalah sama-sama terkait dalam perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan. Sedangkan perbedaan antara kedua skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan atau penekanan dalam penulisan skripsi. Dalam skripsi ini, penulis lebih menekankan pada pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia baik ORI maupun Urida yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan pengaruhnya dalam bidang politik dan ekonomi (1945-1950).

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian berasal dari kata *method* dalam bahasa Inggris yang berarti jalan atau cara. Secara Etimologi, metode adalah masalah yang menguraikan tentang cara-cara atau jalan, petunjuk pelaksanaan secara teknis.<sup>24</sup> Kemudian, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa

---

<sup>24</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 635.

secara kritis rekaman-rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>25</sup> Dalam kedudukannya sebagai ilmu, sejarah terikat pada prosedur penelitian ilmiah.<sup>26</sup>

Sejarah juga terikat pada penalaran yang bersandar pada fakta (kebenaran sejarah) yang terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan dapat mengungkap sejarah secara obyektif. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis dengan tahapan-tahapan penulisan sesuai yang dikemukakan Louis Gottschalk<sup>27</sup> sebagai berikut:

### 1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani “*heuriskein*” yang berarti mencari atau menemukan dan mengumpulkan jejak masa lampau yang dipakai sebagai data sejarah. Dengan kata lain, heuristik mempunyai pengertian pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah. Sumber yang digunakan dapat berupa buku-buku, dokumen dimana buku tersebut ditulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini penulis melakukan pencarian sumber sebanyak-banyaknya berkaitan dengan permasalahan. Heuristik dapat diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.

---

<sup>25</sup> Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 32.

<sup>26</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 60.

<sup>27</sup> Dalam bukunya “Understanding History: A primer of Historical Method”, yang dialih bahasa oleh Nugroho Notosusanto dengan judul “*Mengerti Sejarah*”.

Sumber primer sebagai kesaksian seseorang dengan mata kepala sendiri atau menggunakan alat mekanik.<sup>28</sup> Sumber primer yang digunakan penulis berupa Arsip dan Surat Kabar, adapun beberapa sumber arsip antara lain:

- a. Arsip Surat Kementerian Keoeangan Jogjakarta No. R.1-1-2/ Rahasia terkait dengan kertas percetakan ORI.
- b. Arsip Kementerian Penerangan: Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1948 tentang perantaraan bank-bank pemerintah dalam peredaran uang.
- c. Arsip Kementerian Penerangan: Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1948 tentang kedjahatan-kedjahatan dalam keadaan bahaja jang dapat dihukum dengan hukuman mati, salah satu isinya terkain dengan hendak menguntungkan diri sendiri.
- d. Arsip Kementerian Dalam Negeri terkait dengan peminjaman uang kepada Bank Rakjat di Jogja.
- e. Surat Pengumuman Menteri Negara RI Koordinator Keamanan No.1/11 tahun 1949 tentang uang RI (URI) tetap sebagai alat pembayaran yang sah, Juli 1949.
- f. Arsip Kementerian Penerangan: Oendang-oendang No 19 th. '46 tentang pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia dan Penjelasannya.
- g. Arsip Jawatan Kepolisian Negara No.1382/Pam dan No.29/ Pam tentang tabel ORI yang resmi dari seratus rupiah hidjau.

---

<sup>28</sup> Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 37.

- h. Arsip Jawatan Kepolisian Negara No. 358/T.0/33/2/R/E terkait pembawaan ORI baru dari daerah pendudukan.
- i. Arsip Jawatan Kepolisian Negara tentang pedoman pekerdjaan sub bagian ekonomie terkait dengan pengawasan peredaran uang.
- j. Arsip Syafruddin Prawiranegara No. 1 tentang Majalah Sikap: Dua tahun uang Republik Indonesia.
- k. Arsip Kementerian Dalam Negeri tentang Koetipan Pemberitahuan.

Adapun sumber primer dalam bentuk Surat Kabar, antara lain:

- a. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 03 Mei 1946.
- b. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 17 September 1946.
- c. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 01 Oktober 1946.
- d. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 02 Oktober 1946.
- e. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 04 Oktober 1946.
- f. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 09 Oktober 1946.
- g. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 10 Oktober 1946.
- h. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 26 Oktober 1946.
- i. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 28 Oktober 1946.
- j. Surat Kabar “Merdeka”, 27 Juli 1946, dan sebagainya.

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Sumber sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku pendukung tema skripsi ini. Adapun buku-buku yang penulis gunakan selama menyusun skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Buku yang berjudul “Oeang Repoeblik dalam Kancan Revolusi” karya Mohammad Iskandar. Diterbitkan oleh Yayasan Masyarakat Indonesia pada tahun 2004.
- b. Buku yang berjudul “Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)” karya Oey Beng To. Diterbitkan oleh LPPI pada tahun 1991.
- c. Buku yang berjudul “Persoalan Ekonomi di Indonesia” karya Sumitro Djojohadikusumo. Diterbitkan oleh Indira pada tahun 1953.
- d. Buku yang berjudul “Kenang-Kenangan dari Tiga Zaman” karya R.M Margono Djojohadikusumo. Diterbitkan oleh Indira, tanpa tahun terbit.

Kajian pustaka yang penulis gunakan didapatkan dari beberapa tempat sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY.
- b. Perpustakaan FIS UNY.
- c. Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- d. Perpustakaan Daerah Yogyakarta.
- e. Arsip daerah Yogyakarta.
- f. Perpustakaan Kolese ST. Ignatius.
- g. *Jogja Library Center*.
- h. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- i. Perpustakaan Nasional.
- j. Museum Bank Indonesia.

## **2. Kritik Sumber (Verifikasi)**

Kritik sumber adalah upaya menyelidiki apakah jejak-jejak yang ditemukan, setelah heuristik “benar” adanya, betul-betul dapat dijadikan bahan penulisan. Kritik sumber dilakukan untuk menentukan validitas (keaslian sumber) dan kredibilitas sumber-sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan sehingga terhindar dari kepalsuan. Sumber yang telah diperoleh tadi dikritik secara ekstern (otentisitas) dan intern (kredibilitas).

Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui keaslian sumber yang meliputi penelitian terhadap bentuk sumber, tanggal, waktu pembuatan, serta siapa pembuat atau pengarangnya. Sedangkan kritik intern bertujuan untuk melihat dan meneliti kebenaran isi sumber atau dokumen sejarah yang meliputi kebenaran isi sumber atau dokumen sejarah yang meliputi kritik terhadap isi, bahasa yang digunakan, situasi pada saat penulisan, gaya maupun ide.

Kritik ekstern digunakan penulis melihat kertas, tanggal, waktu pembuatan dan nama pengarang. Kemudian untuk meneliti isi sumber dengan cara meneliti tulisan atau ejaan, bahasa, dan gaya penulisan yang digunakan pembuat atau pengarangnya pada sumber-sumber yang ditemukan, penulis melalui kritik intern. Setelah memperoleh sumber-sumber sejarah dan dilakukan kritik ekstern dan intern, maka akan terlihat atau terdapat fakta sejarah. Dengan menggunakan kedua kritik tersebut, penulis mendapatkan fakta-fakta sejarah. Sehingga kritik sumber dapat dikatakan sangat penting dalam penelitian sejarah.



### 3. Analisis Sumber (Interpretasi)

Interpretasi adalah menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya, kemudian menganalisa sumber-sumber yang pada akhirnya menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Dalam tahap ini penulis berusaha mencermati dan mengungkapkan data-data yang diperoleh. Berbagai fakta yang lepas satu sama lain dirangkum dan dihubungkan serta menjadi kesatuan yang harmonis serta masuk akal. Peristiwa yang satu dimasukkan ke dalam keseluruhan konteks peristiwa-peristiwa lain yang melingkupinya.<sup>29</sup>

Analisis sumber (interpretasi) dilakukan dengan membandingkan buku yang satu dengan buku yang lain atau mencari persamaan dari sumber-sumber yang telah dikritik. Sehingga tidak semua fakta yang relevan dimasukkan dan melakukan penyesuaian terhadap fakta yang relevan, tetap bersikap obyektif. Hal ini penting karena seorang sejarawan bebas menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga terkadang menimbulkan perbedaan penafsiran antara sejarawan yang satu dengan yang lain. Penulis melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh sehingga hasil akhirnya dapat disajikan menjadi suatu karya sejarah tentang ORI yang diharapkan dapat bersifat obyektif.

---

<sup>29</sup> Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma dalam Pemikiran dan penulisan Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1988), hlm. 17.

#### 4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan. Penulisan yang dilakukan peneliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sehingga pada tahap ini penulis sejarah memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk menjaga standar mutu citera sejarah. Kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau dapat dilakukan dengan heuristik literatur, yang tidak berbeda hakikatnya dengan kegiatan bibliografis yang lain, sejauh menyangkut buku-buku tercetak.<sup>30</sup>

Skripsi yang berjudul “Pemberlakuan “Oeang Repoeblik Indonesia” dan Pengaruhnya Dalam Bidang Politik dan Ekonomi (1945-1950)” akan menyajikan tentang keadaan Indonesia sekitar pemberlakuan ORI baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Lalu dilanjutkan dengan penulisan proses pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) yang merupakan mata uang pertama Indonesia setelah merdeka. Kemudian menganalisis pengaruh ORI tersebut dalam bidang politik dan ekonomi.

#### H. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menjelaskan keadaan Indonesia sekitar pemberlakuan ORI, proses pemberlakuan ORI, dan pengaruh ORI dalam bidang politik dan ekonomi. Keadaan Indonesia sekitar pemberlakuan ORI dalam konteks

---

<sup>30</sup> Luois Gottschalk, *op cit.*, hlm. 35.

ekonomi dan politik memerlukan teori dan metodologi. Dengan teori dan metodologi dilakukan analisis tentang faktor-faktor kausal (sebab-akibat), kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dari sejarah yang dikaji. Permasalahan inti dalam teori dan metodologi yang digunakan dalam penelitian sejarah adalah pendekatan. Pendekatan adalah dari segi mana penulis memandang suatu permasalahan. Pendekatan yang digunakan memberi bantuan dalam menganalisis suatu kejadian.

Penulisan skripsi ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan politik, pendekatan ekonomi dan sosiologis. Menurut Sartono Kartodirdjo, pendekatan politik adalah pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Pendekatan politik digunakan penulis untuk memahami keadaan politik Indonesia, baik mengenai pertentangan kekuasaan antara pihak Indonesia dengan Indonesia sendiri, maupun pihak Indonesia dengan Belanda.

Pendekatan ekonomi merupakan penjabaran dari konsep-konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial dan stratifikasinya dapat mengungkapkan peristiwa atau fakta dalam kehidupan ekonomi. Pendekatan ekonomi memiliki kaitan antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pemegang kedudukan yang menjalankan roda perekonomian. Pendekatan ekonomi ini penting untuk

---

<sup>31</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 4.

memperkuat dan mendukung analisa penulis tentang pengaruh ORI dalam bidang politik dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan sosiologis melihat segi-segi sosial peristiwa yang dibahas, seperti konflik antar golongan berdasarkan kepentingan ideologis dan lainnya.<sup>32</sup> Pendekatan sosiologis memberi gambaran tentang keadaan masyarakat dari segi mata pencaharian, pendidikan, kepercayaan dan sebagainya. Pendekatan sosiologis digunakan penulis untuk melihat pengaruh sosial akibat diberlakukannya ORI tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika skripsi ini guna memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran secara ringkas. Sistematika pembahasan ini dituangkan dalam lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penulisan, pendekatan penulisan, serta sistematika pembahasan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

## BAB II KEADAAN INDONESIA SEKITAR PEMBERLAKUAN ORI

Bab ini membahas mengenai keadaan ekonomi yang meliputi *hiperinflasi*, blokade laut yang dilakukan Belanda, dan kekosongan kas negara. Kemudian dilanjutkan dengan membahas kejadian-kejadian politik meliputi konflik intern, agresi militer Belanda I dan II, Ibukota RI di Yogyakarta. Selain itu, juga membahas secara singkat tentang Konferensi Meja Bundar (KMB). Keadaan sekitar ORI ini sebagian merupakan pendorong pemberlakuan ORI dan sebagian yang mengiringi berjalannya atau pemberlakuan ORI tersebut.

## BAB III PEMBERLAKUAN ORI

Bab III ini membahas mengenai pengusulan pengeluaran ORI, persiapan percetakan ORI, pengeluaran ORI, penyebaran ORI ke berbagai wilayah Indonesia, pengeluaran Urida setelah terjadinya agresi militer Belanda dan penarikan ORI dan Urida dari peredaran setelah terjadinya kesepakatan dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).

## BAB IV PENGARUH ORI DALAM BIDANG POLITIK DAN EKONOMI

Bab IV ini membahas mengenai pengaruh ORI dalam bidang politik dan ekonomi Indonesia (1945-1950), sehingga dapat dikatakan ORI sebagai lambang utama negara merdeka, alat perjuangan, alat pembayaran, alat pembiayaan revolusi dan dampak ORI dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

## BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam bab pertama. Jawaban dikemukakan secara singkat, padat, dan jelas.

## BAB II KEADAAN INDONESIA PADA SAAT PEMBERLAKUAN ORI

### A. Keadaan Ekonomi Indonesia

#### 1. *Hiperinflasi (Inflasi Sangat Tinggi)*

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum yang disebabkan karena peningkatan permintaan akan barang dan jasa. Sedangkan untuk penawaran jumlah barang dan jasa yang termaksud tidak meningkat secara seimbang.<sup>1</sup> Begitu juga ketika Jepang masuk ke wilayah Hindia Belanda<sup>2</sup> tidak hanya melakukan invasi secara militer tetapi juga melakukan invasi secara ekonomi dengan memberlakukan uang Jepang (*money invasion*)<sup>3</sup> ke wilayah Indonesia, uang Jepang tersebut tanpa tahun dan tanpa tanda tangan<sup>4</sup>.

Uang Jepang yang beredar di wilayah Indonesia pada awalnya berupa tujuh pecahan yaitu: 1 sen, 5 sen, 10 sen, ½ gulden, 1 gulden, 5 gulden, dan 10 gulden. Meskipun pendudukan Jepang mengedarkan uang sendiri, uang-uang pemerintahan Hindia Belanda lainnya masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pada tahun 1944, Jepang

---

<sup>1</sup> Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*, (Jakarta: LPPI, 1991), hlm. 44.

<sup>2</sup> Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua (PD II) lebih dikenal sebagai Hindia Belanda.

<sup>3</sup> *Money Invasion* merupakan uang invasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Bentuk uang Jepang, lihat lampiran 16, hlm. 130.

<sup>4</sup> Tim Penulis LP3ES, *Bank Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 49.

mencetak dan mengedarkan lagi uang Jepang berupa 50 sen hingga 100 rupiah. Khusus untuk daerah Sumatra, uang 100 rupiah dicetak tersendiri di Jepang.<sup>5</sup>

Kekalahan Jepang terhadap Sekutu pada pertengahan Agustus 1945 meninggalkan berbagai kekacauan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pemerintah RI yang baru merdeka ini mempunyai tanggungan yang sangat berat. Pemerintah RI harus membiayai pengeluaran yang sangat besar dan memperbaiki perekonomian buruk serta *inflasi* yang sangat tinggi (*hiperinflasi*). Sumber *inflasi* adalah peredaran mata uang Jepang di Indonesia yang tidak terkendali tanpa diimbangi penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan. Perkiraan uang Jepang yang beredar di masyarakat sekitar 4 milyar dan peredaran uang di Jawa saja diperkirakan sekitar 1,6 milyar.<sup>6</sup>

Jumlah uang dalam peredaran di masyarakat semakin bertambah ketika pasukan Sekutu (Inggris) membonceng pasukan NICA (*Nederlandsche Indische Civiele Administratie*) atau orang-orang Belanda datang ke Indonesia. Belanda berusaha mencoba menegakkan kembali pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pada saat itu, NICA dan sekutu berhasil menduduki kota-kota besar di Indonesia dan mendapatkan persediaan uang Jepang yang tersimpan di bank-bank dalam jumlah yang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>6</sup> Mohammad Iskandar, "Oeang Repoeblik dalam Kancan Revolusi", *Jurnal Sejarah* Vol.6 No. 1, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia, 2004), hlm. 43.



besar. Uang yang dikuasai NICA tersebut dipakai sebagai alat untuk menekan Indonesia dan mengacaukan situasi moneter di daerah-daerah yang dikuasai Republik Indonesia (RI), dengan cara menyebarkan uang Jepang tersebut dalam peredaran yang diperkirakan masih 2,5 milyar yang kemudian oleh NICA diedarkan untuk pembiayaan operasi militer dan membiayai para pegawai yang direkrut dari kalangan pribumi dengan gaji yang cukup besar bila dibandingkan dengan gaji rata-rata pegawai atau buruh yang berada di bawah koordinasi Sekutu. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mendapatkan simpati dari masyarakat agar lebih simpati terhadap Belanda.<sup>7</sup>

Tindakan NICA dengan menghambur-hamburkan uang Jepang menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini merupakan salah satu tindakan Belanda untuk mengacaukan perekonomian RI dan usaha untuk menguasai kembali Indonesia dengan mengacaukan perekonomian RI. Selain itu, perbendaharaan pemerintah RI yang baru didirikan hanya mempunyai persediaan uang dengan jumlah yang terbatas untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Peredaran mata uang Jepang di masyarakat yang sangat banyak membuat masyarakat menderita kerugian yang sangat besar. Kelompok masyarakat yang paling menderita adalah petani, karena pada zaman pendudukan Jepang mereka adalah satu-satunya penghasil (produsen) dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

karena itu mereka yang paling banyak memiliki dan menyimpan uang Jepang.<sup>8</sup> Selain itu, pemerintah RI belum dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang disebabkan negara RI sendiri belum memiliki sarana, sumber daya untuk menangani permasalahan keuangan tersebut dan belum adanya mata uang baru sebagai pengganti mata uang Jepang.

Sekiranya terdapat mata uang baru untuk menggantikan uang Jepang saat itu, maka usaha penarikan mata uang lama dan pengeluaran mata uang baru masih belum bisa dilakukan karena terdapat kesepakatan tidak akan mengeluarkan mata uang baru sebelum terciptanya stabilitas ekonomi dan apabila terdapat uang baru maka itu tidak dibenarkan. Sehingga untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI sebagaimana diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu uang kertas yang diterbitkan oleh *De Javasche Bank* antara tahun 1925-1941, uang yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda antara tahun 1940-1941 serta uang Jepang di Jawa. Selain uang kertas, uang logam yang berlaku adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1942, terdiri dari uang emas, perak, nikel, dan uang tembaga<sup>9</sup>.

Keterpurukan perekonomian bangsa Indonesia berlanjut ketika pada tanggal 6 Maret 1946, Letnan Jenderal Sir Montagu Stompfort

---

<sup>8</sup> Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*, (Jakarta: DEPDIBUD, 1975), hlm. 216.

<sup>9</sup> Tim Penulis LP3ES, *op.cit.*, hlm. 50.

(panglima AFNEI yang baru) mengumumkan berlakunya uang NICA<sup>10</sup> pada tempat-tempat yang diduduki oleh Sekutu. Uang tersebut dikenal dengan nama uang NICA atau uang merah. Uang NICA terdiri dalam 9 pecahan, mulai dari 50 sen hingga 100 gulden<sup>11</sup>. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Kurs ditentukan 3% yaitu setiap 1 uang Jepang berbanding dengan 3 sen uang NICA.<sup>12</sup>

Pencetakan dan pengedaran mata uang NICA ini sebenarnya merupakan pelanggaran dari undang-undang *De Javasche Bankwet* 1922 yang memberi hak monopoli kepada *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi yang memiliki wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang di wilayah Hindia-Belanda. Sedangkan uang NICA dicetak bulan Desember 1942 di Amerika Serikat oleh *American Banknote Company* atas pesanan pemerintah kerajaan Belanda. Selain itu, terdapat persetujuan tidak akan ada mata uang baru sebelum ada penyelesaian situasi politik mengenai status Indonesia.<sup>13</sup>

Akhirnya pemerintah RI menyatakan tidak berlakunya uang NICA dan tidak pernah diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah RI. Pemerintah tetap berusaha untuk menanggulangi permasalahan mata uang

---

<sup>10</sup> Gambar uang NICA terlihat di lampiran 16, hlm. 130.

<sup>11</sup> Kata “gulden” dalam penulisan ini merupakan mata uang baru Belanda atau NICA.

<sup>12</sup> Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 217.

<sup>13</sup> M Dawan Rahardjo, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: LP3ES, 1955), hlm. 49.

ini. Setahun sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 30 Oktober 1946, pemerintah RI baru dapat memberlakukan uang kertas baru yang dikenal dengan nama ORI. Dalam memperlancar menjalankan roda pemerintahan, maka pemerintah juga melakukan pinjaman uang kepada Bank Rakyat di Yogyakarta setengah juta rupiah yang dimaksudkan sekedar buat pen jagaan kalau sewaktu-waktu pemerintah RI memerlukan uang dan kebetulan tidak ada persediaan uang kontan.<sup>14</sup>

## 2. Blokade Ekonomi Belanda

Penyerahan Jepang terhadap Sekutu dan proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sumber daya alam yang dimiliki. Pada awal kemerdekaan, wilayah RI memiliki banyak sumber daya alam pertanian yang sangat dibutuhkan berbagai negara di dunia, terutama setelah Perang Dunia II (PD II) berakhir. Harga barang-barang ditaksir sangat tinggi yang sebenarnya dapat membantu memperbaiki perekonomian RI yang baru merdeka saat itu. Namun, barang-barang tersebut tidak dapat diekspor ke negara lain disebabkan adanya blokade laut yang dilakukan oleh Belanda.

Blokade laut tersebut menutup pintu keluar masuk perdagangan RI oleh Angkatan Laut Belanda.<sup>15</sup> Adapun jumlah barang-barang yang dapat

---

<sup>14</sup> Arsip Kementerian Dalam Negeri 1945-1949, *Peminjaman Uang*, 25 Juni 1948. Lihat daftar lampiran 8, hlm. 116.

<sup>15</sup> Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 215.

diekspor keluar negeri ketika terjadinya blokade tersebut jumlahnya sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah barang ekspor yang ada, sedangkan jalan yang ditempuh untuk dapat mengekspor barang keluar negeri sangat sulit karena berbagai dalih Belanda. Hal ini disebabkan blokade laut dilakukan dengan keras oleh pihak Belanda terhadap RI. Blokade Belanda telah dimulai pada bulan November 1945 dan kemudian dengan resmi dicantumkan dalam sebuah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Letnan-Gubernur-Jenderal Belanda pada tanggal 29 Januari 1947. Berkenaan dengan surat keputusan tersebut pihak Belanda menamakannya sebagai peraturan perdagangan Belanda, tetapi bagi setiap peneliti yang tidak berat sebelah akan lebih cenderung menamakannya sebagai sebuah blokade.<sup>16</sup>

Terdapat tiga alasan atau dalih yang digunakan pemerintah Belanda untuk mengenakan peraturan-peraturan blokade antara lain, yaitu:

- a. Mencegah dimasukkannya senjata-senjata dan alat-alat militer lainnya ke wilayah Indonesia.
- b. Mencegah dikeluarkannya barang-barang yang dikatakannya kepunyaan perkebunan-perkebunan asing.
- c. Melindungi bangsa Indonesia daripada diperintah kembali oleh bukan bangsa Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *Persoalan Ekonomi di Indonesia*, (Djakarta: Indira, 1953), hlm. 12.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 13.

Alasan Belanda tersebut sebenarnya dapat dikatakan tidak masuk akal. Berkenaan dengan alasan pertama, barang yang dianggap militer atau separuh militer hanya Belanda yang menetapkannya. Kedua, mengenai ekspor barang-barang, dalam hal ini tidak terdapat ketegasan antara barang yang ditanam oleh perkebunan-perkebunan maupun barang yang ditanam oleh rakyat. Kemudian untuk alasan yang ketiga dimaksudkan untuk membatasi perdagangan di daerah-daerah RI dan di luar negeri.

Akibat dari blokade ini, pemerintah RI tidak dapat mengekspor barang-barang ke luar negeri, sehingga sebagian barang-barang yang biasanya dapat diekspor dibumihanguskan. Selain itu, Indonesia menjadi kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan guna memperbaiki perekonomian Indonesia seperti tekstil dan obat-obatan. Padahal pada awal kemerdekaan, pemerintah semata-mata hanya bergantung pada produksi petani. Produksi petani merupakan dasar pokok dari kehidupan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah RI berhasil bertahan sekalipun dalam keadaan ekonomi yang sangat buruk.<sup>18</sup>

Adanya produksi petani membantu pemerintah RI untuk berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi blokade laut yang dilakukan oleh Belanda. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk penembusan blokade yaitu dengan melakukan sesuatu yang menarik perhatian luar negeri terhadap Indonesia guna melepaskan diri dari isolasi ekonomi dengan negara lain, seperti diplomasi beras kepada India yang sedang ditimpa

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 23.

bahaya kelaparan dengan menjanjikan 500.000 ton beras. Sebagai imbalannya pemerintah RI akan menerima ganti bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Secara politis, diplomasi beras ini sangat berpengaruh, terbukti India yang paling aktif membantu perjuangan diplomasi Indonesia-Belanda di forum internasional.<sup>19</sup>

Usaha lainnya dari pemerintah adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri serta menjamin modal asing (investasi) yang berada di Indonesia.<sup>20</sup> Usaha ini dirintis oleh BTC (*Banking and Trading Corporation*) yang merupakan suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. BTC ini berhasil mengadakan hubungan dagang langsung dengan perusahaan swasta Amerika Serikat (*Insbranton Inc*). Pada awal kemerdekaan, pemerintah RI belum sempat melakukan tindakan-tindakan yang terkonsep untuk memecahkan masalah-masalah yang mendesak. Sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa blokade ini tidak lain bertujuan untuk menekan perekonomian RI dalam bidang ekonomi.

---

<sup>19</sup> Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 219.

<sup>20</sup> Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, (Jakarta: PT Asdi Mahasastya, 2004), hlm. 113.

### 3. Kekosongan Kas Negara

Sejak kemerdekaan diproklamasikan RI pada bulan Agustus 1945, pemerintah RI mempunyai tugas untuk mengkonsolidasi dan menyempurnakan alat-alat penghubung dalam pemerintahan yang hampir tidak terpikul karena sangat berat dan besarnya.<sup>21</sup> Hal ini disebabkan turunnya produksi masyarakat secara hebat, yang disebabkan oleh hancurnya sebagian besar peralatan produksi. Hancurnya sebagian besar peralatan produksi ini kemudian mengakibatkan produksi barang-barang ekspor selama beberapa tahun tidak dapat melebihi tingginya ekspor sebelum terjadinya perang.

Selain turunnya hasil produksi, kekosongan kas negara juga disebabkan semakin berkurangnya (defisit) neraca perdagangan yang besar selama beberapa tahun, defisit anggaran belanja pemerintah RI, dan terjadinya pengeluaran secara besar-besaran di bidang militer untuk mempertahankan kemerdekaan RI.<sup>22</sup> Begitu juga dengan keadaan moneter Indonesia yang sangat buruk sekali karena peningkatan peredaran uang di masyarakat cukup tinggi dengan jumlah yang sangat besar yang akhirnya menimbulkan *hiperinflasi*.

Uang yang masuk untuk menjalankan roda pemerintahan justru sebaliknya yakni sangat kecil. Perbendaharaan pemerintah RI yang baru berdiri hanya mempunyai pemasukan uang yang sangat minim atau uang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>22</sup> Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 2.



yang ada jauh dari mencukupi dalam menjalankan roda pemerintahan seperti suatu negara yang telah stabil. Pemasukan pemerintah berasal dari pajak-pajak dan bea masuk lainnya.<sup>23</sup> Dengan kata lain perbendaharaan pemerintah pada waktu itu hampir kosong, sedangkan pengeluaran pemerintah begitu sangat besar terutama untuk membiayai perang melawan Belanda.

## **B. Kejadian-kejadian Politik Awal Pemerintahan RI**

### **1. Konflik Intern**

Proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak terdapat perjuangan fisik dan militer disamping usaha-usaha politik (diplomasi) untuk memperoleh pengakuan resmi kemerdekaan Indonesia, baik pengakuan dari pihak Belanda maupun dunia internasional. Bangsa Indonesia tetap gigih mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Kegigihan para pejuang memperlihatkan tekad bulat untuk membela tanah air Indonesia, terutama dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, terdapat pula ketegangan dan permusuhan di antara sesama pejuang Indonesia. Sehingga terkadang menimbulkan pertentangan di antara kekuatan-kekuatan politik yang sangat memprihatinkan.

Pertentangan timbul karena terdapat selisih pendapat dan perbedaan sikap tampak berkaitan dengan berbagai masalah politik yang

---

<sup>23</sup> Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 215.

ada, salah satunya mengenai tindakan yang diambil untuk menghadapi Belanda. Ketegangan dan permusuhan yang berlangsung menghambat kelancaran jalannya roda pemerintahan RI. Hal ini berawal ketika pemerintah RI mengeluarkan maklumat pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik (multi partai) yang bertujuan menghindari terjadinya kediktatoran dan sebagai tempat penyaluran aliran paham masyarakat. Pembentukan suatu partai dengan syarat bahwa partai-partai harus turut serta memperkuat perjuangan RI dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat.<sup>24</sup>

Maklumat tersebut merupakan tanggapan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) kepada pemerintah. Pengeluaran maklumat tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesan di luar negeri tentang pemerintah RI merupakan ciptaan Jepang, adanya kesadaran yang semakin luas di kalangan masyarakat tentang fungsi partai untuk menyalurkan ide yang sehaluan. Selain itu, untuk memperlihatkan bahwa RI lahir dari keinginan rakyat sendiri dan bercorak demokrasi. Sehingga sentimen-sentimen masyarakat yang lebih demokratis ini dapat muncul sebagai kekuatan.<sup>25</sup>

Terbentuknya suatu partai merupakan suatu pengelompokan politik dalam masyarakat menurut aliran-aliran yang pada perkembangannya

---

<sup>24</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 77.

<sup>25</sup> Onghokham, "Revolusi Indonesia: Mitos dan Realita", *Prisma* No.8 tahun XIV, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 8.

menimbulkan persaingan antar partai sendiri. Persaingan ini menimbulkan perebutan kekuasaan yang membawa keretakan dalam menghadapi musuh khususnya (Belanda) dan perpecahan dalam masyarakat pada umumnya.<sup>26</sup> Hal ini disebabkan munculnya partai-partai menimbulkan sikap loyalitas dan antagonisme yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Selama masa perjuangan untuk memperoleh kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka terdapat berbagai kendala dan rintangan di dalamnya. Salah satu peristiwa yang sangat menyedihkan dengan banyaknya korban di dalamnya karena adanya perebutan kekuasaan (*coup*) antara pemerintah RI dengan PKI di bawah pimpinan Muso<sup>27</sup> yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948.<sup>28</sup>

Perebutan kekuasaan antara pemerintah RI dan PKI menimbulkan penganiayaan dan pembunuhan yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam menghadapi peristiwa tersebut, pemerintah RI melakukan serangan dengan mengerahkan T.N.I dari Divisi Siliwangi dan Divisi Jawa Timur di bawah pimpinan Kolonel Sungkono. Pasukan PKI juga melakukan serangan dengan perang gerilya yang menelan banyak korban di antara rakyat di

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>27</sup> Muso merupakan pemimpin dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengadakan pembaharuan struktur organisasi politburo PKI dan berhasil mengumpulkan massa. Selanjutnya, berusaha menggulingkan pemerintahan RI dan berusaha mengganti RI dengan pemerintahan komunis. Lihat Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 57.

<sup>28</sup> Kansil, C.S.T dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1972), hlm. 56.

Magetan dan Ponorogo. Penumpasan PKI di Madiun berakhir setelah Muso tertembak mati pada peristiwa tersebut.<sup>29</sup> Meskipun demikian, perang saudara ini melemahkan kedudukan Indonesia dan menjadi keadaan yang sangat menguntungkan pihak Belanda.<sup>30</sup>

## 2. Agresi Militer Belanda I dan II

Agresi militer I terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, pihak Belanda menyebut agresi militer I dengan “*politieele actie*”, yang artinya Belanda datang ke wilayah RI bertugas untuk mengatur ketertiban dan keamanan seperti “tindakan kepolisian” karena Belanda masih merasa bahwa Indonesia masih menjadi miliknya. Hal ini diikuti dengan serangan-serangan (agresi) tentara Belanda ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia baik di Jawa maupun di Sumatra dengan mengerahkan Angkatan Darat, Laut dan Udaranya. Bangsa Indonesia menamakannya Agresi militer Belanda I dengan perang kemerdekaan I, karena pihak Belanda dianggap sebagai pihak penyerang (agresor) untuk menggagalkan atau tidak mengakui proklamasi kemerdekaan RI.<sup>31</sup> Tujuan agresi tidak lain adalah untuk mematahkan perlawanan RI dan menguasai Indonesia kembali di bawah kekuasaan Belanda.

---

<sup>29</sup> Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 7.

<sup>30</sup> Kansil, C.S.T dan Julianto, *op.cit.*, hlm. 57.

<sup>31</sup> Sudiyo, *op.cit.*, hlm. 120.

Agresi militer ini banyak memakan korban jiwa dan harta benda rakyat. Selain itu, berakibat jatuhnya sebagian daerah Republik (kota-kota) ke tangan Belanda. Dalam menghadapi agresi militer tersebut, bangsa Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaan RI dengan melancarkan perang gerilya dan terus menerus menggempur kota-kota yang diduduki Belanda tersebut.<sup>32</sup> Agresi militer Belanda ini menimbulkan kecaman dari dunia, seperti negara India dan Australia. Kedua pemerintahan tersebut mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia-Belanda segera dimasukkan dalam daftar pembicaraan Dewan Keamanan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Permintaan tersebut diterima pada tanggal 31 Juli 1947.<sup>33</sup>

Dewan Keamanan PBB kemudian memerintahkan untuk menghentikan permusuhan kedua belah pihak dengan melakukan pengawasan gencatan senjata. Selain itu, Dewan keamanan PBB membentuk KTN (Komisi Tiga Negara) yang bertugas sebagai perantara dalam menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. KTN terdiri dari Australia (pilihan Indonesia), Belgia (pilihan Belanda), dan Amerika Serikat (pilihan Australia dan Belgia). KTN mulai meminta perundingan yang merupakan perundingan ketiga di atas kapal “Renville” (kapal Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Tanjung Priok) diterima dan ditandatangani oleh kedua delegasi pada tanggal 17 Januari 1948.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Kansil C.S.T dan Juionto, *op.cit*, hlm. 54.

<sup>33</sup> Nugroho Notosusanto, *op.cit*, hlm. 49.

<sup>34</sup> Kansil, C.S.T dan Julianto, *op.cit.*, hlm. 55.

Namun, perjalanan perundingan Renville juga tidak dapat berjalan lama karena pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer II.

Agresi Militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 dengan menyerbu Yogyakarta yang pada waktu itu menjadi Ibukota negara RI dan berhasil diduduki Belanda. Pada saat agresi militer tersebut, Presiden, Wakil Presiden, beberapa orang Menteri serta pejabat-pejabat tinggi ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Bangka, Sumatra Utara.<sup>35</sup> Agresi Militer II terjadi ketika keadaan negara RI belum siap. Hal ini disebabkan baru mengadakan konsolidasi ke dalam wilayah RI sendiri, sehingga pemerintah RI belum mengadakan perlawanan terhadap serangan Belanda yang kemudian oleh pihak Belanda mengatakan bahwa RI telah kalah dan sudah tidak berdaya lagi.

Pemerintah dalam menanggapi pernyataan tersebut dengan melakukan perang gerilya. Sehingga pernyataan Belanda tentang ketidakberdayaan pemerintah Indonesia tidak benar. Selain itu, setelah Ibukota Yogyakarta diduduki oleh Belanda, perlawanan dari gerilyawan cukup besar untuk mengacaukan tentara Belanda. Serangan dilakukan setiap malam secara mendadak. Taktik yang digunakan dalam perang gerilya adalah menghilang jika diserang, muncul dan menyerang jika musuh diam.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>36</sup> Slamet Muljana, *op.cit.*, hlm. 215.

Satu kali tentara gerilya berhasil mengadakan serangan umum secara besar-besaran yang mengejutkan pihak Belanda dan berhasil menguasai kembali ibukota RI selama 6 jam. Peristiwa ini terkenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogya. Meskipun demikian, dampak yang dihasilkan dari keberhasilan menguasai ibukota RI sangat besar dan menyita perhatian dari luar negeri. Sehingga RI mendapat dukungan dari berbagai negara untuk menekan Belanda agar mengakui kedaulatan RI.<sup>37</sup>

### 3. Ibukota RI di Yogyakarta

Kekalahan Jepang pada bulan Agustus 1945 pada Sekutu secara tidak langsung membuat daerah yang dahulu menjadi pendudukan Jepang, termasuk Indonesia menjadi berada di bawah pengawasan pihak Sekutu. Pasukan Sekutu diwakili Inggris mendarat di Indonesia berboncengan dengan NICA (*Nederlandsche Indische Civiele Administratie*) pada bulan September 1945. Hal ini terlihat jelas keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia yang tidak jarang menimbulkan bentrokan bersenjata antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR)<sup>38</sup> dengan pasukan NICA. Bentrokan tersebut menunjukkan tanggung jawab untuk mempertahankan

---

<sup>37</sup> Sudiyo, *op.cit.*, hlm. 123.

<sup>38</sup> TKR merupakan suatu tentara kebangsaan yang di bawah pemerintah pusat dan diharapkan menjadi penopang pemerintah dengan segala kebijakannya. Lihat G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 I*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 120.

kemerdekaan Indonesia pada umumnya yang telah diproklamasikan.<sup>39</sup> Meskipun hasil dari pertempuran kalah dalam bidang militer (fisik), tetapi bangsa Indonesia menang di bidang moral (semangat). Rakyat Indonesia tidak mempedulikan abu pertempuran, tetapi mendapatkan api semangat yang sangat berkobar. Sementara itu, Indonesia mulai mendapat simpati dari luar negeri dan inilah kemenangan yang tidak terlihat.<sup>40</sup>

Kepindahan ibukota negara RI dari Jakarta ke Yogyakarta tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 dipandang perlu. Kepindahan ini dilaksanakan karena banyak gedung umum di Jakarta digunakan oleh tentara Sekutu dan pemerintah RI tidak dapat melaksanakan tindakan secara leluasa.<sup>41</sup> Selain itu, semakin meningkatnya kekacauan dan teror yang terjadi di Jakarta waktu itu, yang dilakukan oleh militer Belanda tanpa dihalangi oleh pihak Sekutu. Kepindahan ibukota negara tersebut dapat diartikan suatu bentuk protes dingin RI terhadap Sekutu.<sup>42</sup>

Yogyakarta dalam waktu singkat dibanjiri pegawai-pegawai instansi yang ikut pindah ke kota itu. Pemerintah RI juga mulai kembali menyatukan masyarakat dengan demokratisasi dan reorganisasi pemerintah yang mengakomodasi kelompok-kelompok gerakan rakyat.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Kansil, C.S.T dan Julianto, *op.cit.*, hlm. 52.

<sup>40</sup> G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 18.

<sup>41</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk., *Negara dan Nasionalisme Indonesia* Ed. P.J Suwarno, (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm. 75.

<sup>42</sup> Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 49.

<sup>43</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk., *loc.cit.*,



Namun, kepindahan ibukota RI ke Yogyakarta tidak langsung membawa angin segar bagi keamanan ibukota RI. Pasukan Belanda menyerbu Yogyakarta dari arah Semarang yang kemudian menangkap Presiden, wakil Presiden, beberapa orang menteri dan pejabat-pejabat tinggi. Setelah penangkapan pemimpin-pemimpin RI tersebut menurut Belanda merupakan akhir dari adanya pemerintahan RI. Akan tetapi ternyata Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera Barat segera bertindak dengan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (P.D.R.I) di Sumatera yang terletak di daerah Bukit Tinggi pada tanggal 22 Desember 1948.

### **C. Konferensi Meja Bundar (KMB)**

Atas prakarsa Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru, pada tanggal 20-23 Januari 1949, di New Delhi diselenggarakan suatu konferensi khusus bagi bangsa Indonesia, yang dihadiri oleh Sembilan belas wakil dari negara Asia, beberapa negara Arab, Ethiopia dan Australia. Putusan kemudian disampaikan kepada Dewan keamanan untuk bertindak lagi. Dewan memutuskan pembentukan UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*) dengan wewenang yang lebih luas dan dapat mengambil keputusan berdasarkan persetujuan dua diantara tiga anggotanya.

Perlawanan terhadap Belanda semakin meningkat, terutama peristiwa mengejutkan bagi pihak Belanda adalah serbuan tentara RI ke dalam kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 dan menguasai kota tersebut selama

enam jam. Akhirnya terjadi perundingan keempat kalinya pada tanggal 14 April 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Roem dan pihak Belanda oleh van Royen dibawah pengawasan UNCI. Pada tanggal 7 Mei 1949 tercapailah persetujuan yang dikenal dengan nama “*Roem- van Royen Statement*”, yang salah satunya berisi tentang pembebasan pemimpi-pemimpin RI serta segera mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada bulan Juli 1949 Presiden Soekarno dan semua pejabat lainnya dikembalikan ke Yogyakarta. Kemudian, presiden Soekarno mengirimkan utusan ke Sumatera Tengah untuk memberikan penjelasan tentang kesepakatan perundingan dengan Belanda. Utusan tersebut terdiri dari Moh. Natsir, Dr Laemeda dan Dr. Halim. Beberapa hari kemudian Syafruddin Prawiranegara kembali ke Yogyakarta untuk menyerahkan kembali mandat sebagai kepala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia kepada presiden RI pada tanggal 13 Juli 1949.

Persetujuan gencatan senjata antara pihak Belanda dengan Indonesia pun tercapai pada tanggal 1 Agustus 1949, yang berlaku mulai 11 Agustus 1949 di Jawa dan 15 Agustus 1949 di Sumatera. Setelah itu, delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, Indonesia mengirimkan wakil RI yang diwakili oleh Mohammad Hatta dan delegasi BFO (*Bijzonder Federall Overleg*) diwakili oleh Sultan Hamid ke Den Haag (Nederland) untuk menghadiri konferensi Meja Bundar (KMB). Adapun tujuan dari KMB adalah menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda dengan cara yang

adil dan pengakuan kedaulatan terhadap RI yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada RI dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949.<sup>44</sup>

Hasil-hasil pokok dari KMB antara lain ialah:

1. Keadaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada Republik Indonesia Serikat.
2. Penyerahan Kedaulatan itu akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.
3. Tentang Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS.
4. Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan dikepalai oleh Raja Belanda.
5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa *korvet* akan diserahkan kepada RIS.
6. Tentara Kerajaan Belanda akan secepat mungkin ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan tentara kerajaan Hindia-Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang akan dimasukkan dalam kesatuan-kesatuan TNI.<sup>45</sup>

Persetujuan mengenai KMB menuai hasil yaitu 2 November 1949 yaitu menghendaki pengakuan kedaulatan lengkap dan tanpa syarat oleh Pemerintah Belanda sebelum tanggal 30 Desember 1949 atas seluruh daerah

---

<sup>44</sup> Kansil, C.S.T dan Julianto, *op.cit*, hlm. 60.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 55.

Hindia Belanda kecuali Irian Barat. Kemudian Indonesia yang awalnya merupakan negara Republik berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan suatu negara Federal yang meliputi Republik Indonesia dan 15 daerah yang telah dibentuk oleh Belanda. Persetujuan KMB disahkan oleh pemerintah RI dengan Undang-Undang No.10/1949 tertanggal 14 Desember 1949.

Negara RIS berlangsung tidak lebih dari satu tahun. Hal ini dikarenakan bentuk negara federal tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan jiwa proklamasi. Selain itu, setelah pengakuan kedaulatan timbul berbagai pergolakan di negara-negara bagian. Selanjutnya beberapa negara bagian meletakkan status kenegaraannya dan bergabung dengan RI. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dihapuskan dan dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 61.

### **BAB III**

#### **PEMBERLAKUAN ORI**

##### **A. Pengusulan Pengeluaran ORI**

Pengusulan pengeluaran ORI dari kalangan masyarakat yang relatif terbatas sebenarnya sudah ada. Mereka mendesak agar pemerintah Republik Indonesia (RI) segera menerbitkan mata uang sendiri sebagai pengganti mata uang Jepang yang masih berlaku pada waktu itu, salah satunya Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara. Beliau adalah orang yang pertama kali mengusulkan agar pemerintah RI segera menerbitkan mata uang sendiri (ORI) sebagai pengganti mata uang Jepang kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta, ketika menjadi Menteri Muda Keuangan di zaman kabinet Syahrir II.<sup>1</sup> Namun, karena keterbatasan dana, sarana prasarana dan langkanya tenaga ahli di bidang keuangan tersebut membuat pengusulan tentang pengeluaran ORI untuk sementara waktu diabaikan.

Tindakan yang diambil pemerintah RI untuk menanggulangi tindakan NICA tentang pencetakan uang, pemerintah RI mengeluarkan maklumat pada tanggal 2 Oktober 1945 yang berisi tentang tidak berlakunya uang NICA di wilayah RI. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya maklumat 3 Oktober 1945.<sup>2</sup> Pemerintah RI menyadari bahwa bahwa kekuasaan mereka pada waktu

---

<sup>1</sup> M. Dawam Rahardjo, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah*, (Jakarta: LP3ES, 1955), hlm. 55.

<sup>2</sup> Mohammad Iskandar, "Oeang Repoeblik Dalam Kancan Revolusi", *Jurnal Sejarah* Vol. 6 No.1, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia, 2004), hlm. 45.

itu belum dapat menjangkau wilayah di luar Pulau Jawa sehingga langkah pertama lebih dipusatkan di Pulau Jawa.

Pengeluaran maklumat ternyata mendapatkan sambutan yang baik dari rakyat Indonesia. Misalnya, di wilayah Yogyakarta pada saat dikeluarkannya maklumat tersebut, para pelajar sekolah menengah secara spontan mengumpulkan uang NICA, kemudian memusnahkannya. Selanjutnya Barisan Kaum Buruh menyatakan kesetiaan mereka terhadap RI serta menentang peredaran uang kertas yang bertuliskan *Nederlandsch Indie*.<sup>3</sup> Untuk wilayah Jakarta dan Semarang, banyak pedagang pribumi tidak mau menerima pembayaran terhadap dagangannya dalam bentuk mata uang NICA. Akibatnya tidak jarang menimbulkan konflik atau kekerasan antara orang NICA dengan masyarakat pribumi.

Panglima tentara Sekutu (Inggris), Brigadir Jenderal Bethell<sup>4</sup> mengeluarkan “Surat Perintah” mengenai penggunaan senjata dan mata uang pada tanggal 6 Oktober 1945. Surat tersebut secara tidak langsung mendukung maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah RI tentang tiga mata uang yang sah sebagai alat pembayaran yaitu uang kertas De Javasche Bank 1925-1941, uang Hindia-Belanda 1940-1941, dan uang kertas yang diterbitkan Bala tentara Dai Nippon di Jawa.<sup>5</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa peredaran uang

---

<sup>3</sup> Surat Kabar “Merdeka”, 7 Oktober 1945. Lihat Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 46

<sup>4</sup> Seseorang yang ikut bertanggung jawab atas keadaan keamanan di Indonesia pasca penyerahan Jepang. *Ibid.*,

<sup>5</sup> Tim Penulis LP3ES, *Bank Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 50.

NICA sering mendapat penolakan dari rakyat Indonesia yang setia terhadap RI.

Keputusan tentang pemberlakuan mata uang NICA sebagai alat pembayaran yang sah merupakan desakan Gosen (Direktur Keuangan NICA) kepada van Mook. Gosen beralasan pemberlakuan mata uang NICA penting karena semakin menipisnya jumlah persediaan mata uang Jepang dan pernyataan Panglima Tertinggi Sekutu yang menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk menerima uang NICA tersebut. Disisi lain, terdapat desakan masyarakat kepada pemerintah RI tentang penerbitan mata uang sendiri semakin meningkat.

Pemerintah RI melakukan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) ke-3 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1945 berisi tentang pernyataan Wakil Presiden Mohammad Hatta tentang masalah mata uang di wilayah RI agar segera diselesaikan. Hal ini dianggap penting karena NICA menggunakan mata uangnya sebagai alat untuk mengacaukan perekonomian dan moneter RI.<sup>6</sup> Namun keterbatasan sarana maupun alat-alat penunjang dalam pembuatan ORI pada waktu itu membuat pemerintah RI belum berani mengeluarkan suatu pernyataan resmi pengeluaran mata uang RI akan diterbitkan. Meskipun demikian, persiapan pengeluaran ORI mulai dirintis oleh pemerintah RI yang dikoordinasi oleh Kementerian Keuangan.

Pertanyaan mengenai sekitar penerbitan mata uang RI sering diajukan kepada Wakil Presiden. Pertanyaan tersebut kemudian ditanggapi oleh Wakil

---

<sup>6</sup> Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 47.

Presiden RI Mohammad Hatta dengan menyatakan bahwa pembuatan mata uang RI sedang dalam proses dan tidak lama lagi akan diterbitkan. Mengetahui sikap pemerintah RI ini, Gosen menjadi ragu akan pernyataan Panglima Tertinggi Sekutu yang menyatakan pihak RI mendukung peredaran uang NICA. Akhirnya Gosen mendesak van Mook kembali agar segera menyatakan secara resmi diterbitkan di daerah-daerah yang telah diduduki oleh tentara NICA dan Sekutu paling tidak 1 Februari 1946. Selanjutnya menanamkan kepercayaan kepada rakyat untuk menggunakan uang NICA.<sup>7</sup>

Upaya NICA dalam mengedarkan mata uang merah atau uang NICA di luar Jawa dan Sumatra pada umumnya berjalan lancar. Namun, peredaran uang di Jawa dan Sumatra banyak mengalami perlawanan dari rakyat sehingga tidak jarang dilakukan dengan kekerasan. Oleh karena itu, konflik dan kekacauan di wilayah tersebut semakin sering terjadi. Meskipun kebijakan NICA mendapat dukungan dari Sekutu, tetapi harus diakui pula bahwa di kedua wilayah tersebut rakyat pribumi lebih suka menggunakan mata uang rupiah Jepang yang semakin lama nilainya semakin merosot.

Selain itu, berdasarkan berita dari sumber Belanda menerangkan bahwa harga uang NICA jatuh sampai 40% jika dibandingkan dengan harga Sterling dan dollar Amerika<sup>8</sup>. Hal ini merupakan akibat dari tawaran beras yang diberikan pemerintah RI kepada India. Lebih jauh lagi, Surat Kabar

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>8</sup> “Oeang NICA Merosot Teroes”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 03 Mei 1946, hlm. 1.



“Merdeka” mengabarkan bahwa kalangan Belanda merasa gugup karena mereka mengetahui bahwa pemuda-pemuda Indonesia masuk keluar kampung untuk menyelidiki orang-orang Indonesia yang mau menerima dan menggunakan uang NICA. Akibatnya adalah banyak tukang-tukang sayur dan pedagang-pedagang lainnya tidak mau tahu tentang uang NICA. Setiap hari masyarakat dapat menukar uang NICA dengan uang Jepang yang masih berlaku saat itu. Tindakan ini diambil untuk mempermudah orang-orang belanja di pasar.<sup>9</sup>

## **B. Persiapan Percetakan ORI**

Keputusan pemerintah RI tentang pengeluaran ORI telah dikeluarkan dan pengeluaran ORI akan dikoordinasi oleh Menteri keuangan A.A. Maramis. Pada tanggal 24 Oktober 1945 A.A. Maramis menginstruksikan kepada suatu tim dari Sarekat Buruh Percetakan G. Kolff & Co. Jakarta untuk melakukan peninjauan ke beberapa daerah RI untuk menentukan tempat yang memenuhi syarat dalam percetakan mata uang RI. Tim tersebut berpandangan bahwa terdapat dua tempat untuk percetakan mata uang yaitu Percetakan G. Kolff sendiri yang pada masa pendudukan Jepang juga digunakan sebagai tempat mencetak uang Jepang dan Percetakan *Nederlands Indische*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

*Metaalwaren en Emballage Fabrieken* (NIMEF) di Kedalpayak, sebelah selatan kota Malang, Jawa Timur.<sup>10</sup>

Rencana penerbitan ORI semakin kuat terutama setelah mendapat desakan masyarakat agar pemerintah RI segera mengeluarkan mata uang sendiri. Dalam rencana penerbitan ORI ini, pemerintah RI melakukan peninjauan kembali terhadap dua percetakan yang diusulkan oleh tim tersebut. Dari hasil peninjauan, pemerintah RI masih beranggapan percetakan yang dimaksud masih kurang baik dan dirasakan perlu untuk meninjau kembali beberapa percetakan lainnya sebagai alternatif. Peninjauan dilakukan di beberapa kota yaitu Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta dan Jakarta.<sup>11</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 3/RO tanggal 7 November 1945, Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk sebuah Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia<sup>12</sup>. Panitia tersebut diketuai oleh T.R.B. Sabaruddin (Direktur Bank Rakyat Indonesia) dan terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, Bank Rakyat Indonesia, dan beberapa anggota Serikat Buruh Percetakan G. Kolff, yang bertugas untuk menertibkan usaha pemerintah RI dalam mengeluarkan ORI tersebut. Selanjutnya dibentuk pula panitia penyelenggara untuk mempertimbangkan

---

<sup>10</sup> Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*, (Jakarta: LPPI, 1991), hlm. 72.

<sup>11</sup> Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 49.

<sup>12</sup> Nama panitia dalam tulisan ini dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.

cara-cara menerima, menyimpan dan mengedarkan mata uang baru yang dipimpin oleh Enang Koesnadi dari Kas Negeri Jakarta.

Panitia penyelenggara dalam proses pencetakan ORI menemukan banyak kendala karena tidak mempunyai bahan-bahan yang justru dibutuhkan untuk pembuatan uang tersebut.<sup>13</sup> Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan seperti kertas, tinta, bahan kimia untuk fotografi dan sinkografi, pelat seng untuk klise, ataupun alat-alat seperti mesin aduk untuk membuat tinta. Namun, berkat bantuan sukarela dari para karyawan beberapa perusahaan asing di Jakarta yang belum dikuasai oleh tentara Sekutu, bahan-bahan dan alat-alat itu diperoleh.<sup>14</sup> Untuk memperoleh bahan kimia dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam pembuatan mata uang merupakan suatu perjuangan yang memerlukan ketekunan, kelincahan, keberanian, karena bahan-bahan tersebut berada di daerah pendudukan Sekutu.<sup>15</sup>

Pembuatan desain dan bahan-bahan dasar berupa negatif kaca dilakukan di Percetakan Balai Pustaka, Jakarta dan Percetakan De Unie untuk membuat gambar litografi yang dikerjakan oleh Bunyamin Surjoharjo. Pelukis pertama ORI adalah Abdulsalam dan Soerono. *Offset* uang pertama kali dilakukan oleh Percetakan RI Salemba di Jakarta yang berada di bawah Kementerian Penerangan.

---

<sup>13</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *Persoalan Ekonomi di Indonesia*, (Djakarta: Indira, 1953), hlm. 22.

<sup>14</sup> Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 73.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

Akhir Desember 1945 semua pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan pengeluaran ORI terpaksa dihentikan. Hal ini dikarenakan keadaan Jakarta yang pada waktu itu menjadi ibukota negara berada di bawah pendudukan militer Sekutu dan tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan percetakan ORI tersebut. Selain itu, mulai awal Januari 1946, pemerintah RI memindahkan ibukota negara ke Yogyakarta, maka beberapa ratus rim lembaran 100 rupiah yang belum diberi nomor seri dan segala bahan serta alat yang perlu bersama para karyawan dan keluarganya dipindahkan juga ke Yogyakarta.

Proses pencetakan dan penerbitan ORI kemudian dilanjutkan kembali di wilayah yang masih dikuasai RI, yaitu di Yogyakarta, Surakarta, dan percetakan NIMEF di Kedalpayak daerah Malang dengan memanfaatkan berbagai percetakan swasta yang relatif modern pada waktu itu.<sup>16</sup> Pemerintah juga menghimbau kepada kantor-kantor polisi di Jawa dan Madura untuk mengadakan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan percetakan ORI dengan mengunjungi perusahaan percetakan tersebut 2 atau 3 kali dalam sebulan. Selain itu juga mengadakan kontrol terhadap kertas yang dipakai. Dengan menggunakan kertas dari pabrik kertas Padalarang dan pabrik kertas Leces (dekat Probolinggo).<sup>17</sup> Daerah Surakarta dibentuk panitia khusus

---

<sup>16</sup> Oey Beng To, *op.cit.*, hlm 76.

<sup>17</sup> Arsip Kementerian Penerangan 1945-1949, *Pengumuman Menteri Dalam Negeri Mengenai Kertas Pencetakan ORI* No. R. 1-1-2., 9 November 1946. Lihat lampiran 2, hlm. 106.

dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. M/489 tanggal 16 September 1946 untuk mengatur dan mengawasi pekerjaan pencetakan uang.

Sebelum ORI dikeluarkan, pemerintah RI mengambil langkah-langkah ‘pengamanan moneter’, antara lain mulai menarik mata uang Hindia-Belanda dan uang Jepang dari peredaran di wilayah yang masih dikuasai oleh pemerintah RI dengan cara yang sedikit merugikan masyarakat<sup>18</sup> Pencetakan ORI pada bulan Januari 1946 yang ditandatangani oleh R.A.S. Winarno dan Joenoet Ramli. Uang yang mula-mula dicetak adalah lembaran uang 100 rupiah.

Pencetakan pertama dapat dikatakan dilakukan di Pencetakan Negara. Meskipun pemerintah RI sudah membentuk Bank Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 2 Prp. Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1946 oleh Mohammad Hatta. Dalam kenyataannya, fungsi sirkulasi Bank Negara Indonesia tidak berjalan, bahkan lebih banyak bergerak keperkreditan komersial dan bertindak sebagai bank umum.<sup>19</sup> Bank Negara Indonesia juga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Bank Sentral yang berlangsung sampai tahun 1950.

*The idea of implementing monetary policy through a central bank was provided since the early stages of Indonesian independence as reflected in the elucidation of the 1945 constitution of Republik Indonesia. Bank*

---

<sup>18</sup> Sedikit merugikan karena berarti orang-orang yang banyak mempunyai uang Jepang terutama petani (penghasil satu-satunya pada masa Jepang) tidak memiliki kesempatan untuk menukar uang. Lihat Sumitro Djojohadikusumo, *op.cit.*, hlm. 23.

<sup>19</sup> Anonim, *Kilasan Sejarah dan Peranan Bank Indonesia Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kantor Cabang BI Yogyakarta, tt), hlm. 4.

*Negara Indonesia was established in 1946 to act as the central bank of the country. However, due to a counting struggle against the Dutch even after the proclamation of independence, the central bank was not active until 1950.*<sup>20</sup>

Kutipan di atas dapat dikatakan bahwa Bank Negara Indonesia sejak tahun 1946 telah berfungsi sebagai bank sentral. Namun, fungsi Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral atau bank sirkulasi tidak berjalan dalam menjalankan fungsinya sampai tahun 1950.

### **C. Pengeluaran ORI**

Penarikan uang dari peredaran di masyarakat tidak mungkin dilakukan mendadak atau langsung menghentikan uang karena pasti akan sangat merugikan masyarakat dan mengacaukan perekonomian, maka pemerintah memutuskan untuk menarik kedua macam uang tersebut secara berangsur-angsur dari peredaran. Selain itu, masuknya NICA ke wilayah Indonesia membuat wilayah Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu daerah pendudukan yang dikuasai NICA dan daerah RI sendiri. Dengan terpecahnya wilayah Indonesia, pemerintah RI mengatur laju jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan membatasi keluar masuknya uang dari luar ke daerah yang dikuasai pemerintah RI.<sup>21</sup>

Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah RI adalah melarang orang membawa uang lebih dari 1.000,- (uang Jepang) dari daerah karisidenan

---

<sup>20</sup> Binhadi, *Financial Sector Deregulation Banking Development and Monetary Policy*, (Jakarta: IBI, 1995), hlm. 9.

<sup>21</sup> M. Dawam Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 50.

Jakarta, Semarang, Surabaya, Bogor, dan Priangan (ibukotanya telah diduduki Belanda) ke daerah-daerah lain di Jawa dan Madura, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.<sup>22</sup> Serta melarang membawa uang dari luar masuk ke pulau Jawa dan Madura melebihi 5.000,- (uang Jepang) tanpa izin dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Pelarangan ini mulai diberlakukan tanggal 22 Juni 1946 untuk mencegah “penyerbuan” uang dari lain daerah ke daerah yang dikuasai RI, serta mengatur persiapan penggantian uang Jepang dengan ORI.<sup>23</sup>

Tindakan lanjutan dari pemerintah adalah membuat rancangan Undang-Undang (UU) pengeluaran ORI. Rancangan UU berisi tentang himbauan kepada masyarakat, perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain untuk menyimpan sebagian besar uangnya di bank, UU kemudian diserahkan pada BP KNIP pada tanggal 26 September 1946. BP KNIP menerima baik rencana undang-undang pengeluaran ORI. Sehingga dikatakan bahwa persiapan-persiapan untuk mengeluarkan ORI itu telah mendekati penyelesaian.<sup>24</sup>

Keharusan masyarakat, perusahaan-perusahaan dan badan-badan lain untuk menyimpan sebagian besar uang di bank pada bank- bank yang di tunjuk seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank

---

<sup>22</sup> Undang-undang No. 10/1946, tanggal 22 Juni 1946 dalam “Himpunan Undang-undang Peraturan-peraturan, Penetapan Pemerintah RI” tahun 1946 oleh Koesnodiprodjo, hlm 45-46. Lihat Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 76.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>24</sup> “Sekitar Pengeloearan Oeang Repoeblik”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 1 Oktober 1946, hlm. 1.

Tabungan Pos / Bank lain yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan<sup>25</sup>. Keharusan ini mulai diberlakukan mulai tanggal 15 Juli 1946 untuk Jawa dan Madura. Sedangkan uang yang tidak wajib disimpan di bank adalah uang sejumlah f 50,- (uang Jepang) bagi setiap penduduk untuk kepentingan sehari-hari dan sejumlah uang yang diperlukan guna melanjutkan usahanya. Kewajiban menyimpan uang di bank dikukuhkan dengan Undang-undang No.18 tanggal 1 Oktober 1946. Dalam pasal 8, disebutkan penetapan waktu mulai berlakunya ORI akan menentukan pula hari ketidakberlakuan uang yang sebelumnya sebagai alat pembayaran yang sah.

Uang Hindia-Belanda dan uang De Javasche Bank juga harus disimpan seluruhnya di bank. Untuk uang Hindia-Belanda sejak masa pendudukan Jepang sudah hilang dari peredaran karena ditahan oleh penguasa Jepang dan masyarakat. Uang tersebut menjadi benda perdagangan yang harganya setiap kali berubah menurut situasi dan keadaan pada waktu itu. Selain itu, pada daerah pendudukan Belanda sebagian besar telah ditukar dengan uang NICA.<sup>26</sup>

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan undang-undang No.17 tahun 1946 tentang pengeluaran ORI. Penetapan undang-undang sebagai berikut, yaitu Pasal 1 mengenai penetapan pemerintah mengeluarkan ORI; Pasal 2 yaitu tentang dasar penukaran ORI dengan uang yang masih berlaku dan

---

<sup>25</sup> “Persiapan Pengeloearan Oeang Repoeblik: Beberapa Hal jang Wadajib Diperhatikan Umum”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 4 Oktober 1946, hlm. 1.

<sup>26</sup> Oey Beng To, *loc.cit.*,



tindakan uang ini akan ditetapkan undang-undang lain; Pasal 3 berisi tentang macam, warna dan jenis harga ORI dan uang kertas ORI dikeluarkan dengan jenis harga 100 rupiah, 10 rupiah, 5 rupiah, 1 rupiah, 50 sen, 10 sen, 5 sen dan 1 sen.<sup>27</sup>

Sebelum ORI benar-benar dikeluarkan, pemerintah melakukan tindakan persiapan pengeluaran kembali guna memudahkan penukaran uang yang masih berlaku. Selain itu, pemerintah RI juga menarik kembali peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.3 tahun 1946 tentang menyimpan uang di bank. Undang-Undang tentang menyimpan uang di bank hanya diterapkan di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam pasal 1 ditetapkan bahwa sebelum tanggal 16 Oktober 1946 segenap uang tunai harus di simpan pada suatu bank yang ditunjuk untuk menerima uang simpanan. Pasal 9 tentang apa yang akan diterima apabila uang yang seharusnya di simpan dalam bank tidak disimpan akan menerima kesulitan karena uang tidak akan diterima untuk ditukar dengan ORI.<sup>28</sup>

Selanjutnya pemerintah RI mengeluarkan Undang-undang No. 18 tahun 1946 sebagai pengganti Undang-undang No.3 tahun 1946. Undang-undang ini berisi tentang tata cara pembayaran hutang, hukuman terhadap orang, pimpinan badan atau pegawai yang berkewajiban apabila melanggar

---

<sup>27</sup> “Tentang Pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia: Oendang-oendang No. 17 tahun 1946”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 2 Oktober 1946, hlm. 1.

<sup>28</sup> “Persiapan Pengeloearan Oeang Repoeblik: Beberapa Hal jang Wadjib Diperhatikan Umum”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 4 Oktober 1946, hlm. 1.

ketentuan atau tidak melaporkan hasil yang diterima, dan mengatur pihak atau pengusut yang dapat menyelidiki pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

Akhir Oktober 1946, uang Jepang yang disetorkan kepada bank-bank berjumlah f 1.892 juta dan uang yang ada dalam kas negara sebesar f 264 juta. Jumlah uang yang terkumpul diperkirakan sebesar f 2,2 miliar (uang Jepang). Walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada sejumlah uang Jepang yang tidak diserahkan kepada bank.<sup>30</sup> Pemerintah RI di Yogyakarta menerbitkan UU No.7 tahun 1946 tanggal 1 Oktober 1946 dan UU No. 19 Tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946 dalam rangka mendukung penerbitan ORI tersebut.

Pemerintah RI selanjutnya mengeluarkan UU No. 19 Tahun 1946. Undang-undang ini mengatur tentang dasar nilai ORI, dasar penukaran ORI dengan uang Jepang, cara pembayaran utang lama yang belum lunas pada waktu mulai diberlakukannya ORI, penetapan saat berlakunya uang serta menyerahkan kepada Menteri Kemakmuran untuk menetapkan harga-harga maksimum bagi barang-barang yang dipandang perlu. Pasal 1 ditetapkan nilai dasar ORI, yaitu 10 rupiah ORI sama dengan emas murni seberat 5 gram. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar harga yang tetap dengan mata uang baru, juga terhadap uang asing. Pasal 2 mengatur dasar penukaran ORI dengan uang Jepang, nilai tukar 1 rupiah ORI setara 50 rupiah

---

<sup>29</sup> “Oendang-Oendang Tentang Kewajiban Menjimpan Oeang Dalam bank: Oendang-Oendang No. 18 Tahun 1946”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 9 Oktober 1946, hlm. 1.

<sup>30</sup> Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 77.

Jepang untuk wilayah Jawa dan Madura dan 100 rupiah Jepang untuk luar Jawa dan Madura.

Pasal 3 mengatur pembayaran hutang yang belum dibayar lunas pada saat ORI berlaku dengan ketentuan, apabila hutang dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 1943 maka 1 ORI sama dengan 1 rupiah sebelum ORI berlaku; apabila hutang terjadi pada tanggal 1 Januari 1943 sampai 1 Januari 1946 maka 1 ORI sama dengan 20 rupiah sebelum ORI berlaku; dan apabila hutang terjadi tanggal 1 Januari 1946 sampai tahun sesudahnya maka 1 ORI sama dengan 50 rupiah sebelum ORI berlaku. Setelah Undang-undang ini diberlakukan maka pembayaran hutang harus dibayar dengan menggunakan ORI. Pasal 4 mengumumkan bahwa uang Jepang tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah sejak dimulainya hari pemberlakuan ORI yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selain mata uang Jepang akan diatur dikemudian hari.<sup>31</sup>

Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 1946<sup>32</sup> diberlakukan ORI sebagai alat pembayaran yang sah. Pertama kali ORI yang diterbitkan adalah emisi Jakarta, yaitu mata uang yang telah dipersiapkan dan ditandatangani pada

---

<sup>31</sup> “Oendang-Oendang No. 19 (Oendang-Oendang Tentang Pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia II)”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 26 Oktober 1946. Undang-undang ini juga tercantum dalam lampiran 1 Arsip kementerian penerangan, hlm. 103 – 105.

<sup>32</sup> Penerbitan ORI secara resmi pada tanggal 30 Oktober kemudian ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Hari Keuangan dengan SK Menteri Keuangan No. 380 tanggal 11 Oktober 1978.

November 1945 di Jakarta.<sup>33</sup> Sebelumnya, pemberlakuan ORI didahului dengan pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta tanggal 29 Oktober 1946. Dalam pidatonya antara lain mengatakan sebagai berikut:

Besok tanggal 30 Oktober 1946 satoe hari jang mengandoeng sedjarah bagi tanah air kita. Rakjat kita menghadapi penghidoepan baroe. Besok moelai beredar Oeang Repoeblik Indonesia sebagai satoe-satoenja alat pembayaran jang sah. Moelai poekoel 12 tengah malam nanti, oeang Djepang jang selama ini beredar sebagai oeang jang sah, tidak lakoe lagi. Beserta dengan uang Djepang itoe ikoet poela tidak lakoe oeang Javasche bank. Dengan ini toetoeplah soeatoe masa dalam sedjarah keoeangan Repoeblik Indonesia. Masa jang penoeh dengan penderitaan dan kesoekaran bagi rakjat kita!.<sup>34</sup>

Adanya pidato tersebut memberikan sambutan tanggal 30 Oktober 1946 tentang hari yang mengandung sejarah bagi Indonesia yaitu sejarah keuangan RI dengan mulai diberlakukannya ORI. Mata uang pertama setelah merdeka yang dikeluarkan oleh pemerintahan sendiri sebagai alat pembayaran yang sah. Berlakunya ORI diikuti dengan tidak berlakunya uang Jepang maupun uang *De Javasche Bank*.

Perusahaan-perusahaan diberikan kesempatan sampai tanggal 29 Oktober 1946 untuk menyimpan uangnya di dalam bank. Sehingga mulai tanggal 30 Oktober 1946 bank-bank tidak diizinkan menerima uang simpanan lagi.<sup>35</sup> Menteri Keuangan RI juga mengeluarkan Keputusan No. Ss/1/35 tanggal 29

---

<sup>33</sup> Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 51.

<sup>34</sup> Mohammad Hatta, "Keloearnja Oeang Repoeblik Hari Bersedjarah: Pidato Wakil Presiden Pd Tgl 29 Okt", dalam *Merdeka*, 31 Oktober 1946. Lihat lampiran 13, hlm. 127.

<sup>35</sup> "Pengoemoeman Kementerian Keoeangan", dalam *Kedaulatan Rakjat*, 28 Oktober 1946, hlm. 1.

Oktober tentang berlakunya ORI secara sah pada tanggal 30 Oktober 1946 pukul 00.00 serta penarikan uang Hindia-Belanda dan uang Jepang dari peredaran. Penukaran mata uang Jepang hanya dilakukan dengan perantara bank yang ditunjuk, seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Pos, bank Surakarta, Bank Nasional dan Pegadaian Negara.<sup>36</sup>

Pemerintah RI pada awal pemberlakuan ORI memberikan kepada penduduk satu rupiah untuk mengganti sisa uang Jepang yang masih dipunyainya.<sup>37</sup> Sebagaimana telah dikemukakan, ORI mulai diberlakukan pada tanggal 30 Oktober 1946 dan tidak berlakunya mata uang yang sebelumnya sebagai alat pembayaran yang sah pada hari diberlakukan ORI tersebut. Untuk mencegah agar mata uang selain ORI masuk ke wilayah RI, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1946 yang isinya tentang larangan membawa uang keluar dari Pulau Jawa dan Madura. Selain itu, pada hari yang sama Menteri Keuangan mengeluarkan ketetapan yang berkaitan dengan penarikan uang tabungan atau yang disimpan di bank sejak tanggal 31 Oktober 1946 sebagai berikut:

1. Penarikan maksimum Rp 100 setiap bulan;
2. Penarikan maksimum Rp 300 dalam hal:
  - a. Penyimpan melangsungkan perkawinan atau mengawinkan anak;
  - b. Istri penyimpan atau penyimpan sendiri melahirkan

---

<sup>36</sup> Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 78.

<sup>37</sup> “Oendang-Oendang Tentang Pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 26 Oktober 1946, hlm. 1.

- c. Penyimpan sendiri atau anggota keluarga tanggungannya sakit keras atau meninggal;
- 3. Bagi perusahaan, dengan menunjukkan gaji, penarikan maksimum Rp 2000 setiap bulan; untuk ongkos-ongkos lain maksimum Rp. 250 setiap minggu;
- 4. Bagi badan hukum bukan perusahaan, untuk pembayaran gaji dan ongkos lain, penarikan maksimum Rp 500 setiap bulan.<sup>38</sup>

#### **D. Penyebaran ORI**

Sebelum penyebaran uang ORI dilaksanakan, pemerintah RI membuat surat edaran yang ditujukan kepada pejabat daerah dan kantor kas negara yang berisi tentang permintaan agar para pejabat secara serentak dalam menyebarkan uang ORI. Hasil cetakan ORI dikirim ke seluruh Jawa dan Madura dalam gerbong-gerbong kereta api dengan pengawalan yang ketat agar tidak dirampok di tengah jalan suatu hal yang mudah terjadi karena ORI hanya dibungkus secara darurat, yakni dalam keranjang-keranjang bekas.<sup>39</sup>

Kurangnya sarana dan prasarana yang pengangkutan dan pengamanan peredaran ORI mengalami kesulitan. Sehingga pemberlakuan ORI lebih dipusatkan di Pulau Jawa dan Madura. Untuk daerah Sumatra peredaran ORI masih belum terjangkau karena kesukaran-kesukaran dalam lapangan teknik dan politik. Sehingga untuk daerah Sumatra uang Jepang masih berlaku

---

<sup>38</sup> Oey Beng To, *op.cit.*, hlm 82.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

sebagai alat pembayaran yang sah, disamping uang RI untuk provinsi Sumatera sampai pertengahan 1948.<sup>40</sup> Selain itu, pihak Belanda-NICA selalu berusaha menghalangi beredarnya mata uang RI yang baru dikeluarkan tersebut. Upaya Belanda yaitu dengan cara memalsukan ORI dan memasukkan serta mengedarkan uang NICA ke wilayah yang dikuasai oleh RI.

Peredaran ORI mendapatkan sambutan masyarakat yang tidak diperhitungkan oleh Belanda. Dukungan terhadap ORI tidak hanya datang dari masyarakat yang berada di wilayah yang dikuasai oleh RI, melainkan juga dari kalangan masyarakat yang berada di daerah pendudukan Sekutu dan Belanda. Sebagai contoh, seorang tukang becak di Jakarta lebih memilih 20 sen ORI dari pada f1 uang NICA sebagai upah mengangkut penumpangnya. Kemudian di Tanah Pasar Abang, seorang pedagang ayam menawarkan dagangannya 50 ORI, tetapi jika dibayar uang NICA harganya f2. “Uang kita menang, kata rakyat Jakarta”, demikian salah satu judul yang dimuat surat kabar Rakyat yang terbit di Jakarta.<sup>41</sup> Untuk beberapa pasar tradisional Jakarta, transaksi perdagangan sering menggunakan ORI. Sehingga dapat dikatakan nilai ORI semakin menguat terhadap uang NICA.

Penukaran uang antara ORI dengan uang NICA setelah agresi militer Belanda mengalami penurunan, namun kemudian menguat kembali karena

---

<sup>40</sup> Saubari, Dua Tahun Uang Republik Indonesia, *Sikap* Th II No. 10, 17 Maret 1949. Lihat lampiran 11, hlm. 122.

<sup>41</sup> Mohammad Iskandar, *loc.cit.*,

adanya dukungan dari masyarakat untuk pemerintah RI. Hal ini membuat nilai tukar antara dua mata uang tersebut adalah 1:5 kemudian melemah menjadi 1:7, setelah itu ORI menguat lagi menjadi 1:3 dan 1:2.<sup>42</sup> Menguatnya ORI di daerah pendudukan bukan semata-mata karena masyarakat percaya terhadap jaminan pemerintah terhadap uang tersebut, melainkan lebih pada kesadaran masyarakat yang tinggi dan dukungan politis masyarakat kepada pemerintah RI.

Tidak semua warga berani langsung menolak atau menerima ORI terutama untuk daerah perbatasan. Masyarakat yang berada di daerah perbatasan merasa kebingungan untuk menyimpan ORI karena takut diketahui tentara NICA. Sebaliknya, penduduk juga takut menyimpan uang NICA karena sewaktu-waktu para pejuang RI muncul di daerahnya.<sup>43</sup> Selain itu, pemerintah juga memberikan wewenang kepada polisi untuk mengawasi peredaran uang, lancarnya peredaran uang, nilai uang, keluar masuknya uang ke dan dari daerah pendudukan; memberantas penimbunan uang yang dapat mengacaukan peredaran ORI, perdagangan mata uang yang berarti membedakan nilai uang dengan harga yang telah ditetapkan; dan menyelidiki pencetakan uang palsu apakah ada faktor politik, pengaruh uang palsu, dan

---

<sup>42</sup> Tim Penulis LP3ES, *loc.cit.*, hlm. 50.

<sup>43</sup> M. Dawam Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 49.



sebab-sebab yang menimbulkan naik turunnya nilai uang RI.<sup>44</sup> Seperti pengawasan pembawaan ORI dari daerah pendudukan di daerah Boyolali.<sup>45</sup>

Pemerintah RI telah menerbitkan lima emisi ORI dari bulan Oktober 1946 sampai dengan bulan Desember 1949. Lima emisi ORI itu adalah emisi pertama ditandatangani oleh Menteri Keuangan A.A Maramis di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1946; emisi kedua yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1947; emisi ketiga ditandatangani oleh Menteri Keuangan A.A Maramis di Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 1947; emisi keempat ditandatangani oleh Menteri Keuangan *ad interim* Mohammad Hatta di Yogyakarta pada tanggal 23 Agustus 1948, dan emisi kelima ditandatangani oleh Menteri Keuangan Lukman Hakim di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1949 dengan kata-kata “Rupiah Baru”.<sup>46</sup>

Emisi keempat memiliki suatu keunikan dari pada emisi yang lain, karena nilai nominalnya yang tidak lazim. Nilai pecahan ORI emisi keempat adalah 40, 75, 400, dan 600 rupiah. Namun, ORI yang pecahan 600 rupiah belum sempat diedarkan ke masyarakat.

---

<sup>44</sup> Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949, Peraturan Pemerintah tentang Tugas: Pedoman Pekerjaan Sub. Bagian Economie terkait pengawasan peredaran uang. Lihat lampiran 3, hlm. 108.

<sup>45</sup> Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949, Kantor Polisi Kabupaten Bojolali No. 358, *Pembawaan ORI Baru dari Daerah Pendudukan*, 30 Januari 1948. Lihat lampiran 6, hlm. 113.

<sup>46</sup> Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm 56.

Pencetakan dan pengeluaran ORI terhenti pada saat ibukota RI di Yogyakarta berhasil diduduki pihak Belanda sebagai akibat dari penyerbuan aksi militer kedua. Pada tanggal 19 Desember 1949, seluruh bank dan kekayaan bank berupa ratusan juta ORI serta barang-barang berharga lainnya juga dikuasai Belanda.<sup>47</sup> Selanjutnya, pemerintah pendudukan Belanda membayar semua pengeluaran seperti gaji pegawai dan karyawan dengan menggunakan uang NICA (uang merah). Meskipun demikian, masih terdapat suatu panitia setempat yang membantu secara rahasia kepada para pegawai yang masih setia terhadap RI dengan cara membagi uang logam Hindia Belanda yang masih tersimpan pada Kas Negara Yogyakarta.

Pendudukan Belanda di Yogyakarta pada awalnya telah menyebabkan nilai tukar ORI terhadap uang NICA mengalami kemerosotan. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena para pedagang dan orang-orang kota yang memerlukan komoditi dari desa-desa harus mencari ORI karena petani di desa-desa tidak mau barangnya dibayar dengan mata uang NICA dan hanya mau menerima ORI. Akibatnya, nilai ORI yang sempat terpuruk dari kurs Rp 50 per f1 (NICA) menjadi Rp 500 per f1 kemudian membaik kembali menjadi Rp 130 per f1 lalu menjadi Rp 90 per f2. Hal ini memperlihatkan bahwa dukungan petani sangat mempengaruhi nilai tukar kedua jenis mata uang

---

<sup>47</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang & Bank*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 138.

tersebut. Apalagi setelah Serangan Umum 1 Maret 1949, yang disusul dengan pengumuman Sri Sultan No.1/11, nilai ORI semakin membaik.<sup>48</sup>

Meskipun awalnya peredaran uang NICA di Yogyakarta sempat membuat masyarakat bimbang dan ragu. Hal ini dipahami oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Menteri Koordinator Keamanan. Dalam mengatasi masalah tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerbitkan pengumuman No. 1 /11 tanggal 1 Juli 1949 yang berisi bahwa ORI tetap merupakan alat pembayaran yang sah disamping uang yang telah beredar (uang NICA) karena pendudukan Belanda. Adapun nilai tukar kedua jenis mata uang tersebut pemerintah tidak menetapkan, harga semuanya diserahkan kepada kekuatan pasar, serta untuk kantor-kantor yang menerima atau mengeluarkan uang (seperti Kas Negara, Kantor Pajak, Kantor Pos, dan lain-lain) dapat memberi keterangan tentang aturan-aturan kantornya masing-masing.<sup>49</sup>

#### **E. Pengeluaran Urida**

Keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya tenaga yang mengerti tentang keuangan, cukup membuat pemerintah RI mengalami kesulitan dalam menyebarkan ORI ke seluruh wilayah yang dikuasainya. Keadaan ini semakin parah setelah pihak Belanda (NICA) melakukan agresi

---

<sup>48</sup> Mohammad Iskandar, *loc.cit.*,

<sup>49</sup> Surat Pengumuman Menteri Agama RI Koordinator Keamanan No.1/11 Tahun 1949 tentang Uang RI (URI) Tetap sebagai Alat Pembayaran yang Sah, Juli 1949. (Arsip Daerah Yogyakarta). Lihat lampiran 10, hlm. 119.

militer pertama pada tahun 1947. Untuk mengatasi kemungkinan langkanya ORI di daerah-daerah tertentu yang mungkin saja dimanfaatkan oleh NICA untuk mengedarkan mata uangnya, pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1947 tanggal 26 Agustus 1947 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan mata uang atau alat pembayaran sementara yang sah, yang berlaku secara terbatas di daerah masing-masing. Semua penerbitan uang itu akan dijamin oleh pemerintah pusat dan mata uang tersebut dapat ditukar dengan ORI. Atas dasar itu, pemerintah daerah tingkat provinsi, karesidenan dan kabupaten menerbitkan Uang Republik Indonesia Daerah atau dikenal dengan Urida.<sup>50</sup>

Urida pertama di Pulau Jawa adalah Uang Kertas Darurat untuk Daerah Banten (Uridab). Emisi pertama uang itu (emisi Serang) tertanggal 15 Desember 1947, terdiri dari pecahan Rp 1, Rp 5, Rp 10, dan Rp 25 yang ditandatangani oleh Residen Banten dan Panitia Keuangan. Dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden Pusat RI kepada K.H. Achmad Chatib, untuk mencetak dan menerbitkan uang daerah yang berlaku sementara. Pencetakannya dilakukan di percetakan Serang di Serang, Banten. Kemudian disusul pengeluaran emisi kedua yang tertanggal 11 Agustus 1948 yang terdiri dari pecahan Rp50 yang ditandatangani oleh Dewan Pertahanan Daerah dan Kepala Pejabatan Keuangan Dewan Pertahanan Daerah.

Daerah Yogyakarta menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Uang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari pecahan Rp2,50, Rp5, dan

---

<sup>50</sup> Pada waktu itu sudah banyak daerah yang menggunakan “u” untuk menggantikan “oe”. Lihat Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 57.

Rp10. Surat Tanda Penerimaan itu ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tertanggal 10 November 1948. Begitu juga daerah Surakarta, Surat Tanda Penerimaan Uang yang ditandatangani oleh Kepala Militer Daerah Surakarta Urusan Civiil Residen. Surat tersebut diedarkan 1 November 1949 dan berlaku sampai dengan 1 Mei 1950.

Daerah yang dikuasai oleh para gerilyawan RI juga mengedarkan Kupon ORI sebagai pengganti uang resmi ORI. Kupon itu berlaku sah sebagai alat pembayaran dengan nilai tukar Rp10 Bank Dunia Merdeka RI. Kupon itu ditulis dikeluarkan di “tempat” tahun 1948 yang ditandatangani oleh Kepala departemen Keuangan/ Perekonomian K. G. Honggodjojo.

Daerah di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera juga mengeluarkan Urida. Urida yang pertama kali di Pulau Sumatera adalah Uang Republik Indonesia Daerah Sumatera atau URIPS<sup>51</sup>. Emisi pertama tertanggal 11 April 1947 yang dibuat berdasarkan Maklumat Gubernur Sumatera Tengku Mohammad Hassan No.92/K.O. tanggal 8 April 1947 yang berlaku di wilayah Propinsi Sumatera atau sebagian wilayah tersebut. URIPS dijamin oleh Pemerintah Pusat RI dan kemudian ditukar dengan ORI dengan nilai tukar 1:1. Akibat agresi militer Belanda di daerah Pemantang Siantar, percetakan URIPS yang semula berada di Pemantar Siantar dipindahkan ke Bukittinggi. Selanjutnya meluaskan peredaran URIPS ke berbagai daerah Sumatera. Semua emisi URIPS yang diterbitkan ditandatangani oleh Tengku Mohammad Hassan. URIPS emisi Bukittinggi yang diterbitkan sampai dengan tahun 1948 berjumlah 13. Selain

---

<sup>51</sup> Foto URIPS terlihat pada lampiran 14, hlm. 128.

di Bukittinggi, di beberapa daerah juga menerbitkan mata uang RI di daerahnya masing-masing, seperti di Aceh, Riau dan Palembang.<sup>52</sup>

Secara keseluruhan, sampai akhir 1949 tercatat ada 27 jenis Urida termaksud Kupon Getah. Kupon Getah merupakan alat penukaran senilai karet yang diperjualbelikan dan hanya berlaku di koperasi kebun Wingfoot. Kupon itu ditandatangani oleh Pengurus Kebun dan Wakil Buruh. Selengkapanya jenis mata uang tersebut adalah (1)URIPS; (2) Uridab; (3) Surat Tanda Penerimaan Uang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta; (4) Kupon ORI untuk Daerah Gerilya RI; (5) Surat Tanda Penerimaan untuk Daerah karesidenan Surakarta; (6) Bon Pemerintah Negara RI Kabupaten Asahan; (7) Tanda Pembayaran Sah buat Sumatera di Karesidenan Aceh; (8) Mandar PMR untuk Karesidenan Bengkulu; (9) Tanda Pembayaran Sah Sementara untuk Bengkulu; (10) Tanda Pembayaran sah untuk Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan; (11) Kupon Penukaran untuk Jambi; (12) Uang Tukaran untuk Kabupaten karo; (13) Uang untuk kabupaten Labuan Batu; (14) Mandat Pertahanan untuk Daerah Karesidenan Lampung; (15) Tanda Pembayaran yang Sah untuk Daerah Karesidenan Lampung; (16) Alat Pembayaran untuk Kabupaten Nias; (17) Mandat Daerah Pertahanan Daerah Palembang untuk Daerah Palembang; (18) Tanda Pembayaran yang Sah untuk daerah Pemantang Siantar; (19) Tanda Pembayaran yang Sah untuk Daerah Sumatera Utara; (20) Alat Pembayaran

---

<sup>52</sup> Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 57.

untuk Daerah Tapanuli; (21) Tanda Pembayaran yang Sah berlaku untuk Sumatera selatan.<sup>53</sup>

Di samping 21 jenis mata uang tersebut, komunitas pedagang keturunan Tionghoa di Kecamatan Limapuluh, kabupaten Asahan, juga mengeluarkan alat pembayaran sementara. Mereka menerbitkan alat pembayaran setelah mendapat izin dari pemerintah setempat. Berkaitan dengan masa berlakunya Urida, pada tanggal 13 Desember 1948 pemerintah pusat menerbitkan PP No.76 Tahun 1948 yang menyebutkan bahwa masa berlakunya Urida akan diatur tersendiri oleh Menteri Keuangan.

Peranan Urida semakin penting terutama setelah Belanda melakukan agresi militer II pada tahun akhir 1948. Akibat agresi pemerintahan RI ditangkap Belanda. Pimpinan kemudian dialihkan kepada Sjafruddin Prawiranegara yang membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI) di Sumatera Barat. Sebagai pemimpin tertinggi, Sjafruddin Prawiragenara harus bekerja keras mengatasi masalah langkanya ORI di wilayah pedalaman RI. Keadaan itu antara lain terekam dari bunyi telegram Menteri Keuangan PDRI Lukman Hakim kepada Pemerintah daerah Karesidenan Jambi yang berisi petunjuk untuk mencetak ORI bagi keperluan daerah Jambi dan lainnya. Meskipun awal pendudukan Belanda berdampak pada merosotnya ORI, tetapi lama-lama nilai ORI kembali menguat atas dukungan kota-kota kecil dan daerah-daerah pedesaan yang tidak mau menerima uang NICA.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 58.

Pihak RI menjadikan situasi tersebut sebagai “modal” perundingan dengan pihak Belanda mengenai alat pembayaran yang sah di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam perundingan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan tegas menolak usulan pihak Belanda yang mendesak agar digunakan mata uang NICA sebagai alat pembayaran yang sah sampai terbentuknya pemerintahan RIS (Republik Indonesia Serikat). Akhirnya Belanda terpaksa menerima desakan pihak RI setelah melihat kenyataan bahwa rakyat di Yogyakarta lebih menyukai dan menerima mata uang ORI dari pada mata uang NICA meskipun secara fisik mata uang yang disebut terakhir itu lebih bisa dipertanggungjawabkan.

#### **F. Penarikan ORI dan URIDA**

Pencapaian kesepakatan akhirnya dapat tercapai antara pemerintah RI dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani pada akhir November 1949. Pasal-pasal yang berkaitan khusus dengan masalah moneter (keuangan) dan perbankan adalah pasal 14 (keuangan) dan 19 (perbankan). Dalam pasal 19 disebutkan bahwa yang menjadi bank sirkulasi Republik Indonesia serikat (RIS) adalah De Javasche Bank (DJB). Selama RIS masih berutang kepada Belanda, maka RIS akan bermusyawarah dengan pihak Belanda antara lain dalam hal (1) jika hendak mengubah undang-undang mata uang maupun undang-undang DJB yang berlaku pada waktu pengakuan kedaulatan, (2) jika hendak membuat undang-undang mata uang dan undang-



undang bank sirkulasi yang baru. Isi perjanjian KMB mulai berlaku tanggal 27 Desember 1949.

Konsekuensi setelah pengakuan kedaulatan 1949 berdasarkan Maklumat Menteri Keuangan tanggal 1 Januari 1950 adalah penarikan uang ORI dan sejenisnya dari peredaran yang bersifatnya sebagai alat pembayaran yang sah terhitung dari 1 Mei 1950 dan menggantikannya dengan mata uang RIS atau uang *De Javasche Bank* (uang federal).<sup>54</sup> Masa berlaku ORI dan sejenisnya sebagai alat pembayaran yang sah ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Mei 1950. Adapun masa penukaran uang itu dibatasi hingga 21 Juni 1950.

Dalam rangka penukaran ORI dan Urida dengan mata uang baru RIS, Menteri Keuangan RIS menetapkan sebagai berikut:

1. Kurs yang berbeda setiap mata uang ORI, yaitu berdasarkan daya beli masing-masing;
2. Setiap orang hanya diperbolehkan menukar maksimum f50. Kelebihan ORI harus diserahkan kepada Bank Negara Indonesia untuk dibekukan.

Dari ketetapan di atas setiap orang hanya diperbolehkan menukar maksimum f50. Sedangkan kelebihan harus diserahkan kepada Bank Negara Indonesia untuk dibekukan. Sehingga hasil penukaran ORI dengan uang DJB yang baru hanya mencapai f60 juta.<sup>55</sup> Jumlah tersebut amat rendah karena jumlah uang yang dapat ditukarkan dibatasi dan banyak ORI yang

---

<sup>54</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hlm 54.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 55.

ternyata dipalsukan, meskipun telah ada upaya dari pemerintah tentang pengedaran uang palsu dengan menekan cara pembayaran dengan menggunakan perantaraan bank-bank pemerintah.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Arsip Kementerian Penerangan 1945-1949, *Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1948 Mengenai Perantaraan Bank-Bank Pemerintah Dalam Pengedaran uang Berhubung Dengan Adanya Uang Palsu*. Lihat lampiran 5, hlm. 110 – 112.

## **BAB IV**

### **PENGARUH ORI DALAM BIDANG POLITIK DAN EKONOMI**

#### **A. Pengaruh ORI dalam Bidang Politik**

##### **1. ORI sebagai Lambang Negara Merdeka**

Pemberlakuan ORI mempunyai manfaat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan atas RI. Meskipun awalnya pengusulan pengeluaran ORI masih diragukan oleh Mohammad Hatta, akan tetapi setelah berdiskusi lebih lanjut pemerintah RI menyetujui dikeluarkannya ORI yang tidak hanya sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah melainkan juga sebagai lambang negara yang merdeka.<sup>1</sup> Beredarnya mata uang ORI mempunyai pengaruh besar dalam bidang politik. Perlunya pemerintah mengeluarkan mata uang sendiri dengan alasan bahwa negara Indonesia merupakan negara baru dan karena itu perlu mencetak mata uang baru sebagai lambang negara merdeka dan berdaulat penuh terhadap kemerdekaannya. Selain itu, pemberlakuan ORI sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah bukan negara asing.

Pemberlakuan ORI merupakan tanda kemerdekaan negara RI. Hal ini dikarenakan dengan mencetak uang sendiri dapat membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah berdiri sendiri dan dipimpin oleh bangsa sendiri

---

<sup>1</sup> “Bung Hatta Mengabdikan pada Tjita-tjita Perjoangan Bangsa”, Lihat Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*, (Jakarta: LPPI, 1991), hlm. 71-72.

yang terlihat dalam gambar yang berada di uang kertas tersebut. Selain itu, dengan mengeluarkan ORI (mata uang sendiri) memperlihatkan suatu etika pemerintah untuk meletakkan dasar kemakmuran rakyat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tujuannya untuk menjadikan kemakmuran rakyat sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan RI.<sup>2</sup> Sejalan dengan pemberlakuan ORI pula, pemerintah menjalankan politik perbaikan upah dan perbaikan harga barang-barang penghasilan tani. Pemerintah RI telah berusaha mengambil segala tindakan yang bukan saja untuk menjaga harga uang, tetapi juga mengurangi secara berangsur-angsur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Etika baik pemerintah ini terlihat masyarakat sehingga masyarakat menyambut dengan gembira terhadap pemberlakuan ORI tersebut. Meskipun pemerintah tidak dapat maksimal dalam menjamin nilai ORI tersebut.

Pemberlakuan ORI membuat kemerdekaan Indonesia menjadi lebih lengkap. Pada saat diberlakukannya ORI dan tidak lagi berlakunya uang Jepang sedikit merugikan masyarakat dan banyak kendala dalam proses pemberlakuannya, namun pemberlakuan ORI tetap berjalan. Adanya ORI juga dimaksudkan agar lebih cepat ORI dikeluarkan dan uang

---

<sup>2</sup> Mohammad Hatta, “Keloearnya Oeang Repoeblik Hari Bersedjarah: Pidato Wakil Presiden Pd Tgl 29 Okt”, dalam *Merdeka*, 31 Oktober 1948. Lihat lampiran 13, hlm. 127.

Jepang ditarik dari peredaran di masyarakat, maka keadaan akan menjadi lebih baik.<sup>3</sup>

Apabila pemerintah RI tidak segera mencetak uang ORI dan segera memberlakukannya pada saat itu, kemungkinan banyak orang yang masih meragukan bahwa negara RI benar-benar sudah bebas dari penjajahan Belanda dan merdeka dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pihak Belanda pada saat ingin membuktikan bahwa kekuasaan Belanda masih ada setelah 17 Agustus 1945 adalah dengan mencetak dan mengedarkan mata uang NICA atau mata uang merah dalam peredaran di masyarakat setelah Jepang kalah terhadap Sekutu. Walaupun dalam peredarannya tidak jarang menimbulkan suatu bentrokan antara pedagang dengan pembayar atau pengguna uang NICA.<sup>4</sup>

Adanya pemberlakuan ORI membuat jiwa rakyat Indonesia lebih erat dengan adanya ORI tersebut, semakin bertambah kepercayaannya akan kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Bagi sebagian besar rakyat tidak mudah menanamkan arti mempunyai bendera sendiri, bahasa sendiri maupun lagu sendiri yang merupakan tanda dan arti bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Namun dengan memegang, melihat dan menggunakan ORI dalam kehidupan sehari-hari

---

<sup>3</sup> Soemanang, "Oeang Repoeblik", dalam *Kedaulatan Rakjat*, 28 Oktober 1946. Lihat lampiran 12, hlm. 126.

<sup>4</sup> Jai Singh Yadav, "Mengamati Uang, Melacak Sejarah", dalam *Kompas*, 30 Oktober 1991, hlm. 16.

secara sederhana rakyat dapat melihat dan merasakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka penuh.<sup>5</sup>

Berlakunya ORI juga memperlihatkan identitas bangsa Indonesia yang terlihat dari penggambaran dinamika perjuangan dan ciri bangsa Indonesia dalam perwujudan fisik sebuah mata uang baik kertas maupun logam. Selain itu, kepercayaan rakyat terhadap uang sangat berkaitan dengan kekuatan negara dalam menginginkan dan mempertahankan kemerdekaan, seperti kejadian di negara Tiongkok.

Negara Tiongkok pernah mengalami suatu keadaan yang menyedihkan, bangsa Tionghoa dan pedagang-pedagang yang katanya cinta kepada nusa dan bangsa lebih menghargai uang negara asing daripada uang yang dikeluarkan oleh negaranya sendiri. Perbuatan demikian terlihat seperti tidak menginginkan kemerdekaan 100%. Jika suatu negara mengeluarkan mata uang baru namun setelah dikeluarkannya uang tersebut masyarakat lebih menghargai uang asing berarti rakyat negara tersebut masih memberikan kesempatan bangsa asing untuk mengeksploitasi baik kekayaan alam maupun mengeksploitasi manusianya dari negaranya sendiri dan juga dengan sendirinya akan melemahkan pemerintahan yang ada.

Pemerintah RI kemudian berusaha agar apa yang terjadi di Tiongkok tidak akan terjadi di Indonesia. Sehingga pemerintah RI

---

<sup>5</sup> “Kesan<sup>2</sup> Sekitar Beredarnja Oeang Repoeblik: Oeang Kita Mempoenjai Kekoeatan Gaib Oentoek Rakjat Djelata”, dalam *Merdeka*, 1 November 1946, hlm. 1.

memberi penerangan agar setiap warga negaranya merasa mempunyai dan bertanggung jawab terhadap lancarnya peredaran ORI di masyarakat. Meskipun penerangan tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal pula oleh pemerintah RI karena keadaan politik dan ekonomi saat itu, tetapi dengan tingginya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merupakan dukungan yang tidak ternilai dan tidak terlihat.

Banyak rakyat bangga menggunakan ORI dalam kehidupan mereka dan menolak menggunakan uang NICA. Hal ini merupakan bentuk keinginan rakyat yang benar-benar menginginkan suatu kemerdekaan penuh dalam segala aspek kehidupan.<sup>6</sup> Antusias rakyat terhadap pemberlakuan ORI tidak terduga terlihat dari banyak pedagang-pedagang yang menawarkan dagangannya asal dibayar dengan ORI, melihat ORI dengan ketetapan hati bahwa tanah tumpah darahnya benar-benar sudah merdeka.<sup>7</sup>

Negara baru dengan segala cita-cita dan semangatnya seakan-akan menjelma dalam tiap-tiap lembaran uang kertas tersebut. Gelombang rasa bangga disertai kesadaran akan negaranya meliputi seluruh masyarakat. Lebih nyata sekarang bagi rakyat melihat wujud negaranya yang selama itu hanya terbayang-bayang agak jauh. Membuat rakyat semakin bertambah tebal rasa kenegaraan dan rasa solidaritas masyarakat terhadap

---

<sup>6</sup> “Hormati Oeang Repoeblik Kita”, dalam *Merdeka*, 31 Oktober 1946, hlm. 2.

<sup>7</sup> “Kesan<sup>2</sup> Sekitar Beredarnja Oeang Repoeblik: Oeang Kita Mempoenjai Kekoeatan Gaib Oentoek Rakjat Djelata”, *loc.cit.*,

pemerintah dengan adanya ORI tersebut.<sup>8</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberlakuan ORI menjadi suatu lambang negara merdeka serta sebagai alat untuk memperkenalkan negaranya kepada khalayak umum.

## 2. ORI sebagai Alat Perjuangan

ORI merupakan mata uang pertama Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah RI setelah memproklamasikan kemerdekaannya. Uang tersebut dikeluarkan pemerintah guna mengganti mata uang yang masih berlaku saat itu, seperti uang De Javasche Bank antara tahun 1925-1941, uang pemerintah Hindia-Belanda tahun 1940-1941, dan uang Jepang.

Sebagai negara yang baru saja berdiri, perjuangan bangsa Indonesia sudah tentu masih terpusat pada usaha menegakkan dan membela kedaulatan negara Indonesia terhadap Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Dalam pembiayaan revolusi, lazimnya suatu negara yang stabil biasanya menggunakan pendapatan nasional dan apabila tidak mencukupi dilakukan dengan melakukan meningkatkan pungutan pajak serta mengadakan pinjaman. Namun, sebagai negara yang baru saja berdiri sarana dan prasarana belum memadai untuk melakukan hal tersebut dan kemungkinan sangat kecil untuk dapat dilaksanakan, sehingga cara yang ditempuh yaitu dengan cara “*definit financing*”, yaitu

---

<sup>8</sup> Saubari, “Dua Tahun Uang Republik Indonesia”, Majalah *Sikap*, 31 Maret 1949. Lihat lampiran 11, hlm. 124.



menciptakan daya beli melalui pencetakan uang kertas. *Definit financing* dalam pelaksanaannya hanya tergantung pada tersedianya kemungkinan untuk mencetak uang kertas baru.<sup>9</sup>

Tidak adanya jalan lain yang baik dan efisien dalam membiayai revolusi, maka pemberlakuan ORI merupakan cara untuk memecahkan masalah pembiayaan revolusi yang paling baik saat itu. Pemberlakuan uang ORI tersebut digunakan untuk membiayai berbagai keperluan sebagai negara yang baru berdiri seperti mendukung administrasi dan memperkuat tentara-tentara Indonesia saat mempertahankan negara. Dengan adanya ORI ini pemerintah RI berusaha untuk menata kembali bangsa Indonesia.

Pemberlakuan ORI banyak menemui kendala di dalamnya. Pada awal percetakan ORI, pemerintah masih berada di Jakarta. Namun, pada saat memberlakukan ORI, pemerintah negara RI sudah pindah ke Yogyakarta yang pada waktu itu di anggap lebih aman. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, ORI tercatat sebagai alat yang mempersatukan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama pemerintah RI berjuang menegakkan kemerdekaan RI yang seutuhnya. Selain itu, ORI juga telah menjalankan peranannya sebagai alat perjuangan karena dapat

---

<sup>9</sup> Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Jilid I (1945-1958)*, (Jakarta: LPPI, 1991), hlm. 83.

membiayai beraneka keperluan negara yang baru berdiri termasuk untuk mempertahankan kemerdekaan.<sup>10</sup>

Menurut Galbraith, pencetakan uang kertas di Amerika yang mendapat restu dari *Congres* (Parlemen Amerika Serikat) itulah yang dengan cepat disebut sebagai “*An instrument of revolution*”, alat perjuangan revolusi. Begitu juga dengan ORI yang juga merupakan suatu “*instrument of revolution*”, karena telah mendukung dan memungkinkan pemerintah RI mengatur administrasiya, mengorganisir dan memperkuat tentaranya, serta memelihara keamanan, ketertiban dan mengurus kesejahteraan rakyat dalam berperang melawan Belanda.<sup>11</sup>

Agresi militer yang dilakukan oleh pihak Belanda menjadikan wilayah yang dikuasai pemerintah RI bertambah polarisasi, setiap agresi militer mengakibatkan masalah-masalah sosial ekonomi yang cukup serius bagi pemerintah RI. Agresi militer Belanda juga menyebabkan semakin menyempitnya daerah yang dikuasai pemerintah RI dan semakin berkurangnya sumber ekonomi. Hal ini disebabkan banyak daerah yang subur terutama perkebunan-perkebunan menjadi sasaran utama Belanda dalam agresi tersebut. Sedangkan masalah pengungsian dan kepadatan penduduk di wilayah RI semakin meningkat. Di lain pihak, perundingan-perundingan memaksa pemerintah RI untuk memperkuat kontrol dari kekuatan-kekuatan sosial revolusioner dan politis dalam tubuh RI sendiri.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

Sehingga dengan diberlakukannya ORI sangat memperkuat pemerintah RI dalam menjalankan pemerintahan.<sup>12</sup>

Meskipun pada agresi militer Belanda II, Yogyakarta dan pimpinan RI berhasil ditawan Belanda, serta seiring dengan meningkatnya keperluan pembiayaan peperangan maka pencetakan dan pengeluaran ORI semakin pesat pula. Jumlah ORI yang dikeluarkan sampai tahun 1949 diperkirakan sekitar 6 milyar.<sup>13</sup> Namun, perlu untuk diketahui bahwa penguasaan kota-kota dan jalan-jalan utama saat agresi militer Belanda II hanya dapat dikuasai Belanda pada siang hari. Sedangkan pedesaan dan malam hari dalam kekuasaan RI.<sup>14</sup> Sehingga semakin lama menimbulkan keresahan bagi orang NICA yang ingin membeli barang. Dengan demikian dapat dikatakan meskipun situasi tidak menentu, ORI tetap terbukti mampu membangkitkan rasa solidaritas serta rasa nasionalisme rakyat Indonesia.

## **B. Pengaruh ORI dalam Bidang Ekonomi**

### **1. ORI sebagai Alat Pembayaran**

Bagi masyarakat yang modern, uang adalah suatu kebutuhan yang mutlak baik untuk perseorangan maupun untuk negara yang harus memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Awalnya uang ORI

---

<sup>12</sup> Onghokham, "Revolusi Indonesia: Mitos dan Realitas" *Prisma* No. 8 Tahun XIV, (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm. 9.

<sup>13</sup> *Laporan De Javasche Bank 1945-1950*, Lihat Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 42.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 10.

digunakan sebagai alat penukar barang. Mula-mula orang menjual barang dan karena menjual tadi ia menerima uang. Kedua, ORI digunakan sebagai alat pengukur harga karena nilainya yang tidak mudah berubah-ubah. Sehingga uang ORI mempunyai arti juga sebagai alat pembayaran bagi masyarakat Indonesia. Syarat terpenting agar uang dapat dijadikan sebagai alat penukar, pengukur harga dan alat pembayaran berjalan baik maka harga uang tersebut harus tetap dan tidak mudah berubah terhadap harga barang-barang.<sup>15</sup>

Hubungan kausalitas antara jumlah uang yang beredar dengan inflasi di Indonesia terdapat adanya umpan balik dua arah. Pengaruh ekspansi moneter terhadap inflasi bersifat lebih signifikan dan pasti dibandingkan pengaruh sebaliknya, yaitu inflasi terhadap ekspansi moneter. ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan A.A. Maramis dan diberi tanggal 17 Oktober 1945, mulai beredar tanggal 30 Oktober 1946 dan ditarik kembali pada bulan Maret 1950. Sehingga pemberlakuan ORI di Indonesia tidak berlangsung lama yaitu hanya berlangsung selama 3 tahun 5 bulan.<sup>16</sup>

Pemberlakuan ORI dimaksudkan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh daerah yang masih dikuasai oleh pemerintah RI pada waktu itu, meliputi sebagian besar pulau Jawa dan Madura serta Pulau Sumatra.

---

<sup>15</sup> Soemitro Djojohadikoesoemo, “Kedoedoekan Oeang Terhadap Perseorangan dan Negara”, dalam *Merdeka*, 24 September 1946, hlm. 1.

<sup>16</sup> Setelah ORI ditarik kembali, maka uang yang dikeluarkan pemerintah RI selanjutnya tidak lagi diberi nama ORI oleh masyarakat.

Akan tetapi kendala dalam bidang pengangkutan menyebabkan ORI tidak sempat diedarkan di pulau Sumatra. Sebagai alat pembayaran yang sah RI, pada akhir 1947, di beberapa daerah Sumatera telah dikeluarkan bermacam-macam Urida dengan nama bermacam-macam pula seperti: Oeang Repoeblik Propinsi Sumatera (ORIPS), Uang Republik Indonesia Sumatera Utara (URISU), Uang Republik Indonesia Daerah Djambi (URIDJA), Uang Republik Indonesia Daerah Aceh (URIDA), Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Tapanoeli (ORITA).

Bersamaan dengan penggantian ORI dengan uang federal (uang baru RIS) yang dikeluarkan oleh *De Javasche Bank* yang saat itu berfungsi sebagai bank sirkulasi dalam bulan Maret 1950, maka sebagai konsekuensi dari kesepakatan KMB, maka jenis-jenis uang yang telah diedarkan oleh pemerintah baik ORI maupun Urida ditarik kembali. Meskipun demikian, untuk daerah Yogyakarta setelah KMB masih sebagian besar masih menggunakan ORI namun dengan nilai yang tidak ditentukan atau sesuai dengan pasar. Selain itu, pemulihan ekonomi negara Indonesia tidak dapat berlangsung berkesinambungan karena stabilitas nilai tukar uang federal saat itu masih belum tetap.

## 2. ORI sebagai Pembiayaan Revolusi

Keuangan negara tidak dapat mengorganisasi sebagaimana mestinya dan anggaran tidak dapat dibereskan selama pengeluaran-pengeluaran untuk pertahanan terhadap agresi militer Belanda yang

sewaktu-waktu dapat meletus masih dibutuhkan.<sup>17</sup> Sebagai besar pengeluaran uang guna memenuhi kebutuhan keuangan negara. Dalam fungsinya sebagai alat pembiayaan Revolusi terhadap Belanda. ORI dapat disamakan dengan “*continental money*” (disebut juga “*greenback*”), yang dikeluarkan oleh negara-negara koloni di Amerika Serikat selama “*War of Independent*” terhadap kerajaan Inggris (1776-1783). Mengenai uang tersebut, Professor J.K. Galbraith mengatakan dalam bukunya<sup>18</sup>, bahwa uang kertas yang dikeluarkan oleh negara-negara bekas koloni itulah yang sesungguhnya membiayai revolusi Amerika. Pinjaman-pinjaman yang dilakukan di luar negeri tidak banyak artinya. Pinjaman-pinjaman tersebut lebih banyak simbol saja.

Persamaan ORI dengan uang kertas Amerika Serikat dalam membiayai revolusi pada batas-batas tertentu, berlaku pula terhadap stabilitas nilai dari kedua uang tersebut. Dalam 1781 “*continental money*” (yang mulai diedarkan 1776) mempunyai nilai hanya 1/1000 (satu per seribu) dari nilai awalnya. Begitu juga stabilitas ORI pun tidak dapat bertahan lama. Berbagai faktor telah menyebabkan nilainya turun dengan sangat drastis dalam waktu yang singkat, meskipun tidak sehebat kemerosotan nilai “*continental money*” dari Amerika Serikat.

---

<sup>17</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *Persoalan Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Indira, 1953), hlm. 24.

<sup>18</sup> John Kenneth Galbraith, “*Money Whence it Came Where it When*”, hal. 70 dst., Batam Books, New York, 1975. Lihat Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 70.

### C. Dampak ORI dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Agresi militer Belanda pertama mempengaruhi pemberlakuan ORI. Semenjak adanya agresi militer tersebut, biaya untuk pertahanan negara Indonesia menjadi beban negara yang diperkirakan hingga 40 – 50% dari anggaran negara. Dengan demikian keadaan ekonomipun bertambah buruk berhubung dengan adanya serangan militer yang membuat harga ORI turun drastis dan harga-harga barang makin tambah meningkat.<sup>19</sup>

Pemberlakuan ORI yang dimulai pada tanggal 30 Oktober 1946 dan segala mata uang Jepang dinyatakan tidak berlaku. Namun, pemberlakuan ORI juga menimbulkan sedikit kerugian pada petani di daerah-daerah desa. Hal ini dikarenakan selama pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan RI, petani inilah yang hampir menjadi penghasil satu-satunya. Para petani mempunyai jumlah uang Jepang yang tidak sedikit yang didapatkan sebagai pengganti barang yang mereka jual. Namun, karena kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemerintah RI membuat rakyat rela berkorban demi nusa dan bangsa yang membuat kedudukan pemerintah RI menjadi semakin kuat dalam kedudukan negaranya. Meskipun menurut teori dan perhitungan biasa, pemerintah RI sudah lama jatuh karena kehabisan uang, justru bertambah kokoh dan teratur semua karena didorong dan dijunjung oleh kepercayaan. Tanpa kepercayaan masyarakat tentu suatu pemerintahan yang baru berdiri tidak dapat bertahan lama. Hal ini berarti partisipasi masyarakat

---

<sup>19</sup> Saubari, “Dua Tahun Uang Republik Indonesia”, Majalah *Sikap*, 07 April 1949. Lihat lampiran 11, hlm. 125.

dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan RI merupakan suatu yang sangat mendukung adanya pemerintahan negara RI.

Meskipun di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah RI terdapat berbagai jenis mata uang dalam peredaran di masyarakat dengan nilai tukar yang berbeda-beda yang mengakibatkan timbulkan kenaikan harga dan banyak terjadi penimbuan terhadap komoditi ekspor secara besar-besaran.<sup>20</sup> Namun, rakyat masih memberikan dukungan pada pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan cara tetap menggunakan ORI dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pada waktu nilai ORI turun drastis setelah Belanda melakukan agresi kedua, mata uang ORI tetap digunakan masyarakat kecil yang membuat nilai ORI naik kembali dengan menggunakan ORI seperti suatu kebanggaan bagi masyarakat.

Pemberlakuan ORI dan Urida nyaris tanpa jaminan yang jelas dari pemerintah, namun adanya ORI mampu menyatukan kaum pedagang dan petani di pedesaan semacam “*collective action*” melawan pihak Belanda. Dengan adanya dukungan dan kenyataan rakyat telah berhasil membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap kebijakannya, salah satunya penggunaan ORI maupun Urida.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M. Dawam Rahardjo, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: LP3ES, 1955), hlm. 55.

<sup>21</sup> Mohammad Iskandar, “Oeang Repoeblik dalam Kancan Revolusi” *Jurnal Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia, 2004), hlm. 61.



Rakyat tetap menyambut kegembiraan sangat besar terhadap pemberlakuan ORI. ORI bukanlah sebagai alat penukaran saja melainkan juga sebagai alat pengukur harga dan alat pembayaran.<sup>22</sup> Rakyat menerima dengan baik meskipun pada kenyataannya pemberlakuan ORI tersebut tidak gampang. Pemberlakuan ORI menjadi kebanggaan dan kepercayaan bagi masyarakat. ORI bukan saja merupakan soal ekonomi maupun soal politik, akan tetapi soal psikologi, jiwa, hati, dan soal kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat inilah yang merupakan tiang pertama dari keuangan negara.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Saubari, *loc.cit.*,

<sup>23</sup> Soemanang, "Oeang Repoeblik", dalam *Kedaulatan Rakjat*, 28 Oktober 1946, hlm. 1. Lihat lampiran 12, hlm. 126.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Keadaan politik dan moneter Indonesia pada saat pemberlakuan ORI sudah tentu tidak berjalan normal, selain baru saja berdiri untuk sarana dan prasarana yang menunjang roda pemerintahan masih sangat sederhana sekali. Dalam bidang politik yaitu terjadinya konflik *intern* antara pemerintah dengan PKI yang memuncak dengan adanya pemberontakan PKI tahun 1948, pemberontakan ini melemahkan bangsa Indonesia dalam menghadapi Belanda. Keadaan politik semakin buruk ketika Belanda melakukan agresi militer Belanda I pada tahun 1947 dan agresi militer II pada tahun 1948 yang diakhiri dengan Konferensi Meja Bundar (KMB). Selain itu, ketidakamanan kota Jakarta membuat ibukota negara pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Begitu juga pusat bank Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta dan menempati gedung bekas Javasche Bank.

Dalam bidang ekonomi juga tidak jauh berbeda dengan keadaan politik, terjadi peredaran uang Jepang di masyarakat yang tidak terkendali dan menimbulkan *hiperinflasi*. Hal ini bertambah buruk ketika Belanda melakukan blokade laut pada bulan November 1945 yang dilakukan dengan keras oleh pihak Belanda. Selain itu, kas negara hampir kosong karena digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan maupun mempertahankan kemerdekaan.

Dalam menghadapi keadaan politik dan ekonomi, salah satu cara yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah pengeluaran ORI. ORI merupakan mata

uang pertama yang dikeluarkan pemerintah setelah kemerdekaan yang dicetak dalam negara sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan ORI sendiri adalah *monetary reform* yang dikenal dengan istilah politik *sanering* uang (penyehatan uang), yaitu tindakan pemerintah untuk menghilangkan kondisi mata uang tidak sehat yang beredar dalam masyarakat dengan cara memperbaharui nilai mata uang atau mengganti uang lama dengan mengeluarkan uang baru. ORI mulai diberlakukan pada tanggal 30 Oktober 1946.

Pemberlakuan ORI ini menjadi pemecahan masalah karena pada saat itu apabila dilakukan dengan memungut pajak lebih tinggi merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan saat itu dan apabila melakukan peminjaman nasional juga masih belum dapat dilakukan pula untuk menjalankan dan membiayai roda pemerintahan RI. Selain itu, pemberlakuan ORI secara langsung dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dari masyarakat. Meskipun pada saat pemberlakuan ORI bersamaan dengan uang NICA menimbulkan kesulitan bagi penduduk daerah perbatasan antara daerah yang dikuasai pemerintah RI dengan yang diduduki oleh NICA. Setelah Belanda melakukan agresi pertama maka pemerintah memberikan wewenang pada daerah dalam mengeluarkan Urida (Uang Republik Daerah) tahun 1947 yang bertujuan agar masyarakat tidak mengalami kelangkaan uang.

Setelah adanya perjanjian KMB dan mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 Indonesia menjadi berbentuk Serikat. Sebagai konsekuensinya uang yang diberlakukan oleh pemerintah

baik ORI maupun Urida yang pada saat itu sebagai alat pembayaran yang sah ditarik dari peredaran di masyarakat dan diganti dengan uang feredal yang dikeluarkan oleh *De Javansche Bank* yang dipilih sebagai bank sirkulasi.

Pemberlakuan ORI mempunyai pengaruh dalam kehidupan politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, adanya ORI dapat memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dan berdaulat penuh tanpa campur tangan bangsa lain. Bagi rakyat sendiri dengan memegang, melihat dan menggunakan ORI dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana dalam pemikiran mereka membuat semakin tebal rasa kebangsaan sebagai bangsa yang merdeka dan bentuk partisipasi rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Selain itu, pemberlakuan ORI digunakan sebagai alat perjuangan bangsa Indonesia dan alat ukur penyatuan bangsa dengan tetap menggunakan ORI.

Pengaruh dalam bidang ekonomi yaitu ORI digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sebagai pengganti mata uang pendudukan Jepang, memperlancar perekonomian masyarakat Indonesia. Selain itu, peredaran uang di masyarakat menjadi berkurang, karena terjadi penarikan mata uang Jepang. Selain itu, pencetakan ORI juga dimaksudkan untuk membiayai berbagai macam keperluan dalam menjalankan roda pemerintahan seperti membentuk berbagai jawatan yang mendukung dalam menjalankan roda pemerintahan, membiayai segala administrasi yang diperlukan, membiayai peperangan melawan Belanda yang masih ingin kembali berkuasa dan secara umum membiayai revolusi Indonesia sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aida Budiman. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir: buku 1 (1945-1959) Membangun Ekonomi Nasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Anton Haryono. 2003. *Dari Rakyat Legitimasi Dibangun, Kepada Rakyat Eksploitasi Diarahkan: Indonesia Pra Kolonial, Kolonial, dan Pasca Kolonial. Dalam Indonesia Alternatif*. Yogyakarta: tp.
- Daliman. 2006. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.
- Dawam Rahardjo M, dkk. 1955. *Bank Indonesia Dalam Kancah Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES
- Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. 1983. "Perjuangan Mencari Sumber Dana", *Prisma*. Jakarta: LP3ES.
- Gottschalk, Louis. 1975. "Understanding History: A primer of Historical Method", a.b, Nugroho Notosusanto, *Mengerti sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Harry Waluya. 1993. *Ekonomi Moneter Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Helius Sjamsuddin. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hoetaeroek M. 1970. *Sedjarah Umum: Masa Sesudah Perang Dunia II (1945-1970)*. Djakarta: Erlangga.
- Kwik Kian Gie. 1994. *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- LEMHANAS. 1989. *Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Aqua Prees.
- Lorens Bagus. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Madelon de Keizer. 1993. "Mission Impossible": The Intermediary Role of The Dutch Politician and Journalist Frans Geodart In Thr Ducth-Indonesian Conflict, 1945-1947, *Indonesia*. Ithaca and Londen: Cornell Uniernsity Press.

- Margono Djojohadikusumo. t.th. *Kenang-Kenangan dari Tiga Zaman*. Djakarta: Indira.
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad Ke-20 I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mohammad Hatta. 2011. Menuju Gerbang kemerdekaan Ed. Mulyawan Karim. Jakarta: PT KOMPAS Media Nusantara.
- Mohammad Iskandar. 2004. "Oeang Repoeblik" dalam Kancan Revolusi, *Jurnal Sejarah* Vol. 6 No. 1. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia.
- Nugroho Notosusanto. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Norma-Norma dalam Pemikiran dan penulisan Sejarah*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan.
- Oey Beng To. 1991. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*. Jakarta: LPPI.
- Ricklefs, M.C., 1998. *Sejarah Indonesia Modern* (terj. Dharmono Hardjowidjono), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sartono Kartodirdjo. 1984. *Modern Indonesia: Tradition & Transformation*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_, dkk. 1995. *Negara dan Nasionalisme Indonesia* (Ed. P.J Suwarno). Jakarta: Grasindo.
- Sritua Arif dan Deliar Noor. 2006. *Negeri Terjajah: Menyingkap Ilusi Kemerdekaan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Sumitro Djojohadikusumo. 1953. *Persoalan Ekonomi di Indonesia*. Djakarta: Indira.
- Tim Penulis LP3ES. 1995. *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES.

## Surat Kabar

“Oeang NICA Merosot Teroes”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 3 Mei 1946.

“Persiapan Oeang Repoeblik”, dalam *Merdeka*, 27 Juli 1946.

“Koers Oeang Djepang dan Belanda Sama”, dalam *Merdeka*, 12 Agustus 1946.

“Oeang Dari dan Ke Sumatera”, dalam *Merdeka*, 12 September 1946.

“Kewadajiban Menjinpan Oeang Dalam Bank”, dalam *Merdeka*, 12 September 1946.

“Modal Revolusi”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 17 September 1946.

Soemitro Djojohadikoesoemo, “Kedoeoekan Oeang Terhadap Perseorangan dan Negara”, dalam *Merdeka*, 24 September 1946.

“Sekitar Pengeloearan Oeang Repoeblik”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 1 Oktober 1946.

“Tentang Pengeloearan Oeang Repoeblik, Oendang-oendang No. 7 Tahun 1946”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 2 Oktober 1946.

“Persiapan Pengeloearan Oeang Repoeblik: Beberapa Hal Jang Wadjib Diperhatikan Umum”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 4 Oktober 1946.

“Oendang-oendang Tentang Kewadajiban Menjinpan Oeang Dalam Bank: Oendang-oendang No.18 Tahun 1946 (Penutup)”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 9 Oktober 1946.

“Persiapan Pengeloearan Oeang Repoeblik: Beberapa Pendjelasan penting”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 10 Oktober 1946.

“Keloearnja Oeang Repoeblik Ta’ Melenjapkan Inflasi”, dalam *Merdeka*, 14 Oktober 1946.

“Menjehatkan Keoeangan”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 26 Oktober 1946.

“Oendang-oendang Tentang Pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 26 oktober 1946.

“Oendang-oendang No.19 (Oendang-oendang Tentang Pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia II)”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 26 Oktober 1946.

“Pengoemoeman”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 26 Oktober 1946.

“Koetipan Dari Soerat Kepoatoesan Menteri Keoeangan (Menteri Keoeangan Sjafruddin Prawiranegara)”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 26 Oktober 1946.

“Pengeloearan Oeang Repoeblik Melalui Para Pegawai”, dalam *Merdeka*, 26 Oktober 1946.

“Oeang Repoeblik Moelai Berlaku Tgl. 26 Okt: Peredarannja Akan Ditentoekan Lagi”, dalam *Merdeka*, 26 Oktober 1946.

“Pengoemoeman Kementerian Keoeangan”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 28 Oktober 1946.

Soemanang, “Oeang Repoeblik”, dalam *Kedaulatan Rakjat*, 28 Oktober 1946.

“Oeang Repoeblik Berlakoe Didaerah Repoeblik”, dalam *Merdeka*, 28 Oktober 1946.

Mohammad Hatta, “Pidato Wakil Presiden Pd Tgl 29 Okt: Keloearnja Oeang Repoeblik Hari Bersedjarah”, dalam *Merdeka*, 31 Oktober 1946.

“Hormati Oeang Repoeblik Kita”, dalam *Merdeka*, 31 Oktober 1946.

“Oeang Kita Mempunyai Kekuatan Gaib Oentoek rakjat Djelata”, dalam *Merdeka*, 1 November 1946.

“Uang ORI Dikembalikan”, dalam *Merdeka*, 12 Mei 1949.

“Mengamati Uang, Melacak Sejarah”, dalam *Kompas*, 30 Oktober 1991.

## **Arsip**

Arsip Surat Kementerian Keoeangan Jogjakarta No. R.1-1-2/ Rahasia terkait dengan kertas percetakan ORI.

Arsip Kementerian Penerangan djawatan publicietit: Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1948 tentang perantaraan bank-bank pemerintah dalam peredaran uang.

Arsip Kementerian Penerangan: Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1948 tentang kedjahatan-kedjahatan dalam keadaan bahaja jang dapat dihukum dengan hukuman mati, salah satu isinya terkain dengan hendak menguntungkan diri sendiri.

Arsip Kementerian Dalam Negeri terkait dengan peminjaman uang kepada Bank Rakjat di Jogja.



Surat Pengumuman Menteri Negara RI Koordinator Keamanan No.1/11 tahun 1949 tentang uang RI (URI) tetap sebagai alat pembayaran yang sah, Juli 1949.

Arsip Kementerian Penerangan: Oendang-oendang No 19 th. '46 tentang pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia dan Penjelasannya.

Arsip Jawatan Kepolisian Negara No.1382/Pam dan No.29/ Pam tentang tabel ORI yang resmi dari seratus rupiah hidjau.

Arsip Jawatan Kepolisian Negara No. 358/T.0/33/2/R/E terkait pembawaan ORI baru dari daerah pendudukan.

Arsip Jawatan Kepolisian Negara tentang pedoman pekerdjaan sub bagian ekonomie terkait dengan pengawasan peredaran uang.

Arsip Syafruddin Prawiranegara No. 1 tentang Majalah Sikap: Dua tahun uang Republik Indonesia.

Arsip Kementerian Dalam Negeri tentang Koetipan Pemberitahuan.


### **Skripsi**

1. Skripsi yang berjudul “Peranan Soemitro Djojohadikusumo di Bidang Ekonomi Pada Masa Kemerdekaan-Demokrasi Parlementer (1945-1957)” yang ditulis oleh Galuh Yeni Oktora dari Jurusan Pendidikan Sejarah, tahun 2006, FISE, Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Skripsi yang berjudul “Dinamika Bank Sentral Indonesia 1946-1968” yang ditulis oleh Handono Adam Sukhajat dari prodi Ilmu Sejarah, tahun 2009, Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE, Universitas Negeri Yogyakarta.

Lampiran 1 : "Arsip Kementerian Penerangan: Oendang-oendang No 19 th. '46 tentang pengeloearan Oeang Repoebliek Indonesia dan penjelasannya."

No 19/13 VII/1946 Kementerian

## 1. Oendang-oendang No. 19 th. '46 Tentang Pengeloearan Oeang Repoebliek Indonesia. 2. P e n d j e l a s a n.



KEMENTERIAN PENERANGAN

Atoeran ini hanya berarti oentoek masa jang pendek antara hari penerbitan Oendang ini dan hari moeski berlakoenja O.R.I.

**ajaz 3.** Berbagai-bagai matiam padjak mempoenjai teknik administrasi jang choesoes, sehingga hasil jang didapat dengan melakoekan peratoeran jang termaktoeb dalam ajaz 1) sefiara otomatis dapat dioega tertipai dengan di dalam lain dengan menghindarkan banjak "administratieve rompslomp". Terutama oentoek padjak boemi atoean jang choesoes sangat dioentoekan. Baroe-baroe ini ditetapkan dengan Oendang<sup>2</sup> bahwa atas ketelaan budiak- nin haroes ditetapi oerenten jang memuat (progressief). Oentoek men- dialankan ini sadia dibotoekan tempo kira-3%, boelan (dengan melam- boer) oleh karena jang kena padjak ini ada berdjaja-dioega orang. Kalau seodahnia pekerdian ini selesai haroes dioega dilakoekan perhitoengan "koers", maka moenokin nerloe tempo 3½ boelan lagi. Oleh karena itoe Men- teri Keoeangan diberi bekoesan oentoek menzadakan atoean choesoes, asal sadia tidak memberatkan pemikoel-padjak, jani tidak oesah membari na- diaj lebih daripada ia haroes bayar, anabih neratoeran oemoem seperti ter- maksoed dalam pasal 4 ajaz 1 dilakoekan terhadapja.

**Pasal 5.**  
Dalam persediaan harta-tetap moengkin ada perdjandjan jang dimoelai sehaloen O.R.I. berlakoe dan "verkoep toeres" sampai waktoe seodah O.R.I. moelai berlakoe. Walaupun huciang telah ditetapkan oentoek sehaloen masa perdjandjan, dipandang adil bahwa "koers" hanya dilakoekan oentoek ba- gian sehaloen O.R.I. berlakoe. Oentoek bagian seodah saat itoe, haroes diadakan perdjandjan baroe.

**Pasal 6.**  
Dioega besarnja oepah<sup>2</sup> dipandang tidak adil kalau di-"koers" dengan begitoe sadja. Oleh karena itoe oepah<sup>2</sup> oentoek boelan Oktober (jang beloeri diboer) dan oentoek boelan<sup>2</sup> i.a.d. haroes ditetapi lagi moenoret peloman dari Menteri Sosial.

Dioega oentoek gadji pegawai-pekerdja Negeri nerloe diadakan atoean jang berlainan dari atoean oemoem jang termaktoeb dalam pasal 4. Oleh karena hal ini masoek kewadiban Menteri Keoeangan, maka Menteri inilah jang akan mengatoernja.

Orang<sup>2</sup> jang mendapal oepah dari Negeri tetapi tidak masoek golongan seganai atau pekerdja masoek atoean ajaz 1).

**Pasal 7.**  
Telah tjoekoop didjelaskan dalam pendjelasan oemoem.

**Pasal 8.**  
**ajaz 1.** Tjoekoop dijelas.

**ajaz 2.** Berhoboeng dengan perbedaan keadaan, baik politik masoepoen sosial. lagi poela oleh karena banjak dioega daerah<sup>2</sup> dengan mana sangat soekar diadakan perhoboengan, tidak dapat dihindarkan bahwa saat moelai tidak sahnia oeng Djepang bocat beberapa daerah berlainan.

**ajaz 3** } tjoekoop dijelas.  
**pasal 9** }

**O E N D A N G N o. 19 T A H O E N 1946.**  
**O E N D A N G - O E N D A N G T E N T A N G P E N G E L O E A R A N O E A N G R E P O E B L I K**  
**I N D O N E S I A ( I I ).**

**P R E S I D E N - R E P O E B L I K I N D O N E S I A**

**M E M B R A N G :**

Bahwa berhubung dengan pengeloaran uang Repoeblik Indonesia perlu diadakan peraturan tentang dasar nilai uang tersebut, tentang dasar peneloaran uang tersebut dengan uang Djepang yang masih berlaku sekarang, tentang pembajaran hoetang lama, dan tentang uang Djepang yang masih berlaku sekarang;

**M E N G I N G A T :**

Pasal 2 Oendang-oendang tentang pengeloaran uang Repoeblik Indonesia (I) (Oendang-oendang No. 17 tahun 1946);  
 Pasal 5, 20 dan 23 Oendang-oendang Dasar Negara Repoeblik Indonesia;  
 Pasal IV Atoeran Peralihan Oendang-oendang Dasar dan Makloema; waki Presiden Repoeblik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;  
 Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

**M E M O E T O E S K A N :**

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

**O E N D A N G - O E N D A N G T E N T A N G P E N G E L O E A R A N O E A N G**  
**R E P O E B L I K I N D O N E S I A ( I I ) .**

**P a s a l 1.**

Dengan tidak mengoerangi peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya dalam Oendang-oendang tentang uang Repoeblik Indonesia, maka sebagai dasar nilai ditentokan sepeleoh roepiah uang Repoeblik Indonesia sama dengan emas moerni seberat lima Gram.

**P a s a l 2.**

- 1). Sebagai dasar penoekaran, lima poeloh roepiah uang Djepang disamakan dengan satu roepiah uang Repoeblik Indonesia.
- 2). Dalam daerah diloer Jawa dan Madoera dasar penoekaran ditetapkan seratoes roepiah uang Djepang sama dengan satu roepiah uang Repoeblik Indonesia. Menteri Koeangan berhak mengoebah dasar penoekaran itoe, jika dianggap perlu.

**P a s a l 3.**

- 1). Penoekaran uang Djepang dengan uang Repoeblik Indonesia hanya dilakoek dengan peraturan Bank yang dimakoed dalam pasal 1a Oendang-oendang tentang kewadjaan menjupai uang dalam Bank (Oendang-oendang No. 18 tahun 1946).
- 2). Oentoek sementara yang ditoekar dengan uang Djepang yang telah disupai dalam Bank tersebut ialah hurja uang Djepang-oendang termakoed dalam ajat 1. Bank moeroel pasal 1a Oendang-oendang termakoed dalam ajat 1, maka kepada sege-nap pendoeok diberikan satu roepiah uang Repoeblik Indonesia seorag.
- 3). Sebagai pengganti uang toeti yang masih dapat dipakai moeroel pasal 1a Oendang-oendang termakoed dalam ajat 1, maka kepada sege-nap pendoeok diberikan satu roepiah uang Repoeblik Indonesia seorag.
- 4). Apabila dipandang perlu, Menteri Koeangan diperbolehkan menambah qoerlah uang; yang diberikan kepada tiap pendoeok asal sadja penambahan itoe tidak melebihi lima sen seorag.
- 5). Moeroel peraturan yang dibuat oleh Menteri Koeangan, pengambilan kembali simpanan uang dapat dibatasi.

**P a s a l 4.**

- 1). Pembajaran segala majam hoetang yang belom dibajar loenas atau waktio berlakoeknya uang Repoeblik Indonesia dilakoek dengan dasar per-hitoengan sebagai berikut:

- a. Satu roepiah uang sah sebelum uang Repoeblik berlaku disamakan dengan satu roepiah uang Repoeblik Indonesia, jika hoetang terjadi sebelum tanggal 1 boelan Djanoeri 1943.
- b. Dua poeloh roepiah uang sah sebelum uang Repoeblik berlaku disamakan dengan satu roepiah uang Repoeblik Indonesia, jika hoetang terjadi pada tanggal 1 boelan Djanoeri 1943 atau sesudahnya tetapi sebelum tanggal 1 boelan Djanoeri 1946.
- c. Lima poeloh roepiah uang sah sebelum uang Repoeblik berlaku disamakan dengan satu roepiah uang Repoeblik Indonesia, jika hoetang terjadi pada tanggal 1 boelan Djanoeri 1946 atau sesudahnya.
- 2). Pembajaran hoetang termakoed dalam hoerof a dan b ajat 1 tidak boleh dilakoek dengan uang Djepang sesudah Oendang<sup>2</sup> ini berlaku.
- 3). Menteri Koeangan dapat mengadakan neratoeran choesoos onto k hoetang<sup>2</sup> padjak atau hoetang<sup>2</sup> lain kepada negeri, asal sadja tidak mebe-ratkan orang-orang yang berhoetang.

**P a s a l 5.**

Pembajaran hoetang, berdasarkan perbandingan sewajarnya tetap, yang jika berlaku sesudah waktio termakoed dalam pasal 8, oentoek seha-sian diketjoalkan dari pencatapan dalam pasal 4; besarnja bagian hoetang tersebut oentoek masa yang akan datang, ditetapkan lagi.



**P E N D J E L A S A N    O E N D A N G - O E N D A N G   N o . 1 9   „ O E N D A N G -  
O E N D A N G   T E N T A N G   P E N G E L O E A R A N   O E -  
A N G   R E P O E B L I K   I N D O N E S I A   ( I I ) ” .**

**P e n d j e l a s a n   O e m o e m :**

Seperiti tertulis dalam considerrans maksoed Oendang-oendang ini ja'lah mengadakan peratoeraan tentang:

1. dasar nilai Oeang Repoebliek Indonesia (selandjoelnya disebot O.R.I.),
2. dasar penoeakan oeang itoe dengan oeang Djepang,
3. pembajaran hoetang lama,
4. oeang Djepang jang masih berlakoe sekarang.

**A d 1.**

Sebagai dasar nilai ditetapkan 10 roepiah ORI = 5 gram emas moerni Persamaan dengan emas ini perloe oentoe perhoeboengan dengan loear negeri dan boekan berarti bahwa oeang Repoebliek berdasarkan faham „ne-salisan“.

Apabila perdagangan dengan loear negeri soedah madjoe dan teratoe moengkin sekali pada soetoe-keetka diloear negeri orang minta bajaran putra kita dengan emas.

Dalam hal demikian maka sebagai dasar diambil R 10 = 5 gr. emas moerni. Jang dimaksioedkan dengan mas moerni ja'lah „fijn goud“ dalam arti emas 24 karat.

**A d 2.**

Djika mengingat bahwa harga emas achi? ini tidak koerang dari f 200.— oeang Djepang segram, djadi 5 gram = f 1000.—, maka nilai R 10.— sekoerang-koerangnja haroes sama dengan f 1000.— oeang djepang atau R 1.— = f 100.— oeang Djepang.

Akan tetapi perimbangan 1 : 100 dipaondang terlampau tinggi oleh karena :

1. akan dirasai terlampau berat oleh rajat.
2. wang jang beredar di Djawa dan Soematera akan fidak lebih dari R 80.000.000, djoeimah mana dipandang terlampau sedikit dan akan menimboekan kesoeakan dalam diosal-beli (ruilverkeer).

Oleh karena dalam praktek O.R.I. hanja dalam hal? jang istimewa sadja haroesnja dapat ditoeak dengan emas, tidak ada halangannja kalam nilaian 1 : 100 ditoeoekan.

Sehalinja nilai O.R.I. terhadap oeang Djepang tidak dapat koerang dari oeang Nica (1 : 30).

Berdasar atas pertimbangan? itoe dasar penoeakan ditetapkan 1 : 50 oentoe Djawa dan Madoera. Diloear Djawa dan Madoera, jang menoea djoeakkan inflasi jang lebih tiebat, imbangan ditetapkan doeloe 1 : 100; halinja kepada Menteri Keoeangan perloe diberikan kekoeraan oentoe merobah ini djika dianggap perloe.

Dengan-dasar penoeakan jang demikian di Djawa dan Madoera akan beredar pada permoealan ± f 100 djoea sebagai pengganti oeang Djepang.

**P a s a l 6.**

- 1). Menjimpang dari pasal 4 ajat 1 sub c, oeang oentoe boelan Oktober 1946, jang pada hari berlakoenja Oendang-oendang ini boeloe dilajjar, pembajarannja dengan Oeang Repoebliek ditetapkan mengingat pedoman-oeang Menteri Sosial. Penetapan oeang selandjoelnya haroes disesoeaikan poela dengan pedoman-oeang tersebut.
- 2). Atoeran tersebut dalam ajat 1 tidak menguati pegawai-pekerdja Negeri. Hal ini diaetoe oleh Menteri Keoeangan.

**P a s a l 7.**

- 1). Menteri Kemakmoeran dapat menetapkan harga setinggi-tingginja dari barang-barang jang dipandang perloe-oleinja.
- 2). Penetapan harga, termaksioed dalam ajat 1 dapat disertai anjamaan boekoeran pendjara setinggi-tingginja setahoen dan/atau anjamaan denda setinggi-tingginja 10.000 roepiah Oeang Repoebliek.

**P a s a l 8.**

- 1). Oeang Repoebliek Indonesia moelai berlakoe pada waktoe jang ditetapkan oleh Menteri Keoeangan.
- 2). Oeang, jang berlakoe seboeloe ada Oeang Repoebliek, tidak berlakoe lagi sebagai alat pembajaran jang sah moelai hari jang oentoe itap daerah ditetapkan oleh Menteri Keoeangan.
- 3). Boeat daerah di Djawa dan Madoera jang didoeoedki Tentara Asing, Menteri Keoeangan dapat menjimpang dari pasal 3 ajat 3.

**P a s a l 9.**

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari djoemoekannja.

JOGJAKARTA, 24 OKTOBER 1946.

*Presiden Repoebliek Indonesia,*

S O E K A R N O

*Menteri Keoeangan,*

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

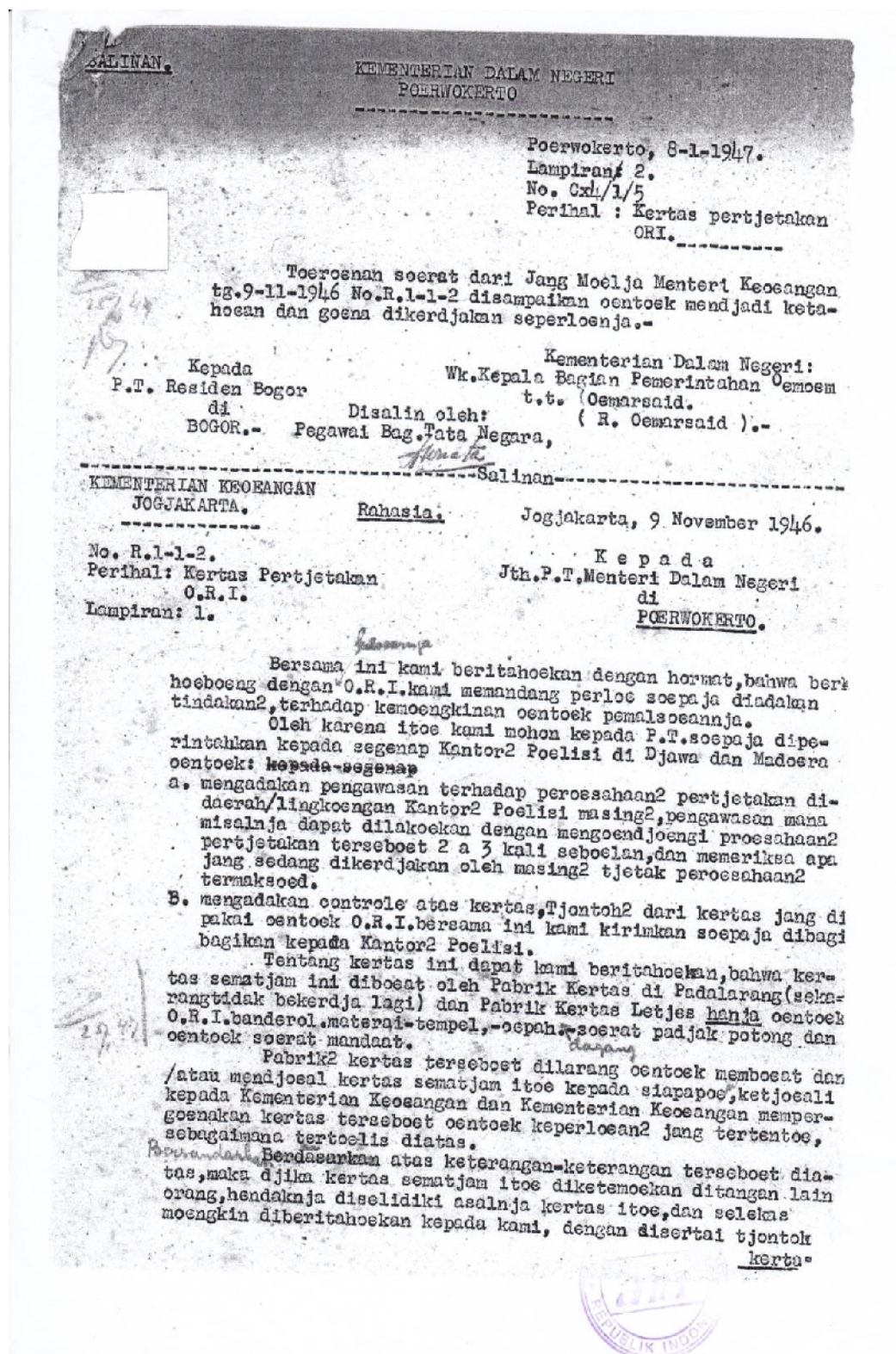
Djoemoekan pada tg. 26 OKTOBER 1946.

*Sekretaris Negara,*

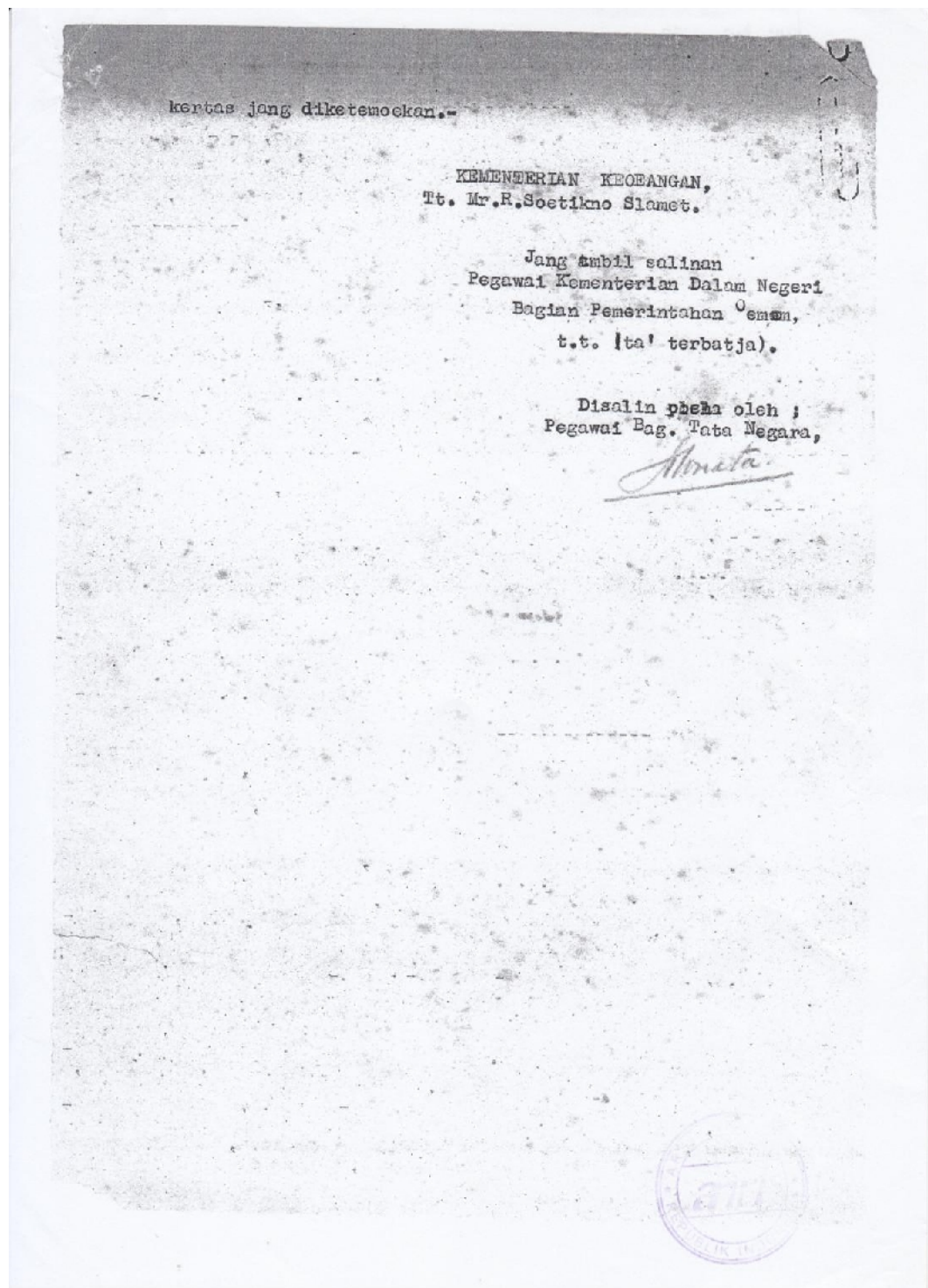
A. G. PRINGGODIGDO



Lampiran 2 : "Arsip Surat Kementerian Keoeangan: No. R.1-1-2/ Rahasia terkait dengan kertas percetakan ORI, 9 Nov 1946."

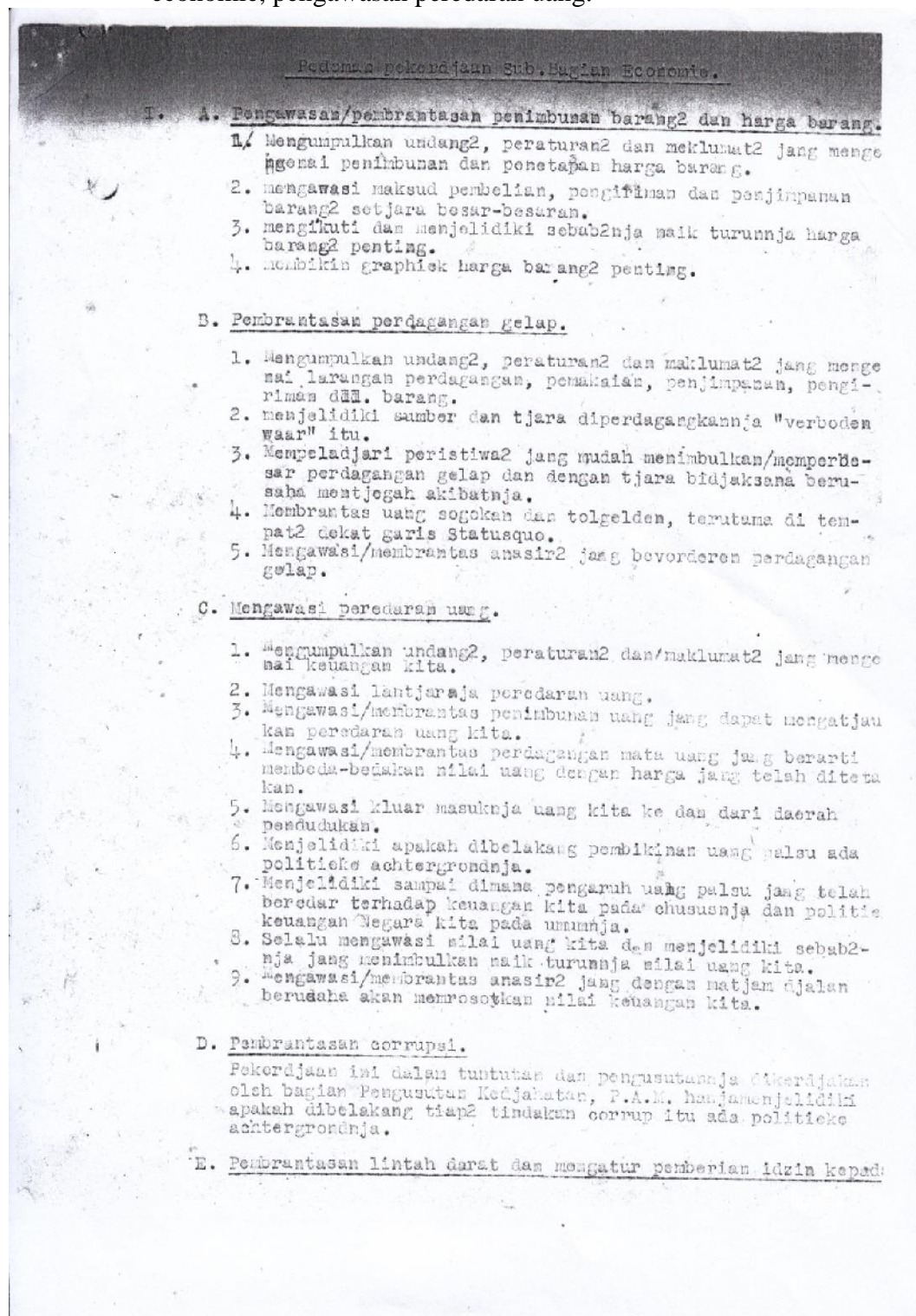






Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia

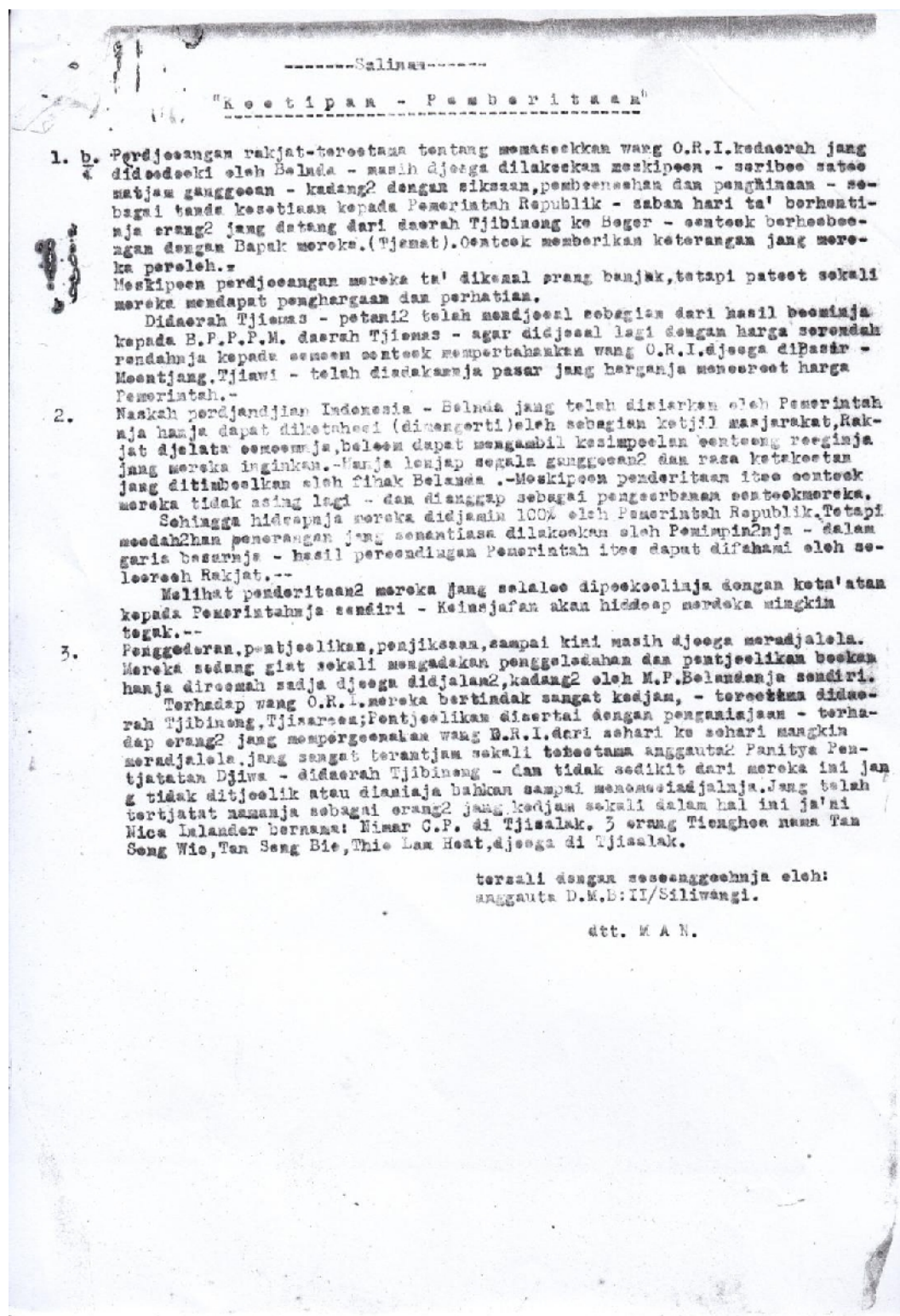
Lampiran 3 : "Arsip Jawatan Kepolisian Negara: Pedoman pekerjaan sub bagian economie, pengawasan peredaran uang."



Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia

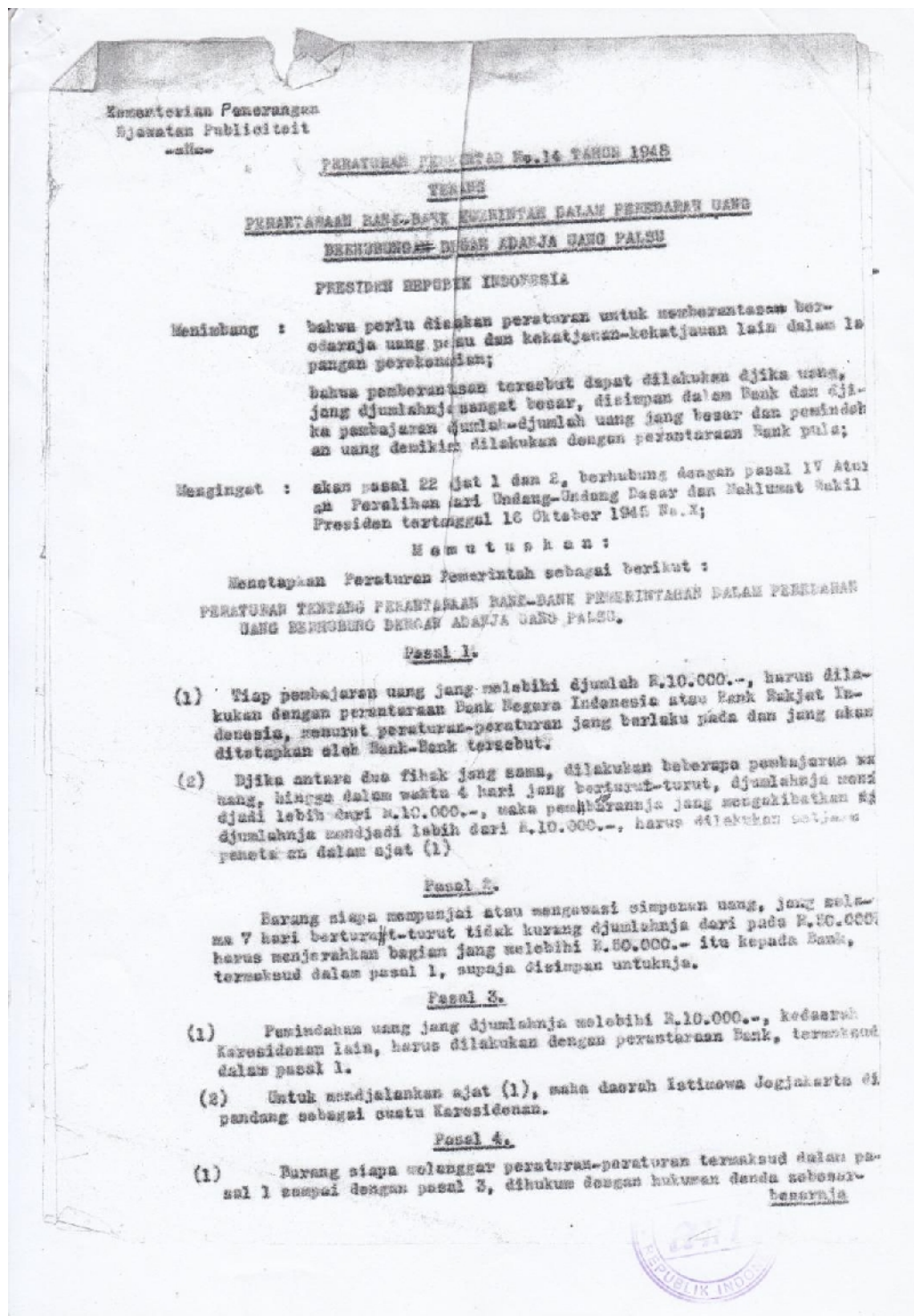


## Lampiran 4 : "Arsip Kementerian Dalam Negeri: Koetipan Pemberitahuan."





Lampiran 5 : "Arsip Kementerian Penerangan: Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1948 tentang perantaraan bank-bank pemerintah dalam peredaran uang berhubung dengan adanya uang palsu."



- 2 -

besar-besarnya R. 1.000.000.-, atau hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun.

- (2) Bayang siapa menerima pembayaran dari pihak yang melanggar pasal 1, di hukum dengan hukuman denda sebesar-besarnya R.1.000.000.-, atau hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun.
- (3) Perbuatan termaksud dalam ayat (1) dan (2), dianggap sebagai kejahatan.
- (4) Uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan termaksud, menjadi milik Negara.
- (5) Disamping pegawai-pegawai yang pada umumnya berhak menguasai kejahatan, maka yang berhak menguasai dalam pasal ini ialah pegawai-pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan pegawai-pegawai Dewan Pajak

Pasal 5.

- (1) Peraturan ini tidak berlaku bagi Kas-Kas Negeri dan Kantor-kantor Pos.
- (2) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 7 hari setelah hari pengumuman.

Disetujui di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Juni 1948.

MAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd (MOHAMMAD HATTA).-

MENTERI KEUANGAN,

ttd (A.A. MARSIS).-

Disetujui  
pada tanggal 23 Juni 1948  
MAKIL SEKRETARIS NEGARA,

ttd (SUKOMO).

P E N D I L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 14 TAHUN 1948

TENTANG

PERASTARAAN BANK-BANK PEMERINTAH DALAM PERSEDARAN UANG BERGUBUNG

DENGAN ADANYA UANG PALSU

Karena keadaan-keadaan sekarang, kita tidak dapat memberantas dengan sempurna masuknya uang palsu dalam daerah Republik. Umum mengetahui, bahwa dalam peredaran uang kita telah dapat uang palsu itu, sehingga merupakan bahaya yang perlu kita berantas dengan sekuat tenaga kita. / ter

Disamping usaha untuk memperbaiki kualitas alat pembayaran kita, maka perlu kiranya Bank-Bank Pemerintah mengawasi uang yang beredar di masyarakat. Dengan tjara demikian, maka mereka yang pada akhirnya menerima



- 3 -

uang, mendapat dijamin sebaik-baiknya bahwa uang yang diterima itu, ialah uang/bonar-bonar di beliankan oleh Pemerintah.

Penggunaan Bank ini dapat dilakukan, pertama kalinya jika pembayaran jumlah yang besar-besar, yang melebihi R. 10.000.- dilakukan dengan perantaraan Bank. Ini tidak berarti bahwa pembayaran yang ketjil-ketjil, tidak boleh dilakukan dengan perantaraan Bank-Bank. Maksudnya jumlah dari pada itu, bahwa Pemerintah mengundurkan supaya segala pembayaran, ketjuali yang dilakukan sehari-hari, dijalankan dengan menggunakan perantaraan Bank.

Jang harus menerima uang tidak perlu cewa-tir, bahwa uang pembayaran tersebut akan dibeku atau bahwa ia akan mendapat kesukaran lain, misalnya menunggu lama dan sebagainya. Jika uang pembayaran ini dibutuhkan dengan segera oleh jang berhak menerima, maka pembayaran tersebut akan segera dapat diambil olehnya. Bank hanya membutuhkan waktu/menghitung jumlahnya, mengawasi bahwa tidak ada uang/diantarannya dan melakukan pembukuan seperlunya. Hanya jika uang itu tidak perlu digunakan dengan segera, maka dapat diundurkan supaya ditinggalkan sementara saja pada Bank.

Tiap waktu, jika uangnya itu dibutuhkan, maka dapatlah jumlahnya diambil dari Bank.

Tetapi, jika uang itu hanya dibutuhkan untuk melakukan pembayaran yang besar maka pembayaran demikian ini hendaknya dilakukan dengan perantaraan Bank lagi.

Untuk menghindarkan bahwa ada orang yang dengan sengaja hendak melepaskan diri/kewajiban ini, dengan membagi-bagikan pembayarannya, sehingga tiap kali tidak melebihi R. 10.000.-, maka diadakan peraturan menurut pasal 1 ayat (E). Misalnya, orang A pada hari Rebo membayar kepada orang B jumlah R. 5.000.-, pada hari Sabtu ia membayar lagi R. 5.000.-, pembayaran yang akan kedua kalinya ini harus dilakukan dengan perantaraan Bank, oleh karena dua pembayaran kepada orang yang sama, yang dilakukan dalam waktu 4 hari ini, melebihi R. 10.000.-

Kedua kalinya, Pemerintah hendak membatasi penjiplakan uang yang besar-besarnya jumlah nya, jika tidak perlu. Juga peniunban uang demikian hanya membesarkan bahwa uang palsu, dan juga memajukan perekonomian.

Jika pada suatu waktu uang yang banyak itu dibutuhkan, misalnya untuk pembayaran gaji atau pembayaran-pembayaran lain, maka dapat diambil jumlah simpanan itu dari Bank. Hanya sahaja pembayaran-pembayaran itu hendaknya diselesaikan selama 7 hari, dan jumlah simpanan, yang melebihi R. 50.000.-, dikembalikan lagi dalam Bank.

Ketiga kalinya, pembawaan uang yang jumlahnya berpuluh-puluhribu atau lebih, dalam perjalanan, dipandang pula sebagai suatu hal yang harus diperhatikan.

Pengindahan uang se banyak itu hendaknya juga dilakukan dengan perantaraan Bank.

Jika peraturan-peraturan ini, yang sebenarnya sudah dapat ditaraf oleh umum, dijalankan sebaik-baiknya, maka Pemerintah dapat bantuan yang sebaik-baiknya dalam usahanya memberantas bahwa uang palsu dan keketjauan lain-lain dalam perekonomian.

Untuk menghindarkan, bahwa peraturan-peraturan ini diabaikan saja, maka diadakan beberapa antijaman hukuman.

Dari semua golongan dalam masyarakat, pedagang, pegawai, jawatan djaatan, anggota Tentara dan Badan-badan, diminta bantuan terutama ja mereka sendiri menjalankan peraturan ini dengan sempurna.

Sekedar kesukeran, yaitu berhubungan dengan Bank djaatan demikian perlu hendaknya djaangan dipandang sebagai kawatiran besar.

perlu menjaga/perekonomian dalam Negara.

L. Islamatu

000000



Lampiran 6 : "Arsip Jawatan Kepolisian Negara: No. 358/T.O./33/2/R/E terkait pembawaan ORI baru dari daerah pendudukan."

Kantor Polisi Kabupaten  
Bojoleali

No. 358/T.O./33/2/R/E.  
Lamp: 1.  
Hal : Pembawaan O.R.I. baru  
dari daerah pendudukan.

Bojoleali, 30 Januari 1948.

Diaturkan  
Jth. P.Tw. Kepala Kepolisian Negara  
di  
Jakarta

"Mardaka"

Dengan ini mengatitkan surat tembusan dari Kantor Polisi  
Negara Kabupaten Bojoleali ttg. 30-I-1948 No. 358/T.O./33/2/R/E yang  
diaturkan ke Kantor Kepolisian Karssidenan Surakarta.  
... Berhubung dengan surat P.Tw. 9-I-1948 No. Pol/1200/A/VI/Reh/  
P.A.M. akan mandjadi periksa.

Kepala Polisi Negara Kabupaten Bojoleali  
(Tjiptopranoto)

DJAWA  
AG. No. 49/1/15  
Tanggal 4/2/48

Kantor Polisi Kabupaten  
Bojoleali

No. 358/T.O./33/2/R/E.  
Lamp: -  
Hal : Pembawaan O.R.I. baru  
dari daerah pendudukan.

Bojoleali, 30 Januari 1948

Diaturkan  
Jth. P.Tw. Kepala Kepolisian Karssidenan  
di  
Surakarta

"Mardaka"

Berhubung surat P.Tw. ttg. 26-I-1948 No. 90/R/Tk/16/R  
tentang pengawasaan pembawaan wang O.R.I. dari daerah pendudukan,  
saja mahun petundjuk:  
Dengan djalan bagaimana Bojoleali bisa mengadakan pengawasaan  
jang saksama dengan kekutan Polisi jang ada pada waktu ini.

Kepala Polisi Negara Kabupaten Bojoleali  
(Tjiptopranoto)

Jang mengambil turunan

Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia





urutan.

Dampit, 6-5-1948.-

No. 29/Pam.

Perihal: Tabel U.R.I. yang resmi,  
( dari seratus rupiah hidjan ).

" M E R D E K A "

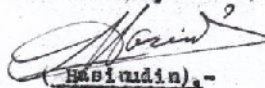
S i g n a .

Dengan hormat kami mengemukakan sebuah pelapuran tentang hal, tersiarja tabel seri letter ORI yang resmi pada pedagang sebagai berikut;  
Di Dampit telah terdapat pada pedagang tabel seri letter ORI resmi, (sebagai mana t jontoh terlempir). Adapun tabel tersebut telah 4 buah yang telah kami tahan untuk sementara sebelum mendapat keputusan dari pihak atas. Pedagang tersebut diantaranya menaraungkan mendapat dari siaran radio K.I. 15 hari yang telah lalu (gelombang tidak diterangkan). Dari pedagang Tienghwa menaraungkan itu didapatnja dari seorang Polisi dari Solo, lainnya dari pegawai Polisi yang tidak dikenal.-  
Akibat dari hal tersebut diatas, umum selalu ragu-ragu menerima U.R.I. (dari R.100,- yang hidjo. Selanjutnja kami mohon dengan segera keputusan tentang hal tersebut diatas, apakah itu memang resmi atau diperbolehkan (karena keresmian belum ada, terutama dari kepolisian sendiri.).  
Kesimpulan kami, hal ini sangat berbahaya kalau tabel tersebut dibawa ke daerah pendudukan.-  
Kemudian untuk menjadikannya periksa, dan mohon dengan hormat keputusan Padata Ruan.-

Kepala Polisi Dampit.

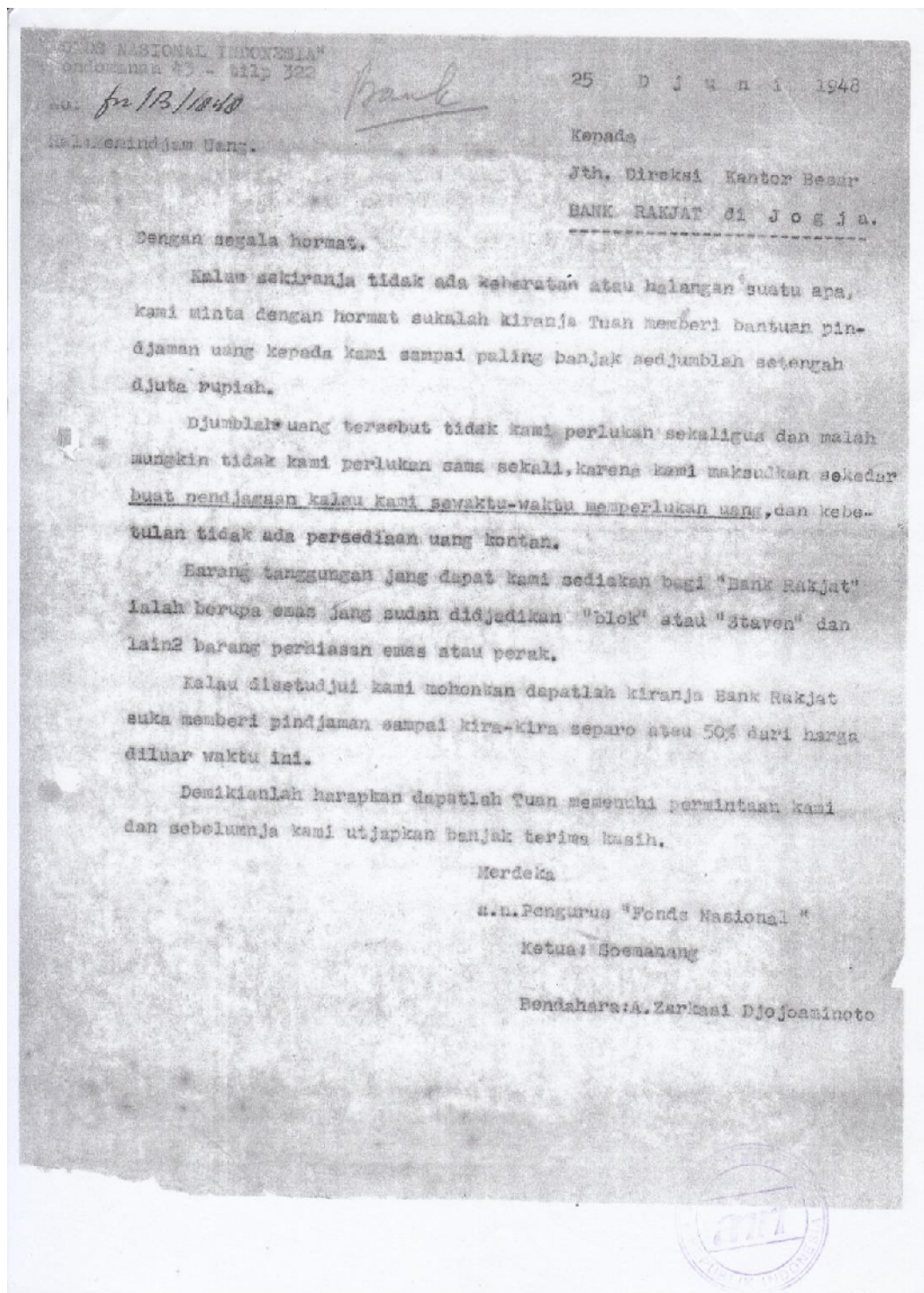
Kep. Bag. P.A.M.,

( tt. Moch. Utama ).

Yang mengambil  
turunan,
  
(Hasiudin).-

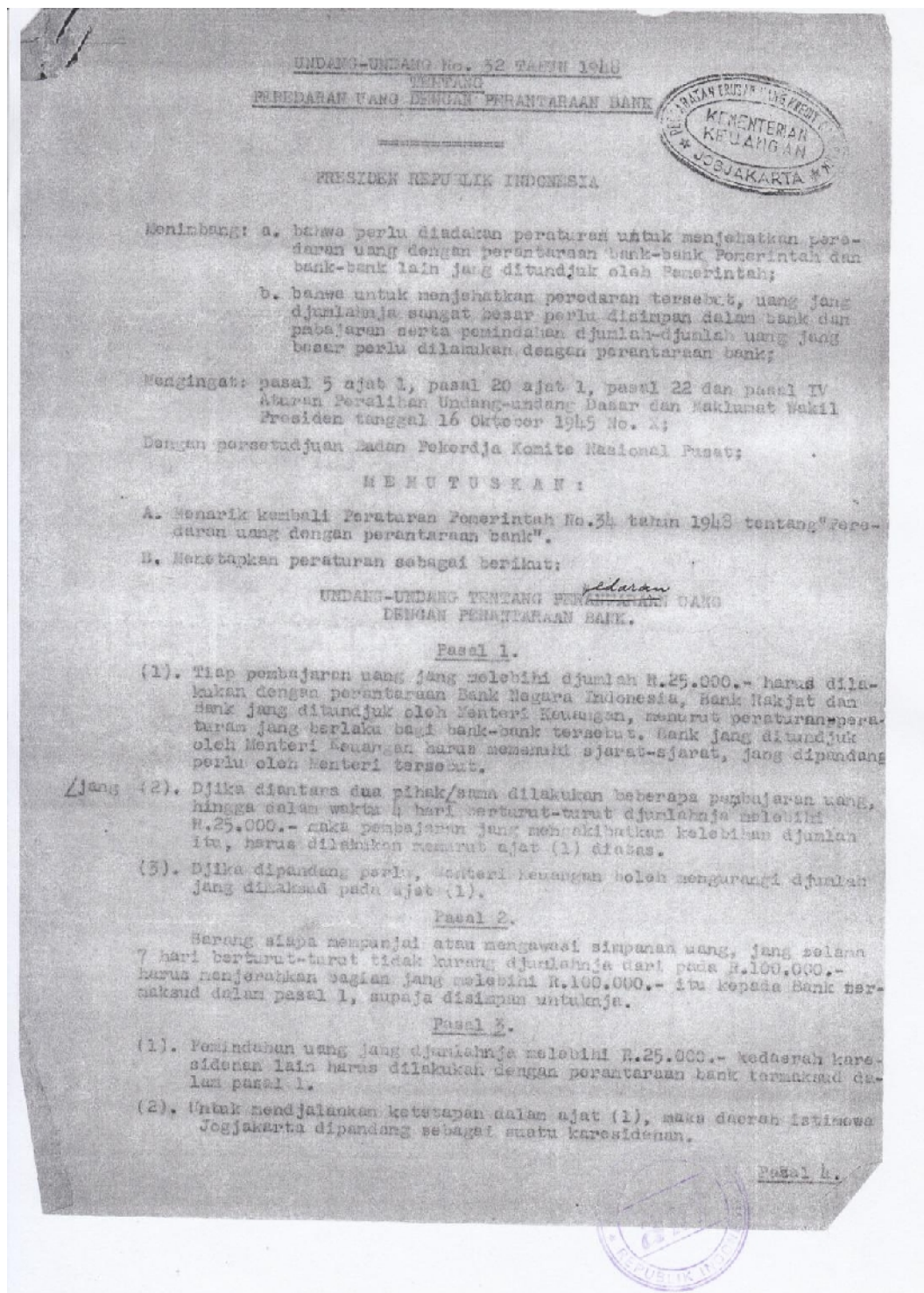


Lampiran 8 : "Arsip Kementerian Dalam Negeri: terkait dengan peminjaman uang kepada Bank Rakjat di Jogja, 25 Juni 1948."



Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia

Lampiran 9 : "Arsip Kementerian Penerangan: Undang-undang No.32 Tahun 1948 tentang peredaran uang dengan perantara bank."





- 2 -

Pasal 4.

Sampai saat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka peraturan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 tidak berlaku untuk daerah karesidenan Malang dan pasal 3 ayat (1) tidak berlaku untuk pemindahan uang ke atau dari daerah karesidenan tersebut.

Pasal 5.

- (1). Barang siapa melanggar peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3, dihukum dengan hukuman denda sebesar-besarnya R 1.000.000.- atau hukuman penjara selamanya 1 tahun.
- (2). Barang siapa menerima pembayaran dari pihak yang melanggar pasal 1 dihukum dengan hukuman denda sebesar-besarnya 1.000.000. atau hukuman penjara selamanya 1 tahun.
- (3). Perbuatan termaksud dalam ayat (1) dan (2) dianggap sebagai kejahatan.
- (4). Uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut ditetapkan menjadi milik Negara.
- (5). Disamping pegawai-pegawai yang pada umumnya berhak mengusut kejahatan, maka yang juga berhak mengusut kejahatan dalam pasal ini ialah pegawai-pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan pegawai-pegawai Djawatan Pajak.

Pasal 6.

Undang-undang ini tidak berlaku bagi Kas-kas Negeri, Kantor-kantor pos dan Bank-bank yang termaksud dalam pasal 1.

Pasal 7.

- (1). Undang-undang ini mulai berlaku bagi Djawa dan Madura pada hari diumunkan.
- (2). Hari berlakunya buat daerah lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Jogjakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1948

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.

(SOLKARSO)

MENTERI KEUANGAN s.i.

t.t.

(Mohammad Hatta).

Diumumkan  
pada tanggal 30 Oktober 1948

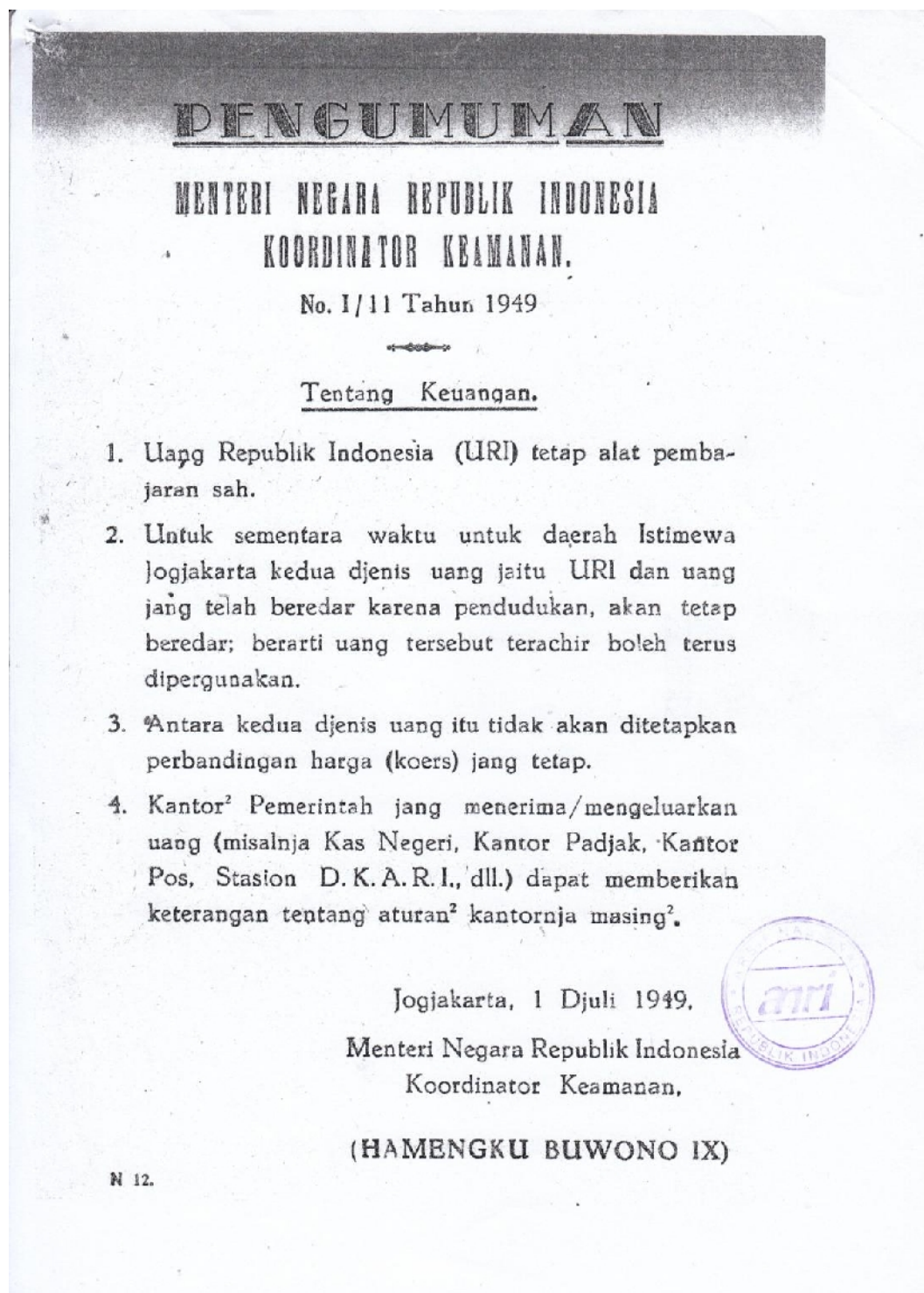
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*Sekretaris Negara*  
t.t.

A.G. Pringgodigdo.

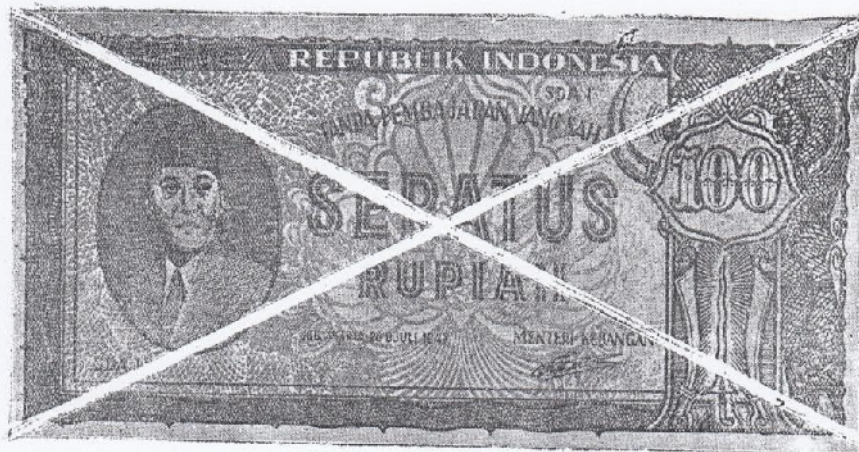


Lampiran 10 : “Pengumuman Menteri Negara RI Koordinator Keamanan No.1/11 tahun 1949 tentang uang RI (URI) tetap sebagai alat pembayaran yang sah, Juli 1949.”





Lampiran keputusan Menteri Keuangan  
tg. 26 Djoeli 1947 No. Kob. 13 - 28 - 10.



Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia

Lampiran 11 : "Arsip Syafruddin Prawiranegara No. 1 tentang Majalah Sikap: Dua tahun uang Republik Indonesia."





# Dua tahun uang Republik Indonesia

Salah satu tidaklah salah jika kita katakan, bahwa usaha penyelamatan keuangan Negara, yang dilakukan Pemerintah Republik, dalam dua tahun yang telah berlalu, adalah salah satu usaha Negara yang sungguh-sungguh dapat kita banggakan terhadap kemajuan dijumpai. Malah saja tidak dapat mengemukakan, bahwa pada masa pemerintahan Republik untuk penyelamatan keuangan Negara terhadap rakas, semendaki berdirinya Negara yang terancam, adalah terdapat pada waktu mulai beredarnya uang Republik Indonesia dalam tahun November 1946. Batang air yang akan kemulian-keselamatan, telah diteliti dalam tahun pertama berdirinya Republik, serta mengemukakan bahwa banknya, perbandingan yang perlu bagi penyelamatan keuangan itu, tentu memberikan pendapat, saja ini. Berhubung hal ini Negara kita mengadakan "bahuja staatsbankroet" karena bank-bank yang beredar, sedangkan sedikit sekali yang dapat dikuasai Pemerintah, padahal terlampau banyak bank yang harus dikeluarkan dari peredaran dengan suasana politik yang tidak pada waktu itu. Soal ini harus diperjelaskan pertama-tama ialah menarik semua uang yang beredar dari peredaran dengan cara yang sedikit sekali menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan mengantinya dengan uang baru, yang mempunyai harga tinggi serta dapat diawasi peredarannya. Dengan jalan pekerjaan inilah yang kemudian dapat diteruskan Pemerintah Republik dengan cara yang dapat kita pahami, lebih-lebih karena kita ingat akan masa-masa perjuangan kesatuan yang diadakannya dalam perjuangan.

Pengeluaran peredaran uang yang dapat diawasi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dengan cara yang tidak diberi nilai yang sama, sebagaimana misalnya yang terdapat di Singapura. Tjara yang demikian itu mungkin akan dapat menolong masyarakat, terdapat dalam masa ini, dan mengancam perekonomian. Karena itu pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menarik kembali uang yang beredar dari peredaran dengan cara yang dapat kita pahami, lebih-lebih karena kita ingat akan masa-masa perjuangan kesatuan yang diadakannya dalam perjuangan.

malah gadai, ketjuali jumlah yang dikeluarkan, yang dibataskan untuk keperluan sehari-hari atau untuk melandjutkan perusahaan. Pada saat uang Republik mulai berlaku sebagai alat pembayar yang sah, semua yang tunai sudah tersimpan di tempat-tempat penjemputan tersebut, ketjuali yang sejumlah f 50 bagi setiap orang penduduk buat keperluan hidup sehari-hari. (Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tg. 5 Juli 1946 No. 5, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang tg. 1 Oktober 1946 No. 15, putusan-putusan Menteri Keuangan tg. 4 dan 9 Oktober 1946 No. 58122 dan No. 58123). Pekerjaan yang terlampau banyak itu dapat dilaksanakan dengan beres, berkat kegiatan pegawai kantor-kantor yang terangkakan, dibantu dengan penerangan kepada rakyat oleh Kementerian penerangan dan pemang-prajaja.

Angka-angka dibawah ini dapat menggambarkan barangknya uang Djepang yang beredar di Djawa dan Madura. Pada saat mulai berlakunya uang Republik, jumlah uang Djepang yang:

a. disimpan di bank - bank tersebut di atas	f 1.892.632.826,76
b. ada dalam kas kantor-kantor Pemerintah	264.915.900,—
Jumlah	f 2.157.548.726,76

Jumlah tersebut harus ditamabahkan dengan jumlah f 50 buat setiap orang penduduk untuk keperluan sehari-hari, yang tidak perlu dicatorkan menurut peraturan-peraturan diatas.

Adapun pengeluaran Uang Republik Indonesia didasarkan pada Undang-Undang tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia (I) (undang-undang tg. 10 Oktober 1946 No. 17), yang menjerahkan dasar nilai dan penukaran serta tindakan-tindakan lain mengenai uang itu kepada undang-undang lain, dan hal-hal yang mengenai pengeluarannya kepada Menteri Keuangan. Dalam Undang-Undang tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia (II) (undang-undang tg. 24 Oktober 1946 No. 19) ditetapkan sebagai dasar penukaran, buat Djawa dan Madura f 50 uang Djepang disamakan dengan R 1 uang Republik, buat Sumatra f 100 uang Djepang disamakan dengan R 1 uang Republik. Untuk memenuhi kepentingan orang yang berhutang maka ditetapkan, bahwa pembayaran segala hutang yang belum dibayar lunas pada waktu berlakunya uang Republik, dilakukan dengan dasar perhitungan, yang berlainan

menurut waktu terjadinya hutang, yaitu buat hutang terjadi sebelum tg. 1 Januari 1943 : 1 uang sah sebelum uang Republik berlaku, disamakan dengan R 1 uang Republik; buat hutang terjadi di pada tg. 1 Januari 1943 atau sesudahnya tetapi sebelum tg. 1 Januari 1946, dasar perhitungannya f 20 = R 1; buat hutang terjadi di pada tg. 1 Januari 1946 atau sesudahnya f 50 = R 1. Pada dasar perhitungan ini disesuaikan dengan perbedaan nilai uang pada masa yang bersangkutan.

Selanjutnya ditetapkan dalam undang-undang tersebut, bahwa sebagai dasar nilai diterbitkan 10 rupiah uang Republik, Indonesia sama dengan emas murni berat 5 gram. Peraturan ini dianggap perlu untuk memberi dasar, bahwa yang tetap kepada uang baru itu, dan apabila perlu untuk mengadakan dasar perhitungan yang tetap terhadap uang asing.

Uang Republik Indonesia menurut putusan Menteri Keuangan tg. 29 Oktober 1946 No. 58135 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada tg. 29 malam 30 Oktober 1946 jam 12. Pada waktu itu, Djepang menarik semua uang yang Djepang dan uang Belanda-Belanda (tidak berlaku lagi di Djawa dan Madura). Dengan demikian saat tersebut U.R.I. menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah diberes Republik di Djawa dan Madura. Di samping peredaran uang tersebut, karena kesukaran-kesukaran dalam keuangan teknik dan politik (ketjutan mendapatkan pengangkutan dan mendjamah keamanannya), tidak dapat diadakannya dengan segera. Sebagaimana diketahui, daerah itu yang Djepang masih terus berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, disamping uang Belanda (Uang Republik Indonesia untuk Provinsi Sumatra), yang kira-kira pertengahan tahun 1946.

U.R.I. pada permulaan dikeluarkan dalam komposisi: R 100, R 10, R 5, R 1, R 0,50, R 0,10, R 0,05, dan R 0,01. Peredaran itu dimulai dengan membagikan uang kepada segenap penduduk sejumlah 10 rupiah seorang, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tentang pengeluaran tersebut diatas, sebagai pengganti uang Djepang yang tidak perlu dicatorkan, yaitu sebesar f 50 seorang. Adapun penukaran uang Djepang yang telah disimpan ditabung-bank, dapat dilakukan ditabung Negara dan bank rakyat. Menurut undang-undang tadi, tidak diadakan penukaran buat uang Belanda-Belanda Tindakan yang diambil Pemerintah terhadap uang ini adalah untuk mendajak, supaya uang tersebut tidak dipergunakan sebagai alat pembayaran disamping uang Re-

publik. Dengan demikian, uang Belanda-Belanda yang telah disimpan pada waktu sebelum 1947, menurut peraturan yang ditetapkan pada waktu itu, sebagai alat pembayaran yang sah, tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Likuidasi bank-bank yang telah ditutup, dan uang yang telah disimpan pada waktu sebelum 1947, menurut peraturan yang ditetapkan pada waktu itu, sebagai alat pembayaran yang sah, tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, uang Belanda-Belanda yang telah disimpan pada waktu sebelum 1947, menurut peraturan yang ditetapkan pada waktu itu, sebagai alat pembayaran yang sah, tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Pengeluaran uang yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sebagai dasar nilai diterbitkan 10 rupiah uang Republik, Indonesia sama dengan emas murni berat 5 gram. Peraturan ini dianggap perlu untuk memberi dasar, bahwa yang tetap kepada uang baru itu, dan apabila perlu untuk mengadakan dasar perhitungan yang tetap terhadap uang asing.

Sudah banyak yang telah diketahui, bahwa uang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dalam dua tahun yang telah berlalu, adalah salah satu usaha Negara yang sungguh-sungguh dapat kita banggakan terhadap kemajuan dijumpai. Malah saja tidak dapat mengemukakan, bahwa pada masa pemerintahan Republik untuk penyelamatan keuangan Negara terhadap rakas, semendaki berdirinya Negara yang terancam, adalah terdapat pada waktu mulai beredarnya uang Republik Indonesia dalam tahun November 1946. Batang air yang akan kemulian-keselamatan, telah diteliti dalam tahun pertama berdirinya Republik, serta mengemukakan bahwa banknya, perbandingan yang perlu bagi penyelamatan keuangan itu, tentu memberikan pendapat, saja ini. Berhubung hal ini Negara kita mengadakan "bahuja staatsbankroet" karena bank-bank yang beredar, sedangkan sedikit sekali yang dapat dikuasai Pemerintah, padahal terlampau banyak bank yang harus dikeluarkan dari peredaran dengan suasana politik yang tidak pada waktu itu. Soal ini harus diperjelaskan pertama-tama ialah menarik semua uang yang beredar dari peredaran dengan cara yang sedikit sekali menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan mengantinya dengan uang baru, yang mempunyai harga tinggi serta dapat diawasi peredarannya. Dengan jalan pekerjaan inilah yang kemudian dapat diteruskan Pemerintah Republik dengan cara yang dapat kita pahami, lebih-lebih karena kita ingat akan masa-masa perjuangan kesatuan yang diadakannya dalam perjuangan.

1947 No. 17















Lampiran 12 : "Soemanang, "Oeang Repoeplik", dalam *Kedaulatan Rakjat*, 28 Oktober 1946."

## OEANG REPUBLIK.

Oleh: Mr. Soemanang.

**D**ENGAN tidak panjile soca atau kesoekaan (yang menarik perhatian, kemahin oeang Repoeplik soedah dibadzikan dan soenentara waktoe soe akan moelia berloekoe sebagai alat pembalajaran yang sah dari ber-... teknik yang se-... soedah soedah la-... Mr. Soemanang, soe, soedah kita ingatkan djoega apa yang kemarin soedah kita se-... soedah itoe. Jaitoe dalam keadaan yang tidak berbeda dari pe-... dengan alat pengangkoean atau alat penghoeboeng yang ser-... koerang, dengan bank-bank yang boleh dikata masih sederhana, dengan pegawai-pegawai yang soedah lelah karena kebanjakaan pekerjaan, kemarin itoe kita telah bisa menyelesaikan pembagian oeang di seloetoe pulau Diawa dan Madoera yang kelak akan disoeloe-... oleh lain daerah tanah air kita. Dari Banten sampai Banjoe-... dari kota besar sampai desa yang seketil-kecilnya, deman se-... rantak oeang kita kemarin telah dibagi-bagikan.

Tahעתה pembatja berapa ban-... system dan organisasi yang diperloekoean boeat pekerjaan ter-... soebot diatas? Dan berapa besar keperitjaan dan kedoeoedoean yang diperloekoean? Sebab kalau dalam oeang ini bangsa kita tidak mempunyai sifat-sifat yang boleh dihanggalkan, seloem oeang bisa ditetap barangkali organisasi keoeangan kita soedah dikatja-... kan ditengah djalan.

Di tengah-tengah korupsi atau ketjoerangan yang sebagai akibat perang sekarang menjadi penjaki-... doenia oemoem — djoega di ka-... lan Belanda — ada bakenja ki-... ta peringat akan pekerjaan vakas sekitar oeang republik yang sebagian soedah kita selesaikan itoe.

Memang kalau kita tjoea ingat kesoelitan dan kesoekarannya sa-... dja, barangkali kita tidak heran mengeloerakan oeang republik kita sendiri, malahan baroe memikir-... kan saaja moengkin soedah ..... takoeit.

Dalam beberapa hal moengkin kita nanti susah rabu atau keliroe dengan segala akibatnya yang tidak enak, tetapi apakah itoe haroes kita takoeit? Kalau kita takoeit salah, takoeit ini, takoeit itoe, lebih baik kita tidoe saja daripada repot-repot memikirkan kemerdekaan negara kita.

Memang soenggoeh benar, ban-... koeoelitan yang masih kita hadapi sekitar oeang republik Boe-... kon sekali-kali maksoed kita men-... gijikan keoeangan itoe, akan tetapi, sebaliknya djoenganlah poe-... ta dibesar-besarkan soemoanya itoe, seakan-akan kita takoeit akan balangan kemerdekaan kita sendiri.

Dengan keloearnya oeang repu-... blik keadaan perekonomian kita tidak bisa dan tidak moengkin menjadi baik sekaligus. Berta-... hoen-tahoen kita masih akan menghadapi kesoekarannya. Akan te-... tapi soenggoehpoen begitoe, kita haroes membesarkan hati rakjat kita. Disamping kesadaran akan keadaan yang riel, akan kema-... an sehari-hari yang soenggoeh ti-... dak gampang itoe, dengan keloe-... nya oeang republik masa keme-... dekaan negara kita menjadi le-... bih lengkap.

Kebanggaan dan keperitjaan in-... lah yang haroes kita poepoeit me-... bab oeang boekan saaja meroepa-... kan soal ekonomi atau soal poli-... tik, akan tetapi yang djoega soal psikologie, soal jiwa, soal hati dan soal keperitjaan rakjat.

Keperitjaan rakjat, inilah uang pertama dari keoeangan negara."

★

Dan keperitjaan rakjat ini nja-... ta ada. Maka sekarang diminta ke-... bidaksanaan dan ketjakaan dari kita sekalian oentoek memeli-... hara dan mengembangkan keper-... itjaan itoe. Nica atau Belanda yang tjoea mendoedoeki daerah keril saaja dengan jaitnia yang serba lengkap dan dapat mena-... tangkan berbagai barang impor, njata soesan mendjaga harga oeangnja.

Di negeri Belanda sendiri orang soedah moelia menjela dan meng-... kritik Liefink, menteri keoea-... ngan, sebab hasil politik keoeangan Belanda njata tidak seperti yang diharapkan soemoela. Salah sa-... toe sebabnja ialah karena Belanda terpaksa meneroeakan begroeting perang oentoek membeal tentara yang dikirimkan dan jait soedah ada disini.

Djoega Pemerintah kita meng-... hadapi soal yang sama, akan tetapi karena keperitjaan rakjat kita itoe tadi, insja Allah kita akan menang.

★

Tanggal 17 Agustus taheen yang laloe Kemerdekaan Indonesia di-... njatakan, ..... dalam soesana yang agak lesoe, ..... tetapi keperit-... jaan rakjat telah dapat mero-... bah keadaan sehingga mengem-... parkan doenia.

Sedjak tg. 17 Agustus itoe Pe-... merintah kita tidak mempoenjai oeang melainkan tjoea sedikit saaja yang teresida dalam Ponds Kemerdekaan. Modal kita hanja-... lah, ..... keperitjaan!

Baroe lambat laen pemerintah kita mendapatkan soember oeang dari sedikit demi sedikit, akan te-... tapi bagaimanapoen djoega ban-... yak ahli negara, ahli ekonomi dan ahli oeang akan koplak ke-... pala memikirkan bagaimana Pe-... merintah Republik Indonesia bisa tahan begitoe lama zonder mem-... poenjai keoeangan sendiri yang tjoeoep.

Sebab meneroeit perhitoean theorie atau keadaan biasa, Re-... publik Indonesia moestinja haroes soedah lama djatoeh ban-... koeit atau pailiet serta mandek sama sekali pemerintahnja ka-... rana kehabisan oeang.

Tetapi apa yang kita lihat? Boe-... kan bankroet atau pailiet, tetapi njata sekali bertambah-tambah ko-... kol dan teraloer. Soemoa itoe ka-... rna didorong dan didjoendjoeng oleh keperitjaan.

Demikianlah dalam hal oeang republik kita itoe, kita jukir ba-... hwa aduarnya kita bisa menjapai apa yang kita harapkan, walau-... poen, ..... disana sini soedah ba-... rang tentoe serjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Sebab saat keloearnya oeang republik me-... mang tidak begitoe mengoen-... toengkan. Kalau oeang republik keloeat pada waktoe pauen misa-... lnia, tentoe keadaan akan sedikit lain.

Tetapi soekar atau tidak, oeang republik haroes dan moesti ke-... loear. Lebih lekas oeang republik kita dilakoekan dan oeang Dje-... pang dimatikan, lebih baik.

Memang banyak kesoekarannya yang masih akan kita hadapi dan ka-... rna itoe pengelolaan oeang Repoe-... blik ini djoega menjadi peritjaan

kekeoefan negara kita. Maka kita soemoa yang tjinta kemerdekaan, tjinta tanah air dan tjinta rakjat kita, marilah kita letakkan baboe kita dibawah beban yang berat itoe.

Negara-negara lain yang seka-... rang soedah damai dan mempo-... nja import dan export, masih memperloekoe tempo yang berta-... hoen-tahoen oentoek menghekan keoeangan negara. Apa ingit kita.

Akan tetapi pengalaman kita de-... ngan oeang Dje pang yang disabar dengan begitoe royak dengan ta-... da perhitoean atau tanggong dijawab terhadap rakjat, njata be-... loem begitoe memoenjak kegon-... tjaan ekonomi atau inflasi yang disebarkan olehnya kalau diban-... ding dengan lain2 negeri.

Pengalaman itoe bisa memberi ketenangan kepada kita bahwa djoega oeang republik akan me-... dapikan djalan yang baik dan boleh kita sambot dengan opti-... misme yang pantas. Ketjakaan atau keketjawaan yang moesti ter-... jadi disana-sini haroes kita te-... rima sebagai risiko atau beaja. Da-... lam hal itoe kami harap kebijak-... sanaan dan kesabaran serta sou-... pleese yang sangat besar dari dja-... watan2 Negeri kita, oentoek mem-... perbaiki-nja dimana moengkin.

Soesoenan masjarakat kita mem-... poenjai tenaga-tenaga terseboe-... ni yang oet yang tidak dikira-ki-... ra. Berbagai poekoelan ekonomi dalam waktoe yang lampau diteri-... ma oleh masjarakat dan rakjat ki-... ta dengan keoeatan yang loer biasa. Begitoe djoega dalam ke-... soelitan sekitar oeang republik, be-... sar keperitjaan kita akan tena-... ga bangsa dan masjarakat Indo-... nesia oentoek mengsoesalkan diri dalam keadaan baroe.

Marat yang teroeama inilah, kita haroes bekerta keras memperbe-... sar produksi dan memperbaiki di-... tribusi kita. Andjoeran bertjoek-... tanam buliklah sekarang dihidoe-... kan lagi. Roekoen tetanga seba-... ga perantara distribusi atau kontroler perloe lekas disoesoen kembali. Dan dimana moengkin kita haroes membatasi pengelo-... aran kita, soepaja bisalah kita ber-... lakoe schemat-hematnja yang be-... lakangan ini moengkin agak soe-... kar, sebab sebagai warisan Dje-... pang banyak diantara kita yang soedah bisa mengeloerakan oeang dengan royak.

Boekan dengan pidato yang ber-... api-api, tetapi dengan disiplin dan kedjoerjoeran dan kening yang bertjoerjoeran kita bisa memban-... toe memperkoet keoeangan ne-... gara.

Hari Selasa tg. 23-X-1946  
djat 2 siang penghabisan  
bagi peroesahan-peroesahan  
menjuman oeang di Bank2

### Gerakan pemoeda serentak.

Jogja 28-10.

**B** ADAN Kongres Pemoeda Se-... loeroeh Djawa di Madoera ke-... marin dalam konferensinja ta-... lah memoeloeskan oentoek me-... gadakan gerakan pemoeda seren-... tak yang akan menjerboe ke pe-... losok2 soema memberi penerangan kepada rakjat, membebas pe-... nempoelan padi oentoek India dila-...

Selanjutnja dipetoekan poe-... la bahwa selambat-lambatnja tg. 3 November ini pasokan2 jag-... tak itoe telah siap oentoek mene-... noeti kewadibanta

Pidato Wakil Presiden pada tgl. 29 Okt.

Dengan beradanya orang Republik menjelang masa pendidikan, pembinaan masa baris akan memberikan tajaan, bimbingan pendidikan kepada penghijrahan Boenggoepoen barangtandi dan pendayagunaan sosial di dalam berbagai paksaan, melalui tjoekop sentang mengadapi barisan roepiah Republik, sidi raijat kita tjoekop mengadapi disiplin roepiah solidartid, tidak terosot menanti koontingensi diri sendiri, pengeloaan orang Republik ini mendajam penghijrahan yang bebas dari pendidikan.

Gadji dan oepah pegawai

[illegible][illegible]

Hoepiah, Repoeblia membawa denda  
sebaiknya nash Put Tari.

[illegible]

tang perjuangannya: „Apa sebab tidak lebih dhoronis dikeluarikan orang nepoblik?“ Kalau orang nepoblik lekas-lekas dikeluarikan, rakyat tidak selama itu menderita kesengsaraan“

[illegible]

Awas moesang dan serigala!  
Tetapi pandanglah koertase dan  
eritaan dimana jang baroe lampir

## Pertemoean dengan Menteri Pertahanan

PALEMBANG, 29-10 (ANTARA)

Monteur Perumahan Mr. Amir R. Soedidin pada tg. 27-10 jam 22.00 diadakan pertemuan di Panti Pengasih Cemoan Palembang yang dihadiri oleh kira2 1000 orang dari kalangan kepolisian, tentara, pemuda, pemuda, badan2 organisasi dan badan perlindungan rasia.

Kesokan harinya jam 09.00 Menteri Perairan memberi wejangan dan penerangan terhadapan orang-orang pilak kalangan tentara Belanda di Indonesia. Tg. 28-10 jam 10.30 belia berangkat dari Palembang menuju ke Talangbeteto untuk bertemu kembali ke Dinkarta.

Wedjangan Mr. Abd.  
Madjid

Pada tg. 23-10 malam Mr. Abdul Majid, Menteri Muda Sosial dan toean Karamandi, Wakil Kementerian Negara, memberikan pedoman yang berjiwa dalam memperjuangkan revolusi kita sekarang ini di Panti Pengriahoran Oemoem Palembang.

Selain itu Mr. ABJ. Majid memperjelas kepada kita selanjutnya bahwa waspada sebagaimana yang telah seringkali diungkapkan oleh Presiden Soekarno.

Serba-serbi dari  
Andalas

Balai Pengetahuan Cemoeng

**PALERANG, 30 Okt** (Antara) — Di Lombok Linggau dibuka "Balai Pengetahuan Oemoen" yang akan memberikan koorsio politik, ekonomi, agama, keboedajaan dan lain-lain diketuai oleh Dr. Soepnat. Pelajaran tiap2 bagian pengetahuan diberikan oleh para ahli.

Rombongan-oetoesan Pemerintah  
ke Lamoeng.

Pada tanggal 29 Okt, pagi rombongan peteanan Pematanglah Pematang yang dipimpin oleh Mr. Hermani berangkat ke Tandjungkharang. Setelah rombongan akan menjadjo ke Soematera Tengah

Pemberton's, Divisi 17 August.

Di Bengkulu telah dibentuk Panitia 17 Agustus Divisi yang anggotanya terdiri dari bekas-karyawan Harian Rakyat, Pemuda, P.R.I., Subhilitas, Hiz-

Penggantian tentara Inggris.

Penyampang pengangkutan tentara Inggris telah tentara Belanda lebih banyak diabaikan bahwa pada tanggal 28 Okt, jam 13.00 telah didaraskan di Palembang tentara Belanda dengan 2 kapal angkut, barangnya kira-kira 740 orang berlatas. Berasal dari 500 orang dari ini berasal di Palembang. Menoreh berarak, pasukan tersebut didatangi

## Mendidik Kader<sup>2</sup> perkeboenan

DIKARTI, 28 October

[illegible]

**Aka**  
**al**  
*Djika*

DJAKARTA  
Pada tgl. :  
telah dilangsung  
berbagai diay

foto melukis kita  
 kan bahwa peran  
 Belanda kini sed  
 main dengan in  
 pahlak Indonesia  
 tentara Inggris  
 agen daratku  
 kemungkinan m  
 dan diwanti-m  
 Belanda. Dika  
 sedang diodeok  
 sipkan Inggris  
 sikap kita bebun  
 dengan sekera  
 kreator dan per  
 kan pada Fener  
 nesia. Dika te  
 diinjeksi, ma  
 terpakas akan  
 retak, jagat  
 akan merag

Kita tidak akan  
sing (Belanda).  
dikantor? atau pe  
saja mereka men  
stasiun untuk car

[illegible]

Setelah pertanda

PERINGATAN:

Kewadjilim Tee

Makhermat Djum  
13-10-45, Jombang  
Karya: Kertanegara  
Hilwanah-dinana  
Book1.

Lower political participation

Maka belianpa  
vinau dikira D

1. Identifikasi Masalah  
 2. Pengumpulan Data  
 3. Pengolahan Data  
 4. Penyimpulan  
 5. Penyajian  
 6. Evaluasi



Lampiran 14 : “Foto ORIPS (Oeang Repoebliek Indonesia Propinsi Sumatera)”



Sumber: Koleksi Foto di Perpustakaan Nasional

Lampiran 15 : “Foto ORIN (Oeang Repoebliek Indonesia Daerah Nias)”



Sumber: Koleksi Foto di Perpustakaan Nasional

## Lampiran 16 : “Foto-foto Uang”



Uang Jepang (Dai Nippon) atau Uang Invasi



Uang Nica atau Uang Merah



Uang ORI 5 Sen



Uang ORI 50 Rupiah

Sumber : Koleksi Museum Bank Indonesia